

**LAPORAN AKTUALISASI
DIGITALISASI DOKUMEN PENDUKUNG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
MELALUI *GOOGLE DRIVE*
PADA SUB DIREKTORAT ANALISIS DAYA DUKUNG DAN
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
BKKBN PUSAT**



Oleh:
DEVI NOVITASARI
NIP : 199511122019022004

**PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL JAKARTA, TAHUN 2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III**

**DIGITALISASI DOKUMEN PENDUKUNG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
MELALUI *GOOGLE DRIVE***

Nama : Devi Novitasari
NIP : 199511122019022004
Unit Kerja/Tempat Magang : Sub Direktorat Analisis Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan
BKKBN Pusat

Telah Disetujui untuk Mengikuti Seminar
Pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019

Mentor,



Reni Ardianti, S.Kom, M.Si
NIP. 198407022006042012

Coach,



Yenie Wulandari, S.Sos., MA
NIP. 198402252010122001

**BERITA ACARA
LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III**

**DIGITALISASI DOKUMEN PENDUKUNG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
MELALUI *GOOGLE DRIVE***

Nama : Devi Novitasari
NIP : 199511122019022004
Unit Kerja/Tempat Magang : Sub Direktorat Analisis Daya Dukung
dan Daya Tampung Lingkungan
BKKBN Pusat

Telah diuji di depan Tim Penguji
Pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019

Penguji,



Najid Jauhar, S.Sos., S.HI., M.Si
NIP. 198008212008011008

Coach,



Yenie Wulandari, S.Sos., MA
NIP. 198402252010122001

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana

.....
NIP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat, dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi dengan baik, sebagai salah satu syarat kelulusan dalam melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS BKKBN Golongan III tahun 2019.

Dalam membuat laporan aktualisasi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Reni Ardianti S.Kom, M.Si selaku mentor yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan sehingga laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan
2. Ibu Yenie Wulandari S.Sos., MA selaku *coach* yang senantiasa membimbing, memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian laporan
3. Bapak dan ibu widyaiswara yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat
4. Orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis
5. Panitia pelaksana Pelatihan Dasar CPNS BKKBN Golongan III Tahun 2019.
6. Teman - teman Pelatihan Dasar CPNS BKKBN Golongan III Tahun 2019 Latbang DIY yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
7. Teman – teman di Ditdamduk BKKBN Pusat yang telah memberikan saran dan kritiknya kepada penulis

Penulis menyadari bahwa laporan aktualisasi ini masih terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan rancangan aktualisasi ini agar bermanfaat bagi orang banyak

Jakarta, 23 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Profil Lembaga	6
B. Visi Misi Organisasi.....	8
C. Tugas dan Fungsi Organisasi.....	8
D. Tugas Pokok dan Fungsi ASN/PNS	12
E. Tujuan dan Manfaat	12
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI	13
A. Analisa Lingkungan Kerja.....	13
B. Matriks Analisa Lingkungan Kerja Hingga Menemukan Gagasan/Kegiatan Pemecahan Isu	17
C. Deskripsi Gagasan/Kegiatan	20
D. Matrik Rancangan Aktualisasi	23
E. Jadwal Rencana Aktualisasi	29
F. Rencana Antisipasi Kendala yang Dihadapi	31
BAB III CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	32
A. Gambaran Umum Pelaksanan Aktualisasi	32
B. Analisa Dampak jika Isu Tidak Dilaksanakan.....	36
C. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi	38
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44
C. Rencana Tindak Lanjut	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Lembaga

a. Gambaran Umum BKKBN

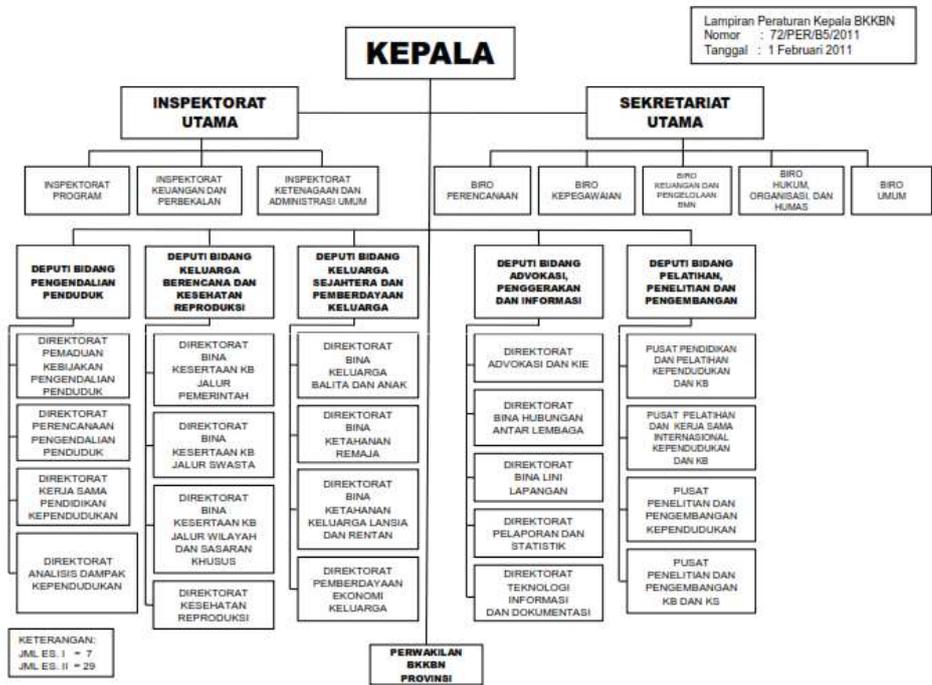
Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 62 Tahun 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. BKKBN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan lampiran huruf (n) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Saat ini BKKBN dipimpin oleh dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K).

BKKBN memiliki tiga nilai Revolusi Mental, yaitu:

- a) Integritas (jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik).
- b) Etos kerja (kerja keras, kerja cerdas, berdaya saing, optimis, inovatif, dan produktif).
- c) Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan umum).

b. Struktur Organisasi



Gambar 1 : Struktur Organisasi BKKBN

c. Budaya Organisasi BKKBN

Budaya kerja merupakan perilaku kerja yang menjadi kunci keberhasilan organisasi. Budaya kerja dapat dijadikan sebagai dasar tercapainya tujuan organisasi.

Budaya kerja yang dianut oleh BKKBN adalah Cerdas, Tangguh, Kerjasama, Integritas dan Ikhlas yang selanjutnya disingkat CETAK TEGAS, yang merupakan akronim dari:

- a) Cerdas, yaitu perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
- b) Tangguh, yaitu perilaku untuk memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan.
- c) Kerjasama, yaitu perilaku membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.

- d) Integritas, yaitu perilaku untuk membuat jujur, terbuka, dan konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
- e) Ikhlas, yaitu perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh.

B. Visi Misi Organisasi

VISI

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas

MISI

- a) Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- b) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- d) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- e) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

C. Tugas dan Fungsi Organisasi

BKKBN mempunyai tugas: “Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- b) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB;
- c) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;
- e) Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- f) Penyusunan desain Program KKBPK;

- g) Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h) Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional;
- i) Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga
- j) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
- k) Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m) Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- n) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- o) Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB;
- b) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- e) Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

Berdasarkan Perka BKKBN No. 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk. Bidang pengendalian penduduk sebagaimana

dimaksud meliputi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerja sama pendidikan kependudukan. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk;
- d) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk;
dan
- e) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk.

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan,

serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk.

Penulis ditempatkan di unit kerja Subdirektorat Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun rincian tugas dan fungsi Subdirektorat Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Subdirektorat Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan terdiri atas:

- a) Seksi Analisis Daya Dukung Lingkungan; dan
- b) Seksi Analisis Daya Tampung Lingkungan.

Seksi Analisis Daya Tampung Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya tampung lingkungan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi ASN/PNS

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pasal 10 tentang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai Pelaksana Kebijakan Publik; Pelayan Publik; Perekat dan Pemersatu Bangsa.

Tugas ASN sesuai Undang-Undang No 5 Tahun 2014 pasal 11 tentang ASN sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
- c) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- a) Penulis dapat memahami dan memaknai nilai-nilai dasar profesi yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA) yang akan dituangkan dalam kegiatan aktualisasi.
- b) Penulis dapat mengimplementasikan nilai-nilai ANEKA dan memberikan kontribusi kepada organisasi melalui kegiatan aktualisasi ini.

b. Manfaat

- a) Bagi Diri Sendiri
Mampu menjadi Aparatur Sipil Negara yang professional dalam menjalankan tugasnya dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel, mengutamakan kepentingan nasional, menjunjung tinggi etika, meningkatkan kualitas mutu, serta tidak melakukan korupsi dalam menjalankan tugas
- b) Bagi Organisasi
Dengan digitalisasi dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive* akan memudahkan pegawai Ditdamduk dalam mendokumentasikan, melaporkan, dan mengakses hasil kegiatan.

BAB II

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Analisa Lingkungan Kerja

Berdasarkan Peraturan Kepala (PERKA) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan merupakan salah satu dari 4 (empat) direktorat yang berada di bawah Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk. Sesuai dengan PERKA BKKBN tersebut, tugas pokok dan fungsi Direktorat Analisis Dampak Kependudukan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); pemantauan dan evaluasi; serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Analisis Dampak Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- b) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- c) Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis dampak kependudukan terhadap sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan

- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh deputi bidang pengendalian penduduk.

Struktur Organisasi Direktorat Analisis Dampak Kependudukan terdiri atas:

- a) Subdirektorat Analisis Dampak Sosial Ekonomi;
- b) Subdirektorat Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
- c) Subdirektorat Analisis Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan.

Subdirektorat Analisis Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Analisis Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terdapat beberapa kendala yang ditemukan yang kemudian dalam rancangan aktualisasi ini akan dicari solusinya. Terdapat 3 isu yang memiliki skor tertinggi, yaitu:

- a) Belum adanya digitalisasi dokumen pendukung SPIP
- b) Belum tertatanya surat masuk dan surat keluar
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang isu kependudukan

Isu-isu tersebut jika dikaitkan dengan materi agenda III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen ASN

Isu tentang belum adanya digitalisasi dokumen berkaitan dengan Manajemen ASN. Salah satu nilai dasar ASN adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan melakukan digitalisasi dokumen SPIP akan membantu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan keandalan pelaporan kegiatan maupun keuangan. Sedangkan isu mengenai belum optimalnya pemanfaatan media untuk menginformasikan mengenai isu kependudukan terkait dengan kode etik ASN yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

2. Pelayanan Publik

Isu tentang masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang isu kependudukan tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik. Karena sosialisasi tentang isu-isu kependudukan kurang maksimal, sehingga masyarakat masih minim pengetahuan hingga berefek kepada tingginya tingkat kepadatan penduduk.

Dalam rancangan aktualisasi ini, penentuan prioritas isu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan isu dari yang paling penting untuk segera diselesaikan sampai yang kurang

penting. Dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya, maka sulit untuk dapat menyelesaikan semua isu secara sekaligus, sehingga dilakukan penentuan prioritas isu untuk mengetahui isu mana yang harus lebih dahulu menjadi *concern* untuk ditindaklanjuti. Metode yang digunakan penulis untuk melakukan penentuan prioritas isu adalah metode matriks USG. Pentingnya suatu isu dibandingkan isu lainnya dapat dilihat dari tiga aspek berikut:

- 1) Kegawatan masalah yang dilihat dari pengaruhnya sekarang ini terhadap produktivitas, orang, dan/atau sumber dana dan sumber daya.
- 2) Mendesaknya suatu masalah dilihat dari waktu yang tersedia.
- 3) Perkiraan yang terbaik mengenai kemungkinan berkembangnya suatu masalah.

Dalam penggunaan metode matriks USG, isu yang prioritas akan dinilai dengan melihat tiga faktor dari masing-masing isu tersebut. Sesuai dengan namanya, ketiga faktor tersebut adalah *urgency*, *seriousness*, dan *growth*. Untuk mengurangi tingkat subyektivitas dalam menentukan masalah prioritas, maka perlu menetapkan kriteria untuk masing-masing unsur USG tersebut. Umumnya digunakan skor dengan skala tertentu. Dalam hal ini, penulis menggunakan skor dengan skala 1-5. Semakin tinggi tingkat urgensi, serius, atau pertumbuhan masalah tersebut, maka semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut. Penilaian terhadap masalah-masalah tersebut ditampilkan pada tabel matriks USG sebagai berikut:

B. Matriks Analisa Lingkungan Kerja Hingga Menemukan Gagasan/Kegiatan Pemecahan Isu

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
1	Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan	a.) Belum adanya digitalisasi dokumen pendukung SPIP	4	3	4	11	Manajemen ASN	1.) Mempelajari panduan penggunaan <i>google drive</i>
								2.) Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit
								3.) Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam <i>google drive</i>
								4.) Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
								5.) Melakukan evaluasi
		b.) Belum tertatanya surat masuk dan surat keluar	2	2	2	6	Manajemen ASN	
2.	Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan	a.) Belum optimalnya pemanfaatan media untuk menginformasikan mengenai isu kependudukan	2	3	2	7	Manajemen ASN	
		b.) Belum adanya bahan seminar kependudukan	2	2	2	6	Pelayanan Publik	

NO	URAIAN TUGAS	PERMASALAHAN	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL	Keterkaitan dengan Substansi (Manajemen ASN, Pelayanan Publik, WoG)	GAGASAN/KEGIATAN PEMECAHAN ISU
		c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang isu kependudukan	2	3	2	7	Pelayanan Publik	

Berdasarkan analisis isu menggunakan metode USG diatas dapat disimpulkan bahwa isu nomor 1 menjadi prioritas utama untuk dicarikan solusi permasalahannya. Adapun isu nomor 1 tersebut adalah “Belum adanya digitalisasi dokumen pendukung SPIP”. Isu tersebut menjadi prioritas utama karena SPIP juga terdapat di dalam Kontrak Kinerja Eselon 2. Pendigitalisasian dokumen ini juga bisa berguna untuk laporan hasil kegiatan ke bendahara pengeluaran pembantu (bpp) komponen, laporan keuangan untuk bendahara, dan e-monev.

C. Deskripsi Gagasan/Kegiatan

1) Mempelajari panduan penggunaan *google drive*

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mencari dan mempelajari tentang penggunaan *google drive*. Langkah ini dilakukan agar pengguna tidak bingung dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Langkah kedua adalah penulis akan mencatat poin-poin penting tentang penggunaan *google drive*. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis untuk melihat cara penggunaannya secara lebih sederhana. Setelah itu penulis melakukan koordinasi dengan mentor atau atasan langsung untuk konsultasi dan untuk mendapat persetujuan untuk mendigitalisasikan dokumen. Kegiatan ini memiliki keterkaitan substansi dengan nilai akuntabilitas yaitu memiliki kejelasan target dan konsisten. Etika Publik yaitu tanggap dalam permasalahan yang ada, cepat dalam mempelajari dan mengedepankan etika sopan santun saat berkoordinasi dengan mentor atau atasan langsung. Komitmen mutu yaitu melakukan tugas dengan efektifitas, efisiensi yang berorientasi pada hasil. Anti korupsi yaitu peduli dan bertanggung jawab terhadap tugas sehingga mengantisipasi masalah administratif yang akan datang. Kegiatan ini juga memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan mempelajari panduan mengunggah dokumen dalam *google drive*, maka dapat meningkatkan pemahaman penggunaan sehingga bisa mengerjakannya dengan baik. Kegiatan ini berupaya untuk mewujudkan nilai cerdas, dengan bertindak optimal secara efektif dan efisien.

2) Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit

Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang akan dikelompokkan. Dokumen dikumpulkan lalu di kelompokkan sesuai dengan waktu kegiatan dan sub direktorat. Setelah itu, dokumen di *scan* untuk pendigitalisasian ke dalam *google drive*. Tahapan ini memiliki keterkaitan substansi dengan nilai akuntabilitas yaitu menyediakan data/informasi yang akurat. Nasionalisme yaitu

mengelompokan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu. Komitmen mutu yaitu menjaga kualitas kerja dalam mengelompokan dokumen sesuai dengan kriteria tertentu. Anti korupsi yaitu tanggung jawab terhadap tugas mengelompokan dokumen. Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Kegiatan ini berupaya untuk mewujudkan nilai cerdas, dengan bertindak optimal secara efektif dan efisien.

3) Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive*

Pertama, penulis akan membuat akun *google drive* menggunakan *email* ditdamduk yang sudah ada. Setelah terbuatnya akun *google drive*, penulis akan membuat folder-folder berdasarkan waktu kegiatan dan sub direktorat. Setelah semua sudah siap, penulis akan mengunggah dokumen ke dalam folder-folder sesuai dengan waktu kegiatan dan subdirektoratnya. Tahapan ini memiliki keterkaitan substansi dengan nilai akuntabilitas yaitu menata dokumen dengan mengedepankan konsistensi. Nasionalisme yaitu melakukan penataan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Etika Publik yaitu menata dokumen dengan cermat. Komitmen mutu yang berorientasi pada hasil mutu dan melakukan tugas dengan kreatif. Anti korupsi yaitu bertanggung jawab terhadap tugas menata dokumen dan melaksanakan tugas dengan disiplin. Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan terkumpulnya dan terkelompokkannya dokumen akan mempercepat pekerjaan karena mempermudah pencarian dokumen pendukung SPIP yang dibutuhkan. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat.

4) Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam *google drive* kepada seluruh pegawai ditdamduk

Setelah terunggahnya dokumen ke dalam *google drive*, penulis akan mensosialisasikan tentang penggunaan *google drive* kepada seluruh pegawai ditdamduk agar semua bisa memahami cara penggunaannya. Setelah itu, penulis akan membagikan *link* dokumen kepada seluruh pegawai ditdamduk agar seluruh pegawai bisa mengakses dokumennya dengan mudah untuk kepentingannya masing-masing. Tahapan ini memiliki keterkaitan substansi dengan nilai akuntabilitas yaitu keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan, nasionalisme yaitu memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum. Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam sosialisasi. Komitmen Mutu yaitu efektifitas, efisiensi. Anti korupsi yaitu adil dalam mensosialisasikan kepada seluruh pegawai ditdamduk. Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan sosialisasi dengan optimal dan mewujudkan nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.

5) Melakukan evaluasi

Setelah semua tahapan kegiatan dilaksanakan, penulis akan membuat *form* evaluasi untuk dibagikan kepada seluruh pegawai ditdamduk. Setelah diisi, *form* akan dianalisis dan melakukan penyusunan laporan hasil evaluasi tersebut. Tahapan ini memiliki keterkaitan substansi dengan nilai akuntabilitas yaitu kejelasan target dan konsistensi. Melakukan pola kerja beretika dengan sopan. Melakukan evaluasi demi mendapatkan hasil yang terbaik. Anti korupsi yaitu menyusun laporan dengan jujur dan transparan. Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan evaluasi dengan optimal.

D. Matrik Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja:	: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Identifikasi Isu	: 1. Belum adanya digitalisasi dokumen pendukung Sitem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) 2. Belum tertatanya surat masuk dan surat keluar 3. Belum adanya bahan seminar kependudukan 4. Belum optimalnya pemanfaatan media untuk menginformasikan mengenai isu kependudukan 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang isu kependudukan
Isu yang Diangkat	: Digitalisasi Dokumen Pendukung Sitem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Direktorat Analisis Dampak Kependudukan melalui <i>Google Drive</i>
Gagasan/Kegiatan Pemecahan Isu	: 1) Mempelajari panduan penggunaan <i>google drive</i> 2) Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit 3) Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam <i>google drive</i> 4) Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk 5) Melakukan evaluasi

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mempelajari panduan penggunaan <i>google drive</i>	a) mencari dan mempelajari tentang penggunaan <i>google drive</i> b) mencatat poin- poin penting tentang penggunaan <i>google drive</i> c) Melakukan koordinasi dengan mentor	Terpelajarinya tata cara penggunaan <i>google drive</i> Tercatatnya poin-poin penting penggunaan <i>google drive</i> Terlaksananya koordinasi dengan mentor <i>Evidence:</i> Catatan poin-poin penting	a) Akuntabilitas: kejelasan target, konsisten. b) Etika Publik: tanggap, cepat, akurat, mengedepankan etika sopan santun saat berkoordinasi dengan mentor c) Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil d) Antikorupsi: peduli dan bertanggung jawab terhadap tugas sehingga mengantisipasi masalah administratif yang akan datang	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan mempelajari panduan mengunggah dokumen dalam Google Drive, maka dapat meningkatkan pemahaman penggunaan sehingga bisa mengerjakannya dengan baik.	Kegiatan ini berupaya untuk mewujudkan nilai cerdas, dengan bertindak optimal secara efektif dan efisien

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit	a) menyiapkan dokumen yang akan dikelompokan b) mengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit c) <i>Scan</i> dokumen-dokumen	Telah siapnya dokumen yang akan dikelompokan Terkelompoknya dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit Dokumen telah terscan <i>Evidence: Foto</i>	a) Akuntabilitas: menyediakan data/informasi yang akurat b) Nasionalisme: mengelompokan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu c) Komitmen Mutu: Menjaga kualitas kerja dalam mengelompokan dokumen sesuai dengan kriteria tertentu d) Antikorupsi: peduli terhadap tugas pengelompokan dokumen untuk memudahkan pencarian dokumen	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan teraturnya dokumen akan mempercepat pekerjaan karena dokumen pendukung SPIP sudah tersedia.	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat. Kegiatan ini juga mewujudkan nilai tangguh, yaitu sikap pantang menyerah dalam mengerjakan tugas

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam <i>google drive</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) Membuat akun <i>Google Drive</i> b) Membuat folder berdasarkan bulan, tahun dan subdit c) Mengunggah dokumen ke dalam <i>Google Drive</i> 	<p>Akun <i>google drive</i> telah dibuat</p> <p>Telah terbuatnya folder di dalam <i>google drive</i></p> <p>Terunggahnya dokumen ke dalam <i>google drive</i></p> <p><i>Evidence: bukti screenshot</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Akuntabilitas: menata dokumen dengan konsisten b) Nasionalisme: melakukan penataan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi c) Etika Publik: cermat dalam bekerja d) Komitmen mutu: berorientasi pada mutu dan kreatif dalam menata dokumen sesuai waktu dan subdit e) Antikorupsi: Melaksanakan tugas dengan disiplin 	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan terkumpulnya dan terkelompokkannya dokumen akan mempercepat pekerjaan karena mempermudah pencarian dokumen pendukung SPIP yang dibutuhkan.	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat.

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
4	Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk	<p>a) Menjelaskan penggunaan <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai Ditdamduk</p> <p>b) Membagikan <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk</p>	<p>Tersosialisasikannya hasil pengelompokan dokumen</p> <p>Terbagikannya <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i>, Notulen pertemuan</p> <p><i>Evidence</i> : Foto</p>	<p>a) Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan</p> <p>b) Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu</p> <p>c) Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan</p> <p>d) Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil</p> <p>e) Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas dan adil dalam mensosialisasikan kepada seluruh pegawai ditdamduk</p>	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan sosialisasi dengan optimal dan mewujudkan nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT	KETERKAITAN SUBSTANSI	KONTRIBUSI VISI/MISI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	Melakukan evaluasi	a) Membuat <i>form</i> evaluasi tentang penggunaan digitalisasi dokumen di dalam <i>google drive</i> b) Membagikan <i>form</i> evaluasi kepada seluruh pegawai ditdamduk untuk diisi c) Menganalisis dan menyusun laporan hasil <i>form</i> evaluasi	Terbuatnya <i>form</i> evaluasi Terbagikannya <i>form</i> evaluasi Tersusunnya laporan <i>Evidence:</i> Bukti <i>form</i> evaluasi dan foto.	a) Akuntabilitas: kejelasan target dan konsistensi b) Nasionalisme: melakukan evaluasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi c) Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam melakukan evaluasi d) Komitmen mutu: Melakukan evaluasi demi mendapatkan hasil yang terbaik e) Anti Korupsi: Menyusun laporan dengan jujur dan benar	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan evaluasi dengan optimal

E. Jadwal Rencana Aktualisasi

No	Kegiatan	Oktober	November				Desember
		IV	I	II	III	IV	I
1	Mempelajari panduan penggunaan <i>google drive</i>						
	a) Mencari dan mempelajari tentang penggunaan <i>google drive</i>						
	b) Mencatat poin- poin penting tentang penggunaan <i>google drive</i>						
	c) Melakukan koordinasi dengan mentor						
2	Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit						
	a) menyiapkan dokumen yang akan dikelompokkan						
	b) mengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit						
	c) <i>Scan</i> dokumen-dokumen						
3	Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam <i>google drive</i>						
	a) Membuat akun <i>google drive</i>						
	b) Membuat folder berdasarkan waktu kegiatan dan subdit						
	c) Mengunggah dokumen ke dalam <i>google drive</i>						
4	Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk						
	a) Menjelaskan penggunaan <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk						

	b) Membagikan <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk						
5	Melakukan evaluasi						
	a) Membuat <i>form</i> evaluasi tentang penggunaan digitalisasi dokumen di dalam <i>google drive</i>						
	b) Membagikan <i>form</i> evaluasi kepada seluruh pegawai ditdamduk untuk diisi						
	c) Menganalisis dan menyusun laporan hasil <i>form</i> evaluasi						

F. Rencana Antisipasi Kendala yang Dihadapi

No	Tahapan Kegiatan	Kendala	Antisipasi
1	Mempelajari panduan penggunaan <i>google drive</i> a) Mencari dan mempelajari tentang penggunaan <i>google drive</i> b) Mencatat poin- poin penting tentang penggunaan <i>google drive</i> c) Melakukan koordinasi dengan Mentor	Gangguan koneksi internet di kantor	Menggunakan kuota mandiri
2	Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit a) menyiapkan dokumen yang akan dikelompokkan b) mengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit c) <i>Scan</i> dokumen-dokumen	Dokumen tidak lengkap	Mencari dokumen di pengelola anggaran dan di pelaksana kegiatan
3	Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam <i>google drive</i> a) Membuat akun <i>google drive</i> b) Membuat folder berdasarkan waktu kegiatan dan subdit c) Mengunggah dokumen ke dalam <i>google drive</i>	a) Terbatasnya ruang penyimpan di dalam <i>google drive</i> b) Gangguan koneksi internet di kantor	a) Memiliki <i>backup softfile</i> b) Menggunakan kuota mandiri
4	Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk a) Menjelaskan penggunaan <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk b) Membagikan <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk	Kurang terkomunikasikan dengan baik	Menjelaskan dengan baik dan rinci
5	Melakukan evaluasi a) Membuat <i>form</i> evaluasi tentang penggunaan digitalisasi dokumen di dalam <i>google drive</i> b) Membagikan <i>form</i> evaluasi kepada seluruh pegawai ditdamduk untuk diisi c) Menganalisis dan menyusun laporan hasil <i>form</i> evaluasi	Terbatasnya waktu penyusunan laporan evaluasi	Mengatur waktu dan membuat skala prioritas

BAB III
CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Gambaran Umum Pelaksanan Aktualisasi

Penulis melaksanakan aktualisasi untuk memenuhi tugas dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2019 selama tiga puluh hari masa habituasi atau *off campus* yang berlangsung mulai tanggal 28 Oktober 2019 sampai 6 Desember 2019.

Pada saat *off class*, penulis tidak hanya melaksanakan rancangan aktualisasi yang telah di buat sebelumnya, tetapi juga melaksanakan penugasan-penugasan yang di berikan oleh atasan langsung. Adapun bentuk aktual di lapangan akan penulis uraikan dalam pelaporan aktualisasi pada bab ini secara lebih rinci.

Rangkaian kegiatan aktualisasi tersebut merupakan gagasan untuk pemecahan isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi, yaitu belum adanya digitalisasi dokumen pendukung sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Isu tersebut merupakan masalah yang terjadi di lingkungan kerja Penulis, yaitu di Direktorat Analisis Dampak Kependudukan, BKKBN Pusat.

Adapun gambaran umum pelaksanaan aktualisasi sebagai upaya pemecahan isu adalah sebagai berikut:

I. Mempelajari panduan penggunaan *google drive*

Kegiatan I	:	Mempelajari panduan penggunaan <i>google drive</i>
Tanggal Pelaksanaan	:	28-30 Oktober 2019
Dokumentasi	:	Lampiran 6, Halaman 183

Uraian Kegiatan:

1. Tahapan pertama : Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari dan mempelajari tentang penggunaan *google drive*. Penulis mencarinya melalui *google* dengan mencari artikel-artikel terkait di *website* yang menurut penulis dapat dipercaya. Langkah ini dilakukan agar

pengguna tidak bingung dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya.

2. Tahapan kedua : Setelah menemukan dan belajar tentang penggunaan *google drive*, penulis mencatat poin-poin penting tentang penggunaan *google drive* di dalam buku. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis untuk melihat cara penggunaannya secara lebih sederhana.
 3. Tahapan ketiga : Langkah terakhir yang penulis lakukan pada kegiatan pertama ini adalah melakukan koordinasi dengan mentor atau atasan langsung untuk konsultasi kegiatan yang akan dilakukan kedepannya dan untuk mendapat persetujuan dalam mendigitalisasikan dokumen.
- Hambatan : Hambatan yang bisa saja terjadi pada pelaksanaan aktualisasi telah disajikan pada tabel hambatan/kendala beserta antisipasinya yang telah tertuang pada rancangan aktualisasi, dan pada pelaksanaannya hambatan atau kendala tersebut tidak terjadi
 - Solusi : Seluruh tahapan kegiatan pada kegiatan pertama ini berjalan sesuai rencana, tepat waktu, lancar dan tidak ada hambatan sehingga tidak di paparkan solusi atas hambatan yang terjadi.

II. Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit

Kegiatan II	:	Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit
Tanggal Pelaksanaan	:	4-8 November 2019
Dokumentasi	:	Lampiran 6, Halaman 184

Uraian Kegiatan:

1. Tahap pertama : Menyiapkan dokumen yang akan dikelompokan adalah langkah awal yang penulis lakukan dalam kegiatan ini. Penulis mengumpulkan dokumen dari pelaksana kegiatan.
2. Tahap kedua : Dokumen dikumpulkan lalu di kelompokkan sesuai dengan waktu kegiatan dan sub direktorat agar memudahkan pegawai ditdamduk dalam mencari dan mengaksesnya.

3. Tahap ketiga : Setelah dokumen dikelompokkan, dokumen di *scan* pada mesin *scan* di kantor untuk *pendigitalisasian* ke dalam *google drive*.
- Hambatan : Dalam menyiapkan dan pengumpulan dokumen penulis menemukan hambatan yaitu dokumen pendukung SPIP kurang lengkap.
 - Solusi : Solusi dari hambatan tersebut adalah terus mencari dokumen dan menanyakan pada pelaksana kegiatan.

III. Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive*

Kegiatan III	:	Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam <i>google drive</i>
Tanggal Pelaksanaan	:	11-19 November 2019
Dokumentasi	:	Lampiran 6, Halaman 186

Uraian Kegiatan:

1. Tahap pertama : Penulis membuat akun *google drive* pada laman <http://drive.google.com> menggunakan *email* ditdamduk. Karena sudah memiliki *email*, maka tahapan dalam pembuatan akun *google drive* tidak banyak dan bisa segera *log in*.
 2. Tahap kedua : Setelah selesai membuat akun *google drive*, penulis membuat folder-folder berdasarkan waktu kegiatan yaitu berdasarkan tahun dan bulan dan berdasarkan sub direktorat yaitu subdit analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, subdit analisis dampak politik, pertahanan, keamanan, dan subdit analisis dampak sosial ekonomi.
 3. Tahap ketiga : Setelah folder sudah siap, penulis mulai mengunggah dokumen satu persatu ke dalam folder-folder sesuai dengan waktu kegiatan dan subdirektoratnya.
- Hambatan : Hambatan yang bisa saja terjadi pada pelaksanaan aktualisasi telah disajikan pada tabel hambatan/kendala beserta antisipasinya yang telah tertuang pada rancangan aktualisasi, dan pada pelaksanaannya hambatan atau kendala tersebut tidak terjadi

- Solusi : Seluruh tahapan kegiatan pada kegiatan ketiga ini berjalan sesuai rencana, tepat waktu, lancar dan tidak ada hambatan sehingga tidak di paparkan solusi atas hambatan yang terjadi.

IV. Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam *google drive* kepada seluruh pegawai ditdamduk

Kegiatan IV	:	Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk
Tanggal Pelaksanaan	:	25 November 2019
Dokumentasi	:	Lampiran 6, Halaman 187

Uraian Kegiatan :

1. Tahap pertama : Setelah terunggahnya dokumen ke dalam *google drive*, penulis mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen kepada seluruh pegawai ditdamduk dengan menjelaskan cara penggunaan *google drive* agar semua bisa memahaminya.
 2. Tahap kedua : Setelah dijelaskan dan semua sudah memahaminya, penulis membagikan *link google drive* yang telah dibuat kepada seluruh pegawai ditdamduk agar seluruh pegawai bisa mengakses dokumen yang diperlukan dengan mudah untuk kepentingannya masing-masing.
- Hambatan : Hambatan yang bisa saja terjadi pada pelaksanaan aktualisasi telah disajikan pada tabel hambatan/kendala beserta antisipasinya yang telah tertuang pada rancangan aktualisasi, dan pada pelaksananaannya hambatan atau kendala tersebut tidak terjadi
 - Solusi : Seluruh tahapan kegiatan pada kegiatan keempat ini berjalan sesuai rencana, tepat waktu, lancar dan tidak ada hambatan sehingga tidak di paparkan solusi atas hambatan yang terjadi.

V. Melakukan evaluasi

Kegiatan III	:	Melakukan evaluasi
Tanggal Pelaksanaan	:	2-4 Desember 2019
Dokumentasi	:	Lampiran 6, Halaman 188

Uraian Kegiatan:

1. Tahap pertama : Setelah semua tahapan kegiatan dilaksanakan, penulis membuat *form* evaluasi untuk mengetahui apakah ada kendala dalam melakukan pendigitalisasian dokumen dalam *google drive* dan untuk mengetahui apakah pendigitalisasian tersebut bermanfaat untuk seluruh pegawai ditdamduk.
 2. Tahap kedua : Setelah membuat *form* evaluasi, penulis membagikannya kepada pegawai ditdamduk untuk mengisi *form* tersebut.
 3. Tahap ketiga : *Form* yang telah diisi akan dianalisis apakah ada kendala atau tidak, apakah bermanfaat untuk pegawai ditdamduk dan hasil evaluasi tersebut dapat membantu penulis dalam melakukan penyusunan laporan.
- Hambatan : Hambatan yang bisa saja terjadi pada pelaksanaan aktualisasi telah disajikan pada tabel hambatan/kendala beserta antisipasinya yang telah tertuang pada rancangan aktualisasi, dan pada pelaksanaannya hambatan atau kendala tersebut tidak terjadi
 - Solusi : Seluruh tahapan kegiatan pada kegiatan kelima ini berjalan sesuai rencana, tepat waktu, lancar dan tidak ada hambatan sehingga tidak di paparkan solusi atas hambatan yang terjadi.

B. Analisa Dampak Jika Isu Tidak Dilaksanakan

Jika isu yang terjadi di lingkungan Direktorat Analisis Dampak Kependudukan yaitu belum adanya digitalisasi dokumen pendukung sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak segera diatasi, maka akan terjadi beberapa persoalan yang bertentangan dengan nilai dasar ANEKA, yaitu:

1. Akuntabilitas

Laporan hasil kegiatan untuk SPIP, SPJ maupun *E-Monev* menjadi tidak akuntabel karena setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak disertai dengan bukti yang lengkap dan pencarian dokumen secara manual akan memperlambat kerja pegawai yang dapat mengakibatkan terlambatnya atau tidak tepat waktunya penyampaian pelaporan hasil kegiatan.

2. Nasionalisme

Pengarsipan dokumen secara manual dapat mengakibatkan tercecer atau hilangnya dokumen sehingga terhambatnya kelancaran pekerjaan pegawai yang dapat mengganggu kepentingan bersama

3. Etika Publik

Tanpa dokumen yang lengkap dan kemudahan mengakses dokumen, komponen/bidang cenderung untuk tidak taat peraturan dalam penyampaian pelaporan.

4. Komitmen Mutu

Jika ada pelaksanaan audit, pelaporan dengan dokumen yang hilang atau tidak lengkap juga dapat menjadi temuan yang menjadikan penilaian kinerja menjadi kurang baik.

5. Anti Korupsi

Tanpa bukti dokumen yang lengkap, memunculkan risiko dugaan atau terjadinya kegiatan fiktif yang dapat mengarah ke perilaku atau tindak korupsi.

C. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

NO	KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	OUTPUT DAN BUKTI	HAMBATAN	SOLUSI	KETERKAITAN DENGAN AGENDA ANEKA	KONTRIBUSI TERHADAP TUGAS FUNGSI ORGANISASI	PENGUATAN NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mempelajari panduan penggunaan <i>google drive</i>	<p>a. Mencari dan mempelajari tentang penggunaan <i>google drive</i></p> <p>b. Mencatat poin-poin penting tentang penggunaan <i>google drive</i></p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan mentor</p>	28 – 30 Oktober 2019	<p>Terpelajarinya tata cara penggunaan <i>google drive</i></p> <p>Tercatatnya poin-poin penting penggunaan <i>google drive</i></p> <p>Terlaksananya koordinasi dengan mentor</p> <p><i>Evidence:</i> Catatan poin-poin penting</p>	-	-	<p>a) Akuntabilitas: kejelasan target, konsisten.</p> <p>b) Etika Publik: tanggap, cepat, akurat, mengedepankan etika sopan santun saat berkoordinasi dengan mentor</p> <p>c) Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil</p> <p>d) Antikorupsi: peduli dan bertanggung jawab terhadap tugas sehingga mengantisipasi masalah administratif yang akan datang</p>	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada tugas fungsi organisasi yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum.. Dengan mempelajari panduan mengunggah dokumen dalam <i>google drive</i> dan koordinasi dengan mentor, maka telah berkontribusi terhadap tugas fungsi organisasi	Kegiatan ini berupaya untuk mewujudkan nilai cerdas, dengan bertindak optimal secara efektif dan efisien

2	Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdirektorat	<p>a. Menyiapkan dokumen yang akan dikelompokan</p> <p>b. Mengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit</p> <p>c. <i>Scan</i> dokumen-dokumen</p>	4-8 November 2019	<p>Telah siapnya dokumen yang akan dikelompokan</p> <p>Terkelompoknya dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit</p> <p>Dokumen telah <i>terscan</i></p> <p><i>Evidence:</i> Foto</p>	Dokumen pendukung SPIP kurang lengkap	Terus mencari dan menanyakan pada pelaksana kegiatan	<p>a) Akuntabilitas: menyediakan data/informasi yang akurat</p> <p>b) Nasionalisme: mengelompokan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu</p> <p>c) Komitmen Mutu: Menjaga kualitas kerja dalam mengelompokan dokumen sesuai dengan kriteria tertentu</p> <p>d) Antikorupsi: peduli terhadap tugas pengelompokan dokumen untuk memudahkan pencarian dokumen</p>	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada tugas fungsi organisasi yaitu pengelolaan dan pengendalian sistem informasi dengan mengelompokan dokumen-dokumen sesuai waktu kegiatan dan subdirektorat	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat. Kegiatan ini juga mewujudkan nilai tangguh, yaitu sikap pantang menyerah dalam mengerjakan tugas
---	--	---	-------------------	--	---------------------------------------	--	---	--	---

3	Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam <i>google drive</i>	<p>a. Membuat akun <i>google drive</i></p> <p>b. Membuat folder berdasarkan waktu kegiatan dan subdit</p> <p>c. Mengunggah dokumen ke dalam <i>google drive</i></p>	11-19 November 2019	<p>Akun <i>google drive</i> telah dibuat</p> <p>Telah terbuatnya folder di dalam <i>google drive</i></p> <p>Terunggahnya dokumen ke dalam <i>google drive</i></p> <p><i>Evidence: bukti screenshot</i></p>	-	-	<p>a) Akuntabilitas: Bertanggung jawab terhadap tugas</p> <p>b) Nasionalisme: melakukan penataan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi</p> <p>c) Etika Publik: cermat</p> <p>d) Komitmen mutu: berorientasi pada mutu dan kreatif dalam menata sesuai waktu dan subdit</p> <p>e) Antikorupsi: Melaksanakan tugas dengan disiplin</p>	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada tugas fungsi organisasi yaitu pengelolaan dan pengendalian sistem informasi. Akun <i>google drive</i> dikelola dengan membuat folder berdasarkan waktu kegiatan dan subdit	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat.
---	--	---	---------------------	--	---	---	---	--	--

4	Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk	<p>a. Menjelaskan penggunaan <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk</p> <p>b. Membagikan <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk</p>	25 November 2019	<p>Tersampainya penjelasan penggunaan <i>google drive</i></p> <p>Terbagikannya <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> ke seluruh pegawai Ditdamduk</p> <p><i>Evidence:</i> foto</p>	-	-	<p>a) Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan</p> <p>b) Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu</p> <p>c) Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan</p> <p>d) Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil</p> <p>e) Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas</p>	Kegiatan ini memiliki kontribusi tugas fungsi organisasi yaitu pelaksanaan advokasi dan koordinasi kepada pegawai ditdamduk	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan sosialisasi dengan optimal dan mewujudkan nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama
---	---	---	------------------	--	---	---	---	---	---

5	Melakukan Evaluasi	<p>a. Membuat <i>form</i> evaluasi tentang penggunaan digitalisasi dokumen di dalam <i>google drive</i></p> <p>b. Membagikan <i>form</i> evaluasi kepada seluruh pegawai ditdamduk untuk diisi</p> <p>c. Menganalisis dan menyusun laporan hasil <i>form</i> evaluasi</p>	2-4 Desember 2019	<p><i>Form</i> evaluasi telah dibuat</p> <p>Terbagikannya <i>form</i> evaluasi</p> <p>Tersusunnya laporan</p> <p><i>Evidence: form</i> evaluasi, foto</p>	-	-	<p>a) Akuntabilitas: kejelasan target dan konsistensi</p> <p>b) Anti Korupsi: Menyusun laporan dengan jujur dan transparan</p>	Kegiatan ini memiliki kontribusi pada tugas fungsi organisasi yaitu penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan dari hasil yang telah didapat	Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan evaluasi dengan optimal
---	--------------------	---	-------------------	---	---	---	--	---	--

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama masa habituasi, Penulis melaksanakan kegiatan aktualisasi yaitu digitalisasi dokumen pendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Direktorat Analisis Dampak Kependudukan melalui *google drive*. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2019 hingga 6 Desember 2019 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan kegiatan dari masing-masing kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi memiliki keterkaitan substansi terhadap nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) dan juga merupakan kontribusi terhadap pelaksanaan visi dan misi BKKBN serta dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai organisasi BKKBN yaitu CETAK TEGAS (Cerdas, Tangguh, Kerja sama, Integritas dan Ikhlas).

Dalam pelaksanaan aktualisasi terdapat 2 tambahan tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yaitu *scan* dokumen-dokumen pada kegiatan 2 dan membagikan *form* evaluasi kepada seluruh pegawai ditdamduk untuk diisi pada kegiatan 4.

Adapun kegiatan-kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Mempelajari panduan penggunaan *google drive*
2. Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit
3. Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive*
4. Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam *google drive* kepada seluruh pegawai ditdamduk
5. Melakukan evaluasi

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan aktualisasi ini adalah :

1. Perlu adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk kelanjutan pelaksanaan digitalisasi dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive* yang akan memudahkan kerja pegawai dalam pelaporan hasil kegiatan
2. Untuk pengelolaan digitalisasi yang keberlanjutan, efektif dan efisien perlu dipertimbangkan untuk *upgrade* kapasitas atau penggunaan *google drive* dengan kapasitas yang besar atau *unlimited*.
3. Pengumpulan dokumen dan penyusunan laporan agar disusun segera setelah kegiatan dilaksanakan agar tidak lupa dan dokumen tidak hilang

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut setelah kegiatan aktualisasi dilaksanakan, yaitu:

1. Kegiatan digitalisasi dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive* agar tetap dilakukan oleh seluruh pegawai ditdamduk
2. Merekomendasikan *upgrade* kapasitas penyimpanan *google drive* agar dokumen pendukung SPIP bisa terus di *upload*
3. Pengumpulan dokumen dan penyusunan laporan disusun dengan segera setelah kegiatan dilaksanakan agar tidak lupa dan dokumen tidak hilang
4. Penulisan *link google drive* di papan informasi di dalam ruangan agar memudahkan pegawai ditdamduk.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta.

Handout

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Akuntabilitas: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Nasionalisme: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Etika Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Komitmen Mutu: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2015. *Anti Korupsi: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Manajemen ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Pelayanan Publik: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Whole of Government: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Lembaga Administrasi Negara. 2017. *Habitiasi: Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Publikasi Online

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.2019.<<http://bkkbn.go.id>>

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional.2019.<<http://rb.bkkbn.go.id>>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Form Pengendalian Aktualisasi oleh Mentor

Nama : Devi Novitasari
 NIP : 199511122019022004
 Unit Kerja : Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
 Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
 Isu : Digitalisasi Dokumen Pendukung Sistem Pengendalian Intern
 Pemerintah (SPIP) pada Direktorat Analisis Dampak
 Kependudukan melalui *Google Drive*
 Kegiatan 1 : Mempelajari panduan penggunaan *google drive*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari dan mempelajari tentang penggunaan <i>google drive</i> 2. Mencatat poin-poin penting tentang penggunaan <i>google drive</i> 3. Melakukan koordinasi dengan mentor ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpelajarinya tata cara penggunaan <i>google drive</i> 2. Tercatatnya poin-poin penting penggunaan <i>google drive</i> 3. Terlaksananya koordinasi dengan mentor <p><i>Evidence:</i> Catatan poin-poin penting</p> ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: kejelasan target, konsisten. 2. Etika Publik: tanggap, cepat, akurat, mengedepankan etika sopan santun saat berkoordinasi dengan mentor 3. Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil 4. Anti Korupsi: peduli dan bertanggung jawab terhadap tugas sehingga mengantisipasi masalah administratif yang akan datang ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan mempelajari panduan mengunggah dokumen dalam <i>google drive</i>, maka dapat meningkatkan pemahaman penggunaan sehingga bisa mengerjakannya dengan baik. 		

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini berupaya untuk mewujudkan nilai cerdas, dengan bertindak optimal secara efektif dan efisien 		
--	--	--

Kegiatan 2 : Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen yang akan dikelompokan 2. Mengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit 3. <i>Scan</i> dokumen-dokumen ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah siapnya dokumen yang akan dikelompokan 2. Terkelompoknya dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit 3. Dokumen telah terscan <p><i>Evidence:</i> Foto</p> ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: menyediakan data/informasi yang akurat 2. Nasionalisme: mengelompokan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu 3. Komitmen Mutu: Menjaga kualitas kerja dalam mengelompokan dokumen sesuai dengan kriteria tertentu 4. Anti Korupsi: peduli terhadap tugas pengelompokan dokumen untuk memudahkan pencarian dokumen ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan teraturnya dokumen akan mempercepat pekerjaan karena dokumen pendukung SPIP sudah tersedia. ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat. Kegiatan ini juga mewujudkan nilai tangguh, yaitu sikap pantang menyerah dalam mengerjakan tugas 		

Kegiatan 3 : Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat akun <i>google drive</i> 2. Membuat folder berdasarkan waktu kegiatan dan subdit 3. Mengunggah dokumen ke dalam <i>google drive</i> ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akun <i>google drive</i> telah dibuat 2. Telah terbuatnya folder di dalam <i>google drive</i> 3. Terunggahnya dokumen ke dalam <i>google drive</i> <i>Evidence: bukti screenshot</i> ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: menata dokumen dengan konsisten 2. Nasionalisme: melakukan penataan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi 3. Etika Publik: menata dokumen dengan cermat 4. Komitmen mutu: berorientasi pada mutu dan kreatif dalam menata pengumpulan dokumen sesuai waktu dan subdit 5. Anti Korupsi: Melaksanakan tugas dengan disiplin ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan terkumpulnya dan terkelompokkannya dokumen akan mempercepat pekerjaan karena mempermudah pencarian dokumen pendukung SPIP yang dibutuhkan. ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat. 		

Kegiatan 4 : Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam *google drive* kepada seluruh pegawai ditdamduk

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan penggunaan <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk 2. Membagikan <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersampainya penjelasan penggunaan <i>google drive</i> 2. Terbagikannya <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> ke seluruh pegawai Didamduk <p><i>Evidence:</i> foto</p> ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan 2. Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu 3. Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan 4. Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil 5. Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas dan sosialisasi kepada seluruh pegawai ditdamduk dengan adil ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan sosialisasi dengan optimal dan mewujudkan nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama 		

Kegiatan 5 : Melakukan evaluasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat <i>form</i> evaluasi tentang penggunaan digitalisasi dokumen di dalam google drive 2. Membagikan <i>form</i> evaluasi kepada seluruh pegawai ditdamduk untuk diisi 3. Menganalisis dan menyusun laporan hasil <i>form</i> evaluasi ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form</i> evaluasi telah dibuat 2. Terbagikannya <i>form</i> evaluasi 3. Tersusunnya laporan <p><i>Evidence: form</i> evaluasi dan foto</p> ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: kejelasan target dan konsistensi 2. Nasionalisme: melakukan evaluasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi 3. Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam melakukan evaluasi 4. Komitmen mutu: Melakukan evaluasi demi mendapatkan hasil yang terbaik 5. Anti Korupsi: Menyusun laporan dengan jujur dan benar ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; <p>Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.</p> ✓ Penguatan Nilai Organisasi; <p>Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan evaluasi dengan optimal</p> 		

Form Pengendalian Aktualisasi oleh Coach

Nama : Devi Novitasari
 NIP : 199511122019022004
 Unit Kerja : Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
 Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
 Isu : Digitalisasi Dokumen Pendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Analisis Dampak Kependudukan melalui *Google Drive*
 Kegiatan 1 : Mempelajari panduan penggunaan *google drive*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari dan mempelajari tentang penggunaan <i>google drive</i> 2. Mencatat poin-poin penting tentang penggunaan <i>google drive</i> 3. Melakukan koordinasi dengan mentor ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpelajarinya tata cara penggunaan <i>google drive</i> 2. Tercatatnya poin-poin penting penggunaan <i>google drive</i> 3. Terlaksananya koordinasi dengan mentor ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: kejelasan target, konsisten. 2. Etika Publik: tanggap, cepat, akurat, mengedepankan etika sopan santun saat berkoordinasi dengan mentor 3. Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil 4. Anti Korupsi: peduli dan bertanggung jawab terhadap tugas sehingga mengantisipasi masalah administratif yang akan datang ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan mempelajari panduan mengunggah dokumen dalam <i>google drive</i>, maka dapat meningkatkan pemahaman penggunaan sehingga bisa mengerjakannya dengan baik. ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini berupaya untuk mewujudkan nilai 	<p>Tidak ada kendala</p>	<p>Jumat, 1 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i></p>

cerdas, dengan bertindak optimal secara efektif dan efisien		
---	--	--

Kegiatan 2 : Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen yang akan dikelompokan 2. Mengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit 3. <i>Scan</i> dokumen-dokumen ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah siapnya dokumen yang akan dikelompokan 2. Terkelompoknya dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit 3. Dokumen telah terscan <p><i>Evidence:</i> Foto</p> ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: menyediakan data/informasi yang akurat 2. Nasionalisme: mengelompokan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu 3. Komitmen Mutu: Menjaga kualitas kerja dalam mengelompokan dokumen sesuai dengan kriteria tertentu 4. Anti Korupsi: peduli terhadap tugas pengelompokan dokumen untuk memudahkan pencarian dokumen ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; <p>Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan teraturnya dokumen akan mempercepat pekerjaan karena dokumen pendukung SPIP sudah tersedia.</p> ✓ Penguatan Nilai Organisasi; <p>Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat. Kegiatan ini juga mewujudkan nilai tangguh, yaitu sikap pantang menyerah dalam mengerjakan tugas</p> 	<p>Ada beberapa dokumen yang kurang lengkap</p>	<p>Jumat, 8 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i></p>

Kegiatan 3 : Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive*

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat akun <i>google drive</i> 2. Membuat folder berdasarkan waktu kegiatan dan subdit 3. Mengunggah dokumen ke dalam <i>google drive</i> ✓ Output kegiatan terhadap pemecahan isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akun <i>google drive</i> telah dibuat 2. Telah terbuatnya folder di dalam <i>google drive</i> 3. Terunggahnya dokumen ke dalam <i>google drive</i> <p><i>Evidence: bukti screenshot</i></p> ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: menata dokumen dengan konsisten 2. Nasionalisme: melakukan penataan dokumen dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi 3. Etika Publik: menata dokumen dengan cermat 4. Komitmen mutu: berorientasi pada mutu dan kreatif dalam menata pengumpulan dokumen sesuai waktu dan subdit 5. Anti Korupsi: melaksanakan tugas dengan disiplin ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Dengan terkumpulnya dan terkelompokannya dokumen akan mempercepat pekerjaan karena mempermudah pencarian dokumen pendukung SPIP yang dibutuhkan. ✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni bekerja dengan teliti dan akurat. 	<p>Tidak ada kendala</p>	<p>Jumat, 15 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i></p>

Kegiatan 4 : Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam *google drive* kepada seluruh pegawai ditdamduk

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<p>✓ Tahapan Kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan penggunaan <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk 2. Membagikan <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> kepada seluruh pegawai ditdamduk <p>✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersampainya penjelasan penggunaan <i>google drive</i> 2. Terbagikannya <i>link</i> dokumen dalam <i>google drive</i> ke seluruh pegawai Didamduk <p><i>Evidence:</i> foto</p> <p>✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: Keterbukaan atas semua tindakan yang dilakukan 2. Nasionalisme: Memanfaatkan data/informasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan individu 3. Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam mensosialisasikan 4. Komitmen Mutu: efektifitas, efisiensi dengan berorientasi pada hasil 5. Anti Korupsi: Bertanggung jawab terhadap tugas <p>✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.</p> <p>✓ Penguatan Nilai Organisasi; Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan sosialisasi dengan optimal dan mewujudkan nilai kerjasama, yaitu perilaku membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama</p>	<p>Tidak ada kendala</p>	<p>Jumat, 22 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i></p>

Kegiatan 5 : Melakukan evaluasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahapan Kegiatan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat <i>form</i> evaluasi tentang penggunaan digitalisasi dokumen di dalam google drive 2. Membagikan <i>form</i> evaluasi kepada seluruh pegawai ditdamduk untuk diisi 3. Menganalisis dan menyusun laporan hasil <i>form</i> evaluasi ✓ Output kegiatan terhadap pemecaha isu; <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Form</i> evaluasi telah dibuat 2. Terbagikannya <i>form</i> evaluasi 3. Tersusunnya laporan <p><i>Evidence: form</i> evaluasi, foto</p> ✓ Keterkaitan Substansi Mata pelatihan; <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: kejelasan target dan konsistensi 2. Nasionalisme: melakukan evaluasi dengan semangat untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi 3. Melakukan pola kerja beretika dengan sikap hormat dan sopan dalam melakukan evaluasi 4. Komitmen mutu: Melakukan evaluasi demi mendapatkan hasil yang terbaik 5. Anti Korupsi: Menyusun laporan dengan jujur dan benar ✓ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi ; <p>Kegiatan ini memiliki kontribusi pada misi BKKBN yaitu membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.</p> ✓ Penguatan Nilai Organisasi; <p>Kegiatan ini merupakan perwujudan dari nilai kerja cerdas, yakni melakukan evaluasi dengan optimal</p> 	<p>Tidak ada kendala</p>	<p>Jumat, 29 November 2019. Dilakukan melalui chat pada Aplikasi <i>WhatsApp</i></p>

Formulir 11 : Rekapitulasi Nilai Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Pelatihan Dasar CPNS

REKAPITULASI NILAI PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS

Program : Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III

Nama Peserta : Devi Novitasari

NIP : 199511122019022004

Jabatan/Unit Kerja : Analis SDM Aparatur/Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

No	Standar Kompetensi	Jenis Penguatan Kompetensi	Tujuan Penguatan	Strategi/Metoda Penguatan	Mata Pelatihan	Jumlah JP/Hari	Tempat Pelaksanaan	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mampu melaksanakan peninjauan kebutuhan jabatan fungsional	1. Penugasan untuk mempelajari Permenpan 41 2. Penugasan untuk membuat matriks jabatan fungsional 3. Penugasan untuk mengikuti rapat 4. Penugasan untuk membuat	Untuk mengetahui jabatan fungsional yang dibutuhkan dan mekanisme pengusulan jabatan fungsional yang baru	Penugasan membuat matriks jabatan fungsional yang dibutuhkan dan penugasan pencatatan diskusi rapat	Tata cara membuat matriks dan notulensi	5 hari	BKKBN Pusat	

		notulen hasil rapat						
2.	Mampu melaksanakan ikhtisar jabatan	<p>1. Penugasan untuk mengikuti rapat kedeputian</p> <p>2. Penugasan untuk mempelajari ikhtisar jabatan</p> <p>3. Penugasan untuk membuat notulen hasil rapat</p>	Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk pengusulan jabatan fungsional baru.	Penugasan mempelajari/ mengamati kegiatan ikhtisar jabatan dan penugasan pencatatan diskusi rapat	Tata cara pengusulan jabatan fungsional	3 hari	BKKBN Pusat	
3.	Mampu melaksanakan rapat kerjasama BKKBN dengan WWF dan Republik Seychelles	<p>1. Penugasan mengikuti rapat kerjasama BKKBN dengan WWF dan Republik Seychelles</p> <p>2. Penugasan membuat rencana kegiatan</p> <p>3. Penugasan membuat notulensi hasil rapat</p>	Untuk mengetahui rencana kerjasama dan tersedianya notulensi hasil rapat	<p>1. Pembimbingan langsung dalam membuat rencana dan jadwal kegiatan</p> <p>2. Penugasan pencatatan diskusi rapat kerjasama BKKBN dengan WWF dan Republik Seychelles</p>	Tata cara membuat jadwal kegiatan dan notulensi	3 hari	BKKBN Pusat	
4.	Mampu melaksanakan monitoring & evaluasi model ruang terbuka	1. Penugasan mengikuti monitoring & evaluasi model ruang terbuka	Untuk mengetahui perkembangan model ruang terbuka hijau (RTH) privat dan	1. Penugasan mempelajari/ mengamati kegiatan monitoring & evaluasi model	Tata cara membuat notulensi	1 hari	Bogor	

	hijau (RTH) privat	hijau (RTH) privat 2. Penugasan membuat notulensi hasil diskusi monitoring dan evaluasi	tersedianya notulen hasil diskusi	ruang terbuka hijau (RTH) privat 2. Penugasan mengobservasi pelaksanaan monitoring & evaluasi model ruang terbuka hijau (RTH) privat lapangan 3. Penugasan pencatatan hasil diskusi monitoring dan evaluasi				
5.	Mampu melaksanakan <i>need assesment</i> model lingkungan sehat, keluarga sejahtera	Membantu menyiapkan <i>need assesment</i> model lingkungan sehat, keluarga sejahtera	Untuk mengetahui kondisi lingkungan wilayah yang akan dilakukan <i>need assesment</i>	1. Penugasan mempelajari/ mengamati kegiatan <i>need assesment</i> model lingkungan sehat, keluarga sejahtera 2. Penugasan mengobservasi pelaksanaan <i>need assesment</i> model lingkungan sehat, keluarga sejahtera 3. Penugasan pencatatan hasil diskusi kondisi wilayah yang akan dilakukan <i>need assesment</i>	Tata cara melaksanakan <i>need assesment</i>	3 hari	Yogyakarta	

6.	Mampu mengerjakan administrasi Rapat Di Luar Jam Kantor (RDK)	Penugasan untuk membuat daftar peserta RDK	Mampu memahami dan mengeksekusi kebutuhan administrasi RDK	Pembimbingan langsung dalam membuat daftar peserta RDK	Tata cara administrasi RDK	8 hari	BKKBN Pusat	
7.	Mampu mengerjakan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	<p>1. Penugasan untuk mempelajari SPJ Kegiatan</p> <p>2. Penugasan untuk mengumpulkan kelengkapan administrasi perjalanan dinas yang telah dilakukan, seperti <i>boardingpass</i>, <i>invoice</i> tiket pesawat maupun hotel.</p> <p>3. Penugasan untuk membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), rincian biaya perjalanan dinas, dan daftar</p>	<p>1. Memahami persyaratan pembuktian perjalanan dinas</p> <p>2. Mampu membuat SPJ</p> <p>3. Melaksanakan tertib administrasi keuangan</p>	Pembimbingan langsung dalam membuat SPJ	Tata cara membuat SPJ	3 hari	BKKBN Pusat	

		pengeluaran riil.						
8.	Mampu melaksanakan kegiatan diseminasi	<p>1. Penugasan untuk menyiapkan TOR, jadwal, dan persuratan</p> <p>2. Membantu konfirmasi kehadiran mitra kerja terkait</p> <p>3. Penugasan untuk mengikuti diseminasi</p> <p>4. Penugasan untuk membuat notulensi kegiatan diseminasi</p>	<p>1. Tersedianya surat yang dibutuhkan</p> <p>2. Terkonfirmasinya kehadiran</p> <p>3. Tersedianya notulen hasil diseminasi</p>	<p>1. Penugasan untuk membuat TOR, jadwal, dan surat</p> <p>2. Penugasan untuk mengonfirmasi kehadiran</p> <p>3. Penugasan untuk membuat notulen</p>	Tata cara membuat bahan kelengkapan diseminasi	5 hari	BKKBN Pusat	
9.	Mampu melaksanakan klasifikasi kampung KB	<p>1. Penugasan untuk mengikuti rapat klasifikasi kampung KB</p> <p>2. Penugasan untuk membuat notulensi hasil rapat</p>	Untuk mengetahui dan membuat usulan klasifikasi kampung KB	<p>1. Penugasan mempelajari klasifikasi kampung KB</p> <p>2. Penugasan membuat notulen hasil rapat</p>	Tata cara membuat matriks dan notulen	3 hari	BKKBN Pusat	
NILAI TOTAL (RATA-RATA)								
NILAI AKHIR (20%)								

Deskripsi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Pelatihan Dasar CPNS:

1. Mampu melaksanakan penajakan kebutuhan jabatan fungsional

Sesuai perintah presiden untuk penyederhanaan eselon menjadi dua level dan diganti dengan jabatan fungsional, maka dilaksanakanlah penajakan kebutuhan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang akan diusulkan harus berdasarkan Pemenpan No 41 tahun 2019. Setelah mempelajari dan memilih jabatan fungsional yang di butuhkan, dibuatlah matriks jabatan fungsional yang berisi nama jabatan, jenjang pendidikan dan tugasnya. Penajakan kebutuhan fungsional ini disiapkan dalam jangka waktu 4 hari lalu dirapatkan bersama BKN, Kemenpan dan IPADI dalam waktu 1 hari. Dari rapat tersebut didapatkan informasi tentang langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengusulan jabatan fungsional, usulan-usulan jabatan yang sesuai dengan kependudukan dan rencana tindak lanjut.

2. Mampu melaksanakan ikhtisar jabatan

Sebagai rencana tindak lanjut dari rapat sebelumnya tentang penajakan kebutuhan jabatan fungsional, dibuat ikhtisar jabatan yang lebih rinci. Jabatan fungsional tersebut diusulkan dengan mempertimbangkan jabatan yang sesuai dengan pegawai ditdamduk. Setelah dibuat ikhtisar jabatan, dilaksanakan rapat kedeputian bidang pengendalian penduduk. Rapat dilaksanakan dalam 1 hari dengan mengundang bapak Sudibydo dari IPADI sebagai pakar. Dari rapat tersebut didapatkan rencana tindak lanjut yaitu akan dibuat tim kecil untuk merancang kegiatan, awal bulan Desember akan dilakukan langkah konkritnya dan masing-masing komponen harus menyusun strategi terkait program dan anggarannya.

3. Mampu melaksanakan rapat kerjasama BKKBN dengan WWF dan Republik Seychelles

BKKBN akan bekerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia dan Republik Seychelles dalam pembuatan model lingkungan sehat keluarga sejahtera. Kerjasama dilakukan dengan melaksanakan *need assesment* terlebih dahulu di Kulon Progo, Yogyakarta. *Need assesment* dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah yang dituju agar dapat mengetahui kegiatan apa yang bisa dilakukan pada wilayah tersebut dalam mencapai lingkungan sehat keluarga sejahtera.

4. Mampu melaksanakan monitoring & evaluasi model ruang terbuka hijau (RTH) privat

Monitoring dan evaluasi model ruang terbuka hijau (RTH) privat dilaksanakan di Kampung KB Mawar, Rancabungur, Bogor. Tahun 2018 telah dilakukan permodelan ruang terbuka hijau di wilayah tersebut, oleh karena itu dilakukan monitoring evaluasi untuk mengetahui perkembangan model ruang terbuka hijau tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara berdiskusi dengan penduduk setempat tentang bagaimana perkembangan ruang terbuka hijaunya dan kendala apa yang dialami selama satu tahun ini. Acara diakhiri dengan penanaman bibit baru dengan harapan penduduk setempat masih tetap semangat menjaga lingkungan agar tetap hijau dan sehat dan dapat mengatasi kendal-kendala yang terjadi selama ini.

5. Mampu melaksanakan *need assesment* model lingkungan sehat keluarga sejahtera

Need assesment model lingkungan sehat, keluarga sejahtera dilaksanakan selama 3 hari di Yogyakarta. Hari pertama dilakukan *pra need assesment* untuk melihat kondisi wilayah 2 desa di Kulon Progo. Hari kedua dilakukan *forum group discussion* (FGD) di Desa Bugel dan Desa Glagah, Kulon Progo. Diskusi dilakukan untuk mendapatkan masukan dari warga setempat dan pemerintah terkait tentang wilayah tersebut agar kedepannya bisa mengetahui program apa yang cocok dalam melaksanakan permodelan lingkungan sehat keluarga sejahtera. Hari ketiga dilakukan *forum group discussion* dengan perwakilan BKKBN Provinsi DIY dan komponen terkait untuk mendiskusikan rekomendasi program dari hasil *need assesment* hari sebelumnya. Semua masukan, saran, dan rencana tindak lanjut tertuang dalam notulensi.

6. Mampu mengerjakan administrasi Rapat Di Luar Jam Kantor (RDK)

RDK dilaksanakan saat di luar jam kantor yaitu lewat pukul 16.30 WIB. Sebelum RDK harus mempersiapkan kelengkapan administrasi seperti daftar hadir peserta, surat undangan, bahan materi, dan lainnya. Hal ini perlu dilakukan dengan baik dan dikumpulkan dengan lengkap untuk dibuatkan surat pertanggung jawabannya.

7. Mampu mengerjakan administrasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

Surat pertanggung jawaban atau SPJ merupakan salah satu bentuk laporan penggunaan anggaran atau keuangan yang telah dikeluarkan. Seluruh pegawai yang melaksanakan kegiatan dengan memakai anggaran komponen atau unit kerja harus membuat surat pertanggung jawaban. Salah satu yang harus

dilakukan dalam mengerjakan administrasi surat pertanggung jawaban adalah membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD), rincian biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil. Selain itu, diperlukan juga mengumpulkan kelengkapan administrasi yang telah dilakukan seperti *boarding pass, invoice* tiket pesawat maupun hotel. Hal ini dilakukan agar seluruh pegawai melaksanakan tertib administrasi keuangan.

8. Mampu melaksanakan kegiatan diseminasi

Direktorat Analisis Dampak Kependudukan melakukan kegiatan diseminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan. Diseminasi dilakukan untuk menyebarluaskan atau menginformasikan hasil kajian kepada publik atau mitra terkait. Diseminasi dilaksanakan dalam 1 hari namun butuh persiapan yang panjang. Sebelum dilakukan diseminasi perlu membuat kerangka acuan kegiatan, jadwal, daftar undangan, daftar hadir, seminar kit, dan membuat surat undangan untuk komponen atau mitra terkait. Satu atau dua hari sebelum dilakukan diseminasi perlu mengkonfirmasi kehadiran peserta maupun narasumber. Pada saat pelaksanaan dipaparkan 4 materi tentang bonus demografi, sistem peringatan dini, klasifikasi kampung KB dan sistem pelaporan rumah data kependudukan. Setelah pemaparan materi yang dibagi menjadi dua panel dilakukan diskusi dengan peserta yang hadir. Semua hal yang dipaparkan maupun yang didiskusikan tercatat dalam notulen.

9. Mampu melaksanakan klasifikasi kampung KB

Klasifikasi kampung KB dilakukan untuk memetakan permasalahan, kebutuhan dan solusi permasalahan dalam pengelolaan Kampung KB dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Kampung KB yang berkualitas dan komprehensif. Di dalam rapat tersebut dilakukan penyepakatan indikator yang digunakan sebagai dasar penyusunan klasifikasi kampung KB. Klasifikasi kampung KB dilakukan oleh Direktorat Analisis Dampak Kependudukan dengan dibantu oleh Yayasan Cipta. Hasil dalam rapat ini disepakati klasifikasi kampung KB dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan dan pembobotan yang dilakukan bernilai 1-4 dari yang tidak penting hingga sangat penting yang terangkum semua di dalam notulensi hasil rapat.

**NOTULEN PENJAJAKAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI
BIDANG KEPENDUDUKAN**

Hari/Tanggal : Jum'at, 8 November 2019

Tempat : Ruang Operasional

Pimpinan : Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M. Sc, Dip. Com

No	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Ibu Hitima Wardhani	<p>Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita dapat berkumpul dalam acara penjajakan kebutuhan jabatan fungsional di bidang kependudukan pada hari ini, Jum'at, 8 November 2019 di ruang operasional. Pada kesempatan ini kami berterimakasih kepada ibu deputi, narasumber, dan tamu undangan yang hadir.</p> <p>Selaku ketua penyelenggara, mohon ijin untuk melaporkan:</p> <p>Pertemuan ini dilatar belakangi oleh adanya arahan bapak presiden Jokowi untuk melakukan reformasi birokrasi dengan penyederhanaan eselon dan lebih menghargai skill. Untuk merespon cepat hal tersebut, maka diadakanlah diskusi ini dengan tujuan mengidentifikasi jabatan fungsional. Sasarannya adalah seluruh pegawai di kedepatian dalduk.</p> <p>Pertemuan ini dilaksanakan dengan format diskusi panel. Diawali dengan arahan ibu deputi dalduk, lalu dilanjutkan dengan paparan narasumber.</p> <p>Terimakasih kepada ibu deputi atas bimbingan dan arahan. Terimakasih juga kepada panitia yang telah berusaha untuk keberlangsungan acara ini.</p> <p>Kami mohon ibu deputi untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini.</p>
2	Ibu Dwi Listyawardani	<ul style="list-style-type: none">• Bapak ibu yang kami hormati, kita sudah mendengar arahan bapak presiden untuk

		<p>pembatasan jabatan. Jabatan administrator dan pengawas akan diarahkan ke jabatan fungsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BKKBN sudah berupaya untuk merestrukturisasi dengan mengurangi beberapa jabatan eselon 2 di pusat. Dengan adanya pengurangan ini maka jabatan dibawahnya akan berkurang dengan sendirinya. • Di BKKBN eselon 1 ada 7 orang, Eselon 2 sebanyak 41 orang, Eselon 3 sebanyak 234 orang, Eselon 4 ada, 736 orang dan jumlah pegawai BKKBN sebanyak 16.943 orang. • Jumlah pegawai di BKKBN cukup banyak karena penerimaan tahun 2019 ini formasi PKB dialihkan dari ASN kabupaten/kota dialihkan ke pusat. • Kedepannya akan dilakukan efisiensi jabatan struktura dari yang tadinya ada 4 direktorat menjadi 3 direktorat, yang sebelumnya ada 3 administrator menjadi 2 administrator. • Sesuai Perpres 62 tentang BKKBN sudah mengatur pos-pos beberapa jabatan struktural yang diperbolehkan ada di BKKBN • Tugas dan fungsi BKKBN akan ada penyesuaian • Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk & Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk akan digabung menjadi 1 direktorat • Kami telah mencoba menganalisis jabatan fungsional apa saja yang dibutuhkan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatannya • BKKBN mengemban 3 tugas pokok yaitu : keluarga berencana (KB), pembangunan keluarga(PK), dan kependudukan. Di bagian KB sudah ada jabatan fungsional
--	--	---

		<p>PKB, sedangkan di bagian PK & Kependudukan belum ada jabatan fungsionalnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oleh karena itu sesuai arahan presiden kita harus mulai melakukan penjajakan jabatan fungsional untuk seluruh staf BKKBN. • Latar belakang pendidikan staf BKKBN cukup banyak yang berkaitan dengan demografi dan kependudukan yang kami harap dapat mendukung program BKKBN. • Saya sudah berdiskusi dengan pak sestama, bahwa kami masih membutuhkan widyaiswara, arsiparis, dan pranata komputer • Kita perlu melakukan berbagai langkah, yaitu menelusuri peraturannya terlebih dahulu lalu melakukan assesment • Pengalihan status PKB dari ASN kab/kota menjadi ASN pusat menjadi persoalan sendiri untuk kami karena jauhnya rentang kendali PKB yang ada di desa dengan yang ada di provinsi. Mekanisme kerjanya sedang dikaji terus oleh BKKBN. • Kami sangat mengharapkan masukan dari narasumber. Jika perlu akan dilakukan pertemuan teknis. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum wr.wb
3	Ibu Hitima Wardhani	<p>Terimakasih ibu deputi atas arahannya. Mudah-mudahan kita dapat memaksimalkan waktu yang ada dan dapat mencapai tujuan pertemuan hari ini.</p> <p>Selanjutnya, mohon izin kepada bapak Aba untuk menyampaikan paparan.</p>
4	Bapak Aba	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak menteri sudah menjelaskan jika sebelumnya terdapat 4 layer jabatan diubah menjadi 2 layer. • Kita sedang mempersiapkan surat untuk K/L segera melakukan langkah-langkah

		<p>pemetaan dan mengidentifikasi jabatan fungsional apa yang bisa di duduki & jabatan fungsional baru apa yang dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di dalam suratnya nanti akan di informasikan jika lembaga punya usulan jabatan yang dibutuhkan silahkan disampaikan dengan disertai alasan yang jelas dan tepat. Jabatan mana yang dibutuhkan akan ditransformasi. • Di Kemenpan tanggal 27 November sudah tidak ada eselon 3 dan 4 • Untuk masalah penyetaraan penghasilan, harus ada dasar hukumnya dan harus dibicarakan kepada Kemenkeu. Termasuk penyetaraan penghasilan eselon 3 dan 4. • Akan ada program sekolah kader untuk ASN yang ingin lompat karir. Jadi, nanti dari CPNS lalu diangkat menjadi PNS dan mengikuti sekolah kader, setelah itu bisa langsung menjadi eselon 3. • Kemenpan juga sedang menyusun pola karir dan sedang harmonisasi di Kemenkumham. • Akan ada beberapa kriteria untuk jabatan yang bisa di alihkan. • Kita harus melakukan pemetaan dengan baik. Karena jabatan fungsional pekerjaannya sesuai dengan uraian kegiatan untuk mengejar angka kredit, jangan sampai nanti staf tidak mau bekerja tambahan lainnya karena pekerjaann yang dilakukan tidak sesuai dengan uraian kegiatannya. • Boleh menambah mengerjakan tugas lain di luar uraian kegiatan untuk mengembangkan kompetensi. • Ibu deputi harus mencermati jabatan mana saja yang layak dan tidak layak
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Pak menteri minta jabatan fungsional ini bisa diproses dengan cepat. Kalau bisa dalam jangka waktu 6 bulan atau paling lama 1 tahun. • Jabatan fungsional ini ada karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mandatory perundang-undangan. 2. Turunan tugas fungsi organisasi karena pekerjaan sangat spesifik 3. Dibutuhkan kompetensi tertentu dalam pelaksanaan • Oleh karena itu perlu kita identifikasi, apa nama jabatan yang cocok, dan identitasnya harus kita munculkan. Lalu Identifikasi apakah jabatan ini perlu kompetensi tertentu atau tidak. Harus bisa dijenjangkan karena jenjang untuk menunjukkan seberapa sulit jabatan tersebut. • Standar kompetensi untuk masing-masing jabatan berbeda. • Usulan jabatan yang sudah ditampilkan dalam slide tadi, harus diperhatikan lagi apakah selama ini ada yang melakukan pekerjaan tersebut? Jika selama ini ada tugasnya da nada yang mengerjakan tapi namanya tidak ada atau tidak jelas, tidak apa-apa. Artinya selama ini pekerjaan tersebut dilakukan dan dibutuhkan tetapi namanya belum di lembagakan. Jangan sampai usulan tersebut hanya dibuat-buat, selama ini tidak ada yang melakukannya dan tidak dibutuhkan, hanya fiktif saja. • Beban kerja jabatan ini harus jelas. Nantinya akan diuji coba dahulu beban kerjanya karena jabatan fungsional memakai angka kredit. • Jangan takut atau cemas dengan angka kredit. Jika selama ini bekerja dengan benar dan tidak ngarang atau dibuat-buat, maka tidak akan trauma dengan angka kredit. • Konsep harus dipertegas (nama jabatan,
--	--	--

		<p>urgensinya, tugasnya apa). Tidak hanya ada <i>output</i> tetapi juga harus ada <i>outcomenya</i>. Dilihat juga aspek kesejahteraan. Latar belakang adanya jabatan fungsional dan konsep jabatan fungsional yang ditawarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika konsep sudah jelas, maka kepala BKKBN akan menyampaikan ke Menpan RB dengan naskah akademik. Setelah itu nanti bapak/ibu akan diundang Menpan RB tentang usulannya. • Kami akan berdiskusi apakah usulan bapak/ibu akan direkomendasikan atau akan ditolak. • Jika sudah direkomendasikan, akan di uji coba lalu dibuat permenpannya dan diharmonisasikan. Setelah semua telah dilaksanakan baru bisa sah. • Penting untuk mengatur <i>time schedule</i>. Jika nantinya ada perbaikan, tolong diselesaikan dengan cepat. • Kita ingin semua prosesnya cepat dan usulannya jelas. • Semua usulan harus diepakati dulu di lingkungan BKKBN (sudah 1 suara) sebelum diusulkan ke Menpan. • PKB harus punya HKM (Hasil Kerja Minimal)
5	Bapak Aidu	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan paparan presiden sebenarnya sudah ada dari tahun 2012 untuk rasionalisasi. Dulu kita punya 2 konsep: dihapus dari jabatan atas (ppk atau eselon 1) atau dari bawah (eselon 3 & 4) • BKKBN cenderung menghapus 2 level dari bawah. • Menurut saya akan undo (balik lagi). Jika ada undo, maka akan ada atop. • BKKBN sudah tertiban masalah pengalihan PKB dari ASN kabupaten/kota menjadi

		<p>ASN pusat, dan sekarang tertiban lagi masalah perampingan jabatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BKKBN patut untuk mengusulkan jabatan fungsional yang terkini bukan yang terakhir dengan merujuk pada 1 kata yaitu analisis kependudukan. • Kelemahan penyuluh adalah tidak terbiasa menulis (ambil analisis kependudukan), tidak terbiasa berdiskusi dan kurang tertib administrasi. • Saya cenderung mengusulkan 2 jabatan, yaitu : analisis kependudukan & pengelola kependudukan. • Segala yang bersifat teknis mutlak punya analisis kependudukan, tidak ada sangkut pautnya ke PKB. • Untuk jenjang pendidikan, mau D3 atau S1, silahkan saja didiskusikan. • Tolong untuk konsisten dan ditindak lanjuti segera. Jangan sampai ada rencana tapi setelah sekian lama baru ditindak lanjuti lagi. • Operasional untuk memilah memilih, olah, alih tidak tersentuh PKB. Pilah pilih dilakukan oleh analis. Olah alih dilakukan oleh pengelola. • BKKBN harus sudah punya konsep dahulu. • Dengan waktu yang relatif singkat, contoh saja dari permenpan 13 agar tidak terlalu berat. • Lihat tugas dan fungsinya. Nanti kami kirimkan profilnya, selanjutnya silahkan didiskusikan • Analisis kependudukan bisa jadi <i>pilot projectnya</i> BKKBN
6	Bapak Nugroho	<ul style="list-style-type: none"> • Atop (administratif, teknis, operasional) • Aktivitas struktural bisa dialihkan ke fungsional. <p>Lihat apakah sudah ada aktivitas tersebut.</p>

		<p>Kalau belum punya, lihat di kementerian/lembaga lain. Kalo ada di K/L lain, bisa diambil dari sana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompokan terlebih dahulu analis & pengelola. Dengan pengelompokan bisa dianalisis pekerjaannya, agar lebih mudah. • Pemetaan Jabatan fungsional dilakukan menggunakan lembar pemetaan. • Pemetaan dilakukan berdasarkan aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat kompleksitas pekerjaan b. Tingkat stabilitas pekerjaan c. Keragaman lingkup pekerjaan d. Kebutuhan tingkat analisis e. Standar dalam pelaksanaan pekerjaan • Setiap aktivitas di mapping, dan pada tiap-tiap tabel bapak/ibu hanya boleh mengisi salah satu. Contoh: Jika sudah diisi di kompleksitas rendah, tidak boleh mengisi lagi di bagian kompleksitas tinggi. • Akan dilakukan 2 kali pemetaan untuk 1 jabatan fungsional. Pemetaan pertama berdasarkan tingkat kompleksitas dan stabilitas pekerjaan. Pemetaan ke dua adalah keragaman lingkup pekerjaan & kebutuhan tingkat analisis. • Nanti dibuat excelnya, diisi masing-masing kolom, selanjutnya konsultasikan internal ke bapak Aba dan bapak Aidu. • Jika tabel kanan bisa diisi (mapping) maka jabatan struktural bisa dialihkan ke fungsional. Lalu dilihat apakah masuk ke analis atau pengelola atau malah membuat jabatan fungsional yang baru. • Job enlargement : Melakukan pekerjaan yang sama tetapi <i>quantity</i>nya meningkat. Misal : mengurus tentang kepegawaian terus menerus tetapi jumlah pegawainya bertambah. • Job enrichment : memberikan tugas dan tanggung jawab lebih besar pada karyawan
--	--	--

		<p>dan menambah pekerjaan dalam hal kualitas, atau kompleksitasnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika keberagaman lingkup pekerjaan rendah, tingkat analisis rendah maka kepatuhan proses dan kualitas hasil kerja semakin terstandar (Seperti sudah punya ISO atau lainnya)
7	Bapak Sudibyo	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan presiden mungkin cukup mengagetkan teman-teman struktural. Jabatan fungsional didasarkan oleh keahlian & keterampilan • Jabatan ditentukan oleh kepala kantor yang membutuhkan sedangkan keahlian ditentukan oleh masyarakat atau organisasi profesi yang ditunjuk oleh kantor yang bersangkutan. • Coba dibuat rumpun yang baru untuk kependudukan berdasarkan ilmu pengetahuan yang mendukung kependudukan. • Kalau menurut saya , jenjang pendidikan staffnya dimulai dari S1 saja agar berbeda dengan yang lainnya. • Harus memperkirakan juga apakah masih ada di daerah yang mempunyai keahlian tertentu tapi jenjang pendidikannya tidak S1. • Mungkin yang selain S1 bisa dialihkan ke jabatan yang lain. • Pemetaan penting untuk melihat kompleksitas usulan jabatan fungsional. • Jabatan fungsional bisa berpindah dari satu jabatan ke jabatan lainnya asal 1 rumpun. Jika beda rumpun harus mengikuti tesnya lagi. • Uraian jabatan struktural tidak mengikat, jika di alihkan ke jabatan fungsional uraian jabatannya mengikat. • Kependudukan sifatnya tidak stabil,

		<p>kompleksitasnya tinggi, elemen pekerjaannya sistemik karena terkait satu dengan lainnya, bersifat dinamis dan berubah-ubah sehingga terdapat skenario – skenario (bagaimana jika terjadi begini dan begitu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada bagian mapping, pengelola letaknya di bawah, analisis di atas. • Tinggal uraikan lebih detail. • Akan ada jabatan yang <i>in beetwen</i>, maka putuskan mana yang lebih dibutuhkan dan mana yang mau dipilih. • Saran saya untuk membentuk tim karena pemikiran orang banyak lebih baik daripada sendiri.
8	Ibu Dwi Listyawardani	<p>Dengan kehadiran bapak/ibu memberikan pencerahan apa yang harus segera kita lakukan. Kita juga harus mengakomodir kemungkinan yang ada. Menampung teman2-teman yang sudah di jabatan fungsional maupun yang akan dialihkan ke jabatan fungsional.</p> <p>Kita harus segera mengambil langkah. Kedepan dalduk harus menyelesaikannya di tahun 2019 ini. Pos-pos dana yang ada kita fokuskan kesini.</p> <p>Kami sdh menunjukkan itikad, yang artinya BKKBN benar-benar serius dalam hal ini. Kami akan membentuk tim dan bekerja sama dengan pak Diby juga. Kami juga akan minta saran dari para narasumber lainnya.</p> <p>Semoga kita semua diberi kemudahan dan yakin kita bisa menyelesaikan ini.</p>

Kesimpulan :

1. Perampingan jabatan dilakukan dari level bawah yaitu eselon 3 dan 4.
2. Terdapat dua usulan jabatan, yaitu analis dan pengelola
3. Penentuan jabatan struktural menggunakan cara mapping

Rencana Tindak lanjut :

1. Membentuk tim baru untuk berdiskusi tetnag kebutuhan jabatan fungsional
2. Pemetaan kebutuhan jabatan fungsional menggunakan lembar pemetaan
3. Dibutuhkan saran dan pertemuan lebih lanjut

DOKUMENTASI



**NOTULEN RAPAT KEDEPUTIAN
PENJAJAKAN JABATAN FUNGSIONAL**

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2019

Tempat : Ruang Operasional

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan hari ini bertujuan untuk menindak lanjuti pertemuan lalu dengan mengundang pakar dari Kemenpan RB dan BKN untuk bisa secara bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah yang perlu kita lakukan selanjutnya. • Latar belakang pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan diskusi tentang jabatan fungsional di lingkungan dalduk. • Dari pertemuan yang lalu telah disepakati bahwa BKKBN akan melakukan pemetaan dan mengidentifikasi jabatan fungsional apa yang bisa diduduki dan perlukah membuat jabatan fungsional yang baru. • Tujuan pertemuan hari ini adalah membuat <i>time table</i> yang jelas untuk mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan, membuat tim kecil, pemetaan kebutuhan dan identifikasi jenis jabatan fungsional. • Catatan pertemuan yang lalu adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan dari Kemenpan dari yang sebelumnya 4 <i>layer</i> menjadi 2 <i>layer</i> 2. Kemenpan sedang mempersiapkan surat untuk K/L agar segera melakukan pemetaan. 3. Jika BKKBN mempunyai usulan jabatan yang dibutuhkan, silahkan infokan ke Kemenpan dengan alasan yang jelas dan tepat. 4. Ada beberapa kriteria untuk jabatan yang bisa dialihkan, maka perlu dipetakan dengan baik 5. Jangan sampai ada yang tidak bekerja karena tidak sesuai dengan uraian

		<p>kerjanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jabatan fungsional membutuhkan kompetensi tertentu dalam pelaksanaan 7. Jabatan fungsional harus bisa dijenjangkan 8. Standar kompetensi untuk masing-masing jabatan akan berbeda 9. Konsep harus dipertegas (nama, <i>urgency</i>, tugas) 10. Jabatan fungsional harus disepakati dahulu di lingkungan BKKBN baru diusulkan ke Kemenpan (harus satu suara) 11. Diberikan waktu sampai bulan Juni 2020 12. Telah diusulkan dua jabatan : Analisis kependudukan dan pengelola kependudukan 13. Pemetaan Jabatan fungsional dilakukan menggunakan lembar pemetaan <ul style="list-style-type: none"> • Teman teman semua juga sudah membuat usulan ke bipeg tentang jabatan fungsional yang dibutuhkan masing-masing komponen. Semoga usulan tersebut bisa kita diskusikan bersama nantinya dan akan mendapatkan arahan dari Bapak Sudibyو sebagai pakar.
2	Pak Sudibyو	<ul style="list-style-type: none"> • Dari Kemenpan harus sudah menyampaikan pemetaan pada akhir Desember tetapi pengalihannya baru dimulai bulan Juni 2020. Tolong diantisipasi oleh teman-teman semua. • Saya sudah melihat ada banyak usulan dari teman-teman semua, mungkin nanti bisa digunakan. • Yang perlu dipikirkan nanti adalah apakah kita membuat jabatan fungsional khusus dalduk atau dengan KB juga. Saya berharap kependudukan bisa berdiri sendiri supaya ada ciri khusus di BKKBN dan menjadi salah satu <i>vocal point</i> BKKBN • Untuk <i>refresh</i> kembali, jabatan fungsional akan didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

		<ul style="list-style-type: none"> • Rumpun jabatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep, dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan. • Menristekdikti sudah menempatkan kependudukan dibawah ilmu sosial dan sudah dikelompokan kependudukan dengan catatan sipil dan Mendagri sebagai pembinanya. Padahal saya berharap kependudukan bisa berdiri sendiri dan dikelola sendiri oleh BKKBN. • Saya berharap deputi bisa dibagi menjadi dua, keluarga berencana dengan kesehatan reproduksi dan kependudukan. • Jabatan fungsional terampil terdiri dari pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia • Jabatan fungsional ahli terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama. • Keterampilan lebih kearah pelaksana sedangkan administrasi dan sebagainya bisa masuk ke arsiparis, pustakawan, pranata computer, dll. Tinggal dilihat uraian jabatannya. • Cara berfikirnya harus komprehensif untuk seluruh BKKBN supaya kita semua tahu bisa pindah jabatan fungsional yang mana • Berdasarkan lingkungan kerja dan kompleksitas, kependudukan ini sangat kompleks karena banyak elemen berbeda yang sering berubah dan tidak terduga. Ada ketidakpastian yang cukup tinggi yang menjadikan tidak stabil. Tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tetapi juga disebabkan oleh banyak faktor. • Contoh dari lingkungannya berubah seperti di Bali, Gubernur Bali menolak program 2 anak cukup, beliau menginginkan 4 anak. Dengan bergantinya gubernur berganti pula kebijakannya. Hal ini yang menyebabkan menjadi tidak terduga dan perubahannya tidak dapat diprediksi. • Jabatan fungsional melibatkan beberapa elemen dengan pola keterkaitan yang
--	--	---

		<p>bersifat sistemik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan jabatan fungsional bersifat dinamis dan berubah. • Perlu penyiapan alternatif untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi. • Kepentingan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk merupakan kepentingan jangka menengah dan jangka panjang. Kependudukan tidak mungkin di proyeksikan dalam 1 atau 2 tahun. • Oleh karena itu saya usulkan kependudukan harus dipisahkan dengan urusan KB, karena KB bisa diprediksi dalam jangka waktu bulanan atau 1 tahun sedangkan kependudukan tidak bisa. • Yang membuat saya ragu-ragu dan bingung adalah nomer 1 dan 2 pada tabel stabilitas pekerjaan tidak bisa dikombinasikan padahal pengendalian penduduk berubah dengan cepat. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan menggunakan mesin dan peralatan yang sama, dan tidak terlalu sensitif terhadap adaptasi kemajuan teknologi. Pengendalian penduduk berubah secara dinamis tetapi alatnya masih bisa dipakai. • Usulan jabatan fungsional nantinya akan dituangkan dalam tulisan. Oleh karena itu, harus diuraikan agar orang-orang mengerti dan di dalam naskah akademik orang bisa membaca dan bisa memilih jabatan fungsional mana yang cocok dengan orang tersebut. • Jabatan fungsional membutuhkan analisis dan pengetahuan dengan tingkat pemikiran yang spesifik. Walaupun dengan analisis tinggi tetapi tetap membutuhkan pedoman/panduan. • Permasalahan PNS adalah kurang memperhitungkan manajemen resiko. Jika struktural merasa nyaman dengan kerjanya, saat diganggu/dirubah sedikit maka akan kacau • Pada <i>talent mapping</i> jabatan fungsional akan terlihat hubungan antara <i>performance</i> dan kompetensinya.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penduduk pendekatannya selalu berbeda karena provinsi/kabupaten selalu berbeda <i>treatmentnya</i>. • Pada jabatan fungsional keahlian bidang pengendalian penduduk terdapat analisis, perancangan, assesmen/penilaian dan pembimbingan • Pada jabatan fungsional keterampilan terdapat teknis manajerial, administrasi,interaksi/komunikasi, dan analitis • Keputusan apakah jabatan fungsional yang diambil adalah keahlian saja atau diambil keterampilan juga adalah keputusan pimpinan. • Rancangan teknokratik kependudukan kita dibawah Kemendagri. • Saya menginginkan BKKBN mempunyai ahli supaya BKKBN ada ciri khasnya sebagai pembina kependudukan. Jangan hanya di Kemendagri saja. BKKBN harus tetap <i>exist</i>. • Usulan saya adalah jabatan fungsional Analisis Pengelolaan Pengendalian Penduduk. Bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan pengendalian penduduk pada satuan kerja K/L sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. <ul style="list-style-type: none"> - Rumpun ilmu sosial : studi kependudukan dan pencatatan sipil - Standar kompetensi : pengetahuan, keahlian, dan perilaku kerja tertentu - Meliputi pengembangan model kependudukan, perancangan kependudukan, pembimbingan kependudukan dan analisis dampak dalduk. - Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan pengendalian penduduk pada instansi pusat dan vertikal (perwakilan) - Membutuhkan sertifikat kompetensi dan karya tulis jabatan fungsional yang diberikan oleh K/L yang berwenang. - Jenjang jabatan : analisis pengelolaan
--	--	--

		<p>pengendalian penduduk ahli pertama, ahli muda dan ahli madya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika pada suatu unit kerja tidak terdapat analis pengelolaan pengendalian penduduk untuk melaksanakan kegiatan yang semestinya, maka analis pengelolaan pengendalian penduduk yang berada satu tingkat diatas atau dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan akan mendapatkan angka kredit. • Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap analis pengelolaan pengendalian penduduk wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK)
	Ibu Hitima	<p>Arahan dari bapak Sudibyo sudah sangat detail.</p> <p>Dalam melakukan pemetaan harus secara komprehensif (seluruh BKKBN) sehingga BKKBN mempunyai ciri khusus. Untuk sesi selanjutnya adalah diskusi. Berdasarkan arahan tadi, jika ada pemikiran lain bisa disampaikan dalam rapat ini. Untuk kesempatan pertama, kepada biro kepegawaian dipersilahkan.</p>
	Pak Ngadimo	<p>Jabatan fungsional harus dilihat secara <i>holistic</i>. Banyak usulan jabatan fungsional yang sama dengan kementerian atau lembaga lain, jangan sampai BKKBN kalah duluan dengan K/L lain dalam mengusulkan jabatan fungsionalnya.</p>
	Pak Mustakim	<ul style="list-style-type: none"> • Saya <i>sharing</i> pengalaman saja, dulu saya pernah menjadi PKB karena kata orang-orang mudah untuk naik golongan karena memakai angka kredit. Saat menjadi PKB saya mengusulkan angka kredit sampai 20 tetapi tidak dipercaya oleh tim penilai dan hanya dianggap 5. Teman-teman lain juga mengusulkan banyak angka kredit tetapi yang dipercaya hanya sedikit. • Permasalahan disini adalah BKKBN membutuhkan banyak fungsional tapi

		<p>apakah pegawai BKKBN mau atau tidak melaksanakannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usul saya analis dibuat sedikit saja untuk di kantor misal analis kependudukan 5 orang, analis KB 5 orang, sisanya dijadikan penyuluh karena PKB sangat dibutuhkan tetapi tunjangannya dinaikkan. • Kalau memang harus dijadikan jabatan fungsional semoga bisa tercapai tujuannya dengan baik. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena kebingungan sehingga tidak tercapai tujuannya. • Jika semua dijadikan jabatan fungsional, disiapkan dahulu penilainya. Jangan sampai sudah ada jabatan fungsional tetapi tidak ada penilainya atau penilainya tidak mengerti.
	Pak Adit	<ul style="list-style-type: none"> • Kenapa angka kredit susah diterima? Karena pekerjaan PKB tidak bisa dilaksanakan di desa. Jangan sampai mau naik golongan tetapi pekerjaannya sulit • Kalau kependudukan bekerja seperti yang dijelaskan tadi, apakah akan bentrok dengan yang sudah ada seperti analisis kebijakan. • Kita harus lihat lagi uraian jabatan ahli pertama dan ahli utamanya. • Untuk terampil mungkin tidak dipakai di kependudukan, mungkin bisa dialihkan ke bagian sestama. • Eselon 3,4,5 tetap ada untuk menilai DUPAK di kedeputian dalduk
	Pak Kukuh	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut saya yang harus menjadi perhatian utama disini adalah bagaimana kita mencoba menyusun pemetaan jabatan fungsional di kependudukan. • Teman-teman telah menyusun tusi di masing-masing direktorat. Uraian kegiatan harus disusun secara lebih rinci. Dari situ akan muncul apakah kita membutuhkan analis kependudukan atau perencanaan kependudukan atau lainnya. • Bagaimana cara kita menguraikan kegiatan jabatan fungsional, dari apa yang kita uraikan akan diklasifikasikan. Dari situ

		<p>baru munculah kebutuhan jabatan fungsionalnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masalah stabil dan tidak stabil yang tadi disampaikan mungkin bisa dikerjakan setelah kita menguraikan jabatan fungsional agar memudahkan pak Sudibyo juga.
	Ibu Hitima	<p>Untuk masalah kenapa harus ada analisis kependudukan karena pak Aidu kemarin bilang bahwa PKB tidak terbiasa menulis sehingga itu bisa menjadi tugas kita.</p>
	Pak Dibyo	<ul style="list-style-type: none"> • Pak Ngadimo mengingatkan kita bahwa membuat jabatan fungsional harus melihat secara <i>holistic</i>. • Secara umum, kita harus mempunyai jabatan fungsional yang ada di bawah kendali kita agar kantor kita tetap <i>exist</i> dan kantor kita menjadi penting. • Kalau bisa ada juga analisis keluarga karena sudah disebutkan bahwa kita mengurus pembangunan keluarga. • Kita menghindari jabatan yang sama dengan K/L lain tapi pasti tetap ada yang bersinggungan. • Harus ada struktural yang membantu di setiap bawah eselon 2. Seperti di kanwil paling tidak ada 2 struktural dibawahnya yaitu sekretaris dan bagian program, kalau tidak ada akan sangat repot sekali. • Kalau sama sekali tidak ada jabatan fungsional di kantor, kita akan ketergantungan dengan K/L lain. • Masalah penilaian angka kredit jabatan fungsional tidak dipercaya karena yang menilai adalah struktural. Struktural saja naik 4 tahun sekali sedangkan fungsional bisa dalam waktu 2 tahun. Seharusnya yang menilai juga dinilai atau yang menilai mempunyai jabatan yang paling tinggi/jabatan yang sudah tidak bisa naik lagi. • Tanggapan untuk pernyataan pak Adit, memang kalau baru pasti ragu-ragu tapi harus tetap kita lalui dengan harapan tujuan kita tercapai dan sukses.

		<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan untuk pak Kukuh, kita pasti sudah tahu pekerjaan dan tusi kita, jadi kita pasti sudah tahu kekompleksitasan pekerjaan kita. Jadi nanti uraian jabatannya bisa mengikuti setelahnya. • Yang telah saya presentasikan tadi hanya rancangan saja. Nanti teman-teman yang memperdalamnya. • Silahkan diputuskan oleh teman-teman semua apakah teman-teman mau menguraikannya secara rinci atau besarnya saja (secara global) tapi dikasih lampiran apa yang harus dikerjakan. • Struktural tetap ada untuk membantu eselon 2. Jangan sampai kosong semua.
	Bu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Yang perlu dipikirkan adalah pembobotan untuk dupaknya. • Perlu dipikirkan pola karirnya seperti apa? Misal PKB harus menulis tetapi keberadaannya masih di desa. • Peningkatan pola karir juga harus dipikirkan, pelatihan-pelatihan apa saja yang harus dilakukan • Rumusan di uraian kerjaan tidak rinci, teman-teman bisa memberi masukan apa yang sudah dilakukan di masing-masing direktoratnya.
	Pak dibyo	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan harus segera dilaksanakan karena bulan Desember harus sudah diusulkan ke Menpan • Rinci dan global yang disampaikan tadi untuk penyiapan surat keputusannya supaya dapat angka kreditnya lebih mudah. • Pembimbingan bisa terkait dengan pendidikan, penyuluh, dan lain-lain. • Jangan membayangkan akan menetap di satu tempat. Bayangkan saja kita akan berpindah-pindah sehingga kita siap dengan segala kemungkinan yang ada. • Saya minta tolong dipisahkan antara keluarga, KB dan kependudukan. • Pimpinan tolong loby dengan Kemenpan RB agar mereka lebih cenderung ke kita untuk masalah administrasinya, jangan

		kependudukan secara umum.
	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> • Kita masih perlu melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya dan kami berharap bapak sudibyo tetap memberi bimbingan kepada kami • Target penyelesaian pemetaan adalah bulan Desember 2019 dengan diperkuat oleh naskah akademis yang akan kita susun bersama-sama • Besok atau sebelum ibu deputi kembali, kita harus sudah menyusun tim kecil dan merancang kegiatan. Awal desember bisa melakukan langkah konkritnya. • Besok kita akan membuat tim kecil dan perencanaan secara detail tentang apa yang harus dilakukan. • Masing-masing komponen harus menyusun strategi terkait program dan anggarannya.

Kesimpulan :

1. Pemetaan jabatan fungsional harus sudah diselesaikan dan diserahkan ke Kemenpan RB pada bulan Desember 2019
2. Pengalihan jabatan fungsional baru akan dimulai pada bulan Juni 2020.
3. Jabatan fungsional terampil terdiri dari pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan dan penyelia. Jabatan fungsional ahli terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama
4. Usulan jabatan fungsional nantinya akan dituangkan dalam tulisan. Oleh karena itu, harus diuraikan agar orang-orang mengerti, bisa membaca dan bisa memilih jabatan fungsional mana yang cocok dengan orang tersebut pada naskah akademik
5. Jabatan fungsional membutuhkan analisis dan pengetahuan dengan tingkat pemikiran yang spesifik. Walaupun dengan analisis tinggi tetapi tetap membutuhkan pedoman/panduan.
6. Usulan dari Bapak Sudibyo tolong dipisahkan antara keluarga, KB dan kependudukan.
7. Usulan dari Bapak Sudibyo adalah jabatan fungsional Analisis Pengelolaan Pengendalian Penduduk. Bertugas untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang pengelolaan pengendalian penduduk pada satuan kerja K/L sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
8. Jika pada suatu unit kerja tidak terdapat analisis pengelolaan pengendalian penduduk untuk melaksanakan kegiatan yang semestinya, maka analisis

pengelolaan pengendalian penduduk yang berada satu tingkat diatas atau dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan akan mendapatkan angka kredit.

9. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap analis pengelolaan pengendalian penduduk wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK)
10. Kalau bisa adakan analisis keluarga karena sudah disebutkan bahwa kita mengurus pembangunan keluarga.
11. Struktural tetap ada untuk membantu eselon 2. Jangan sampai kosong semua.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Akan diadakan pertemuan pada hari Jum'at, 15 November 2019 untuk membuat tim kecil dan merancang kegiatan. Awal Desember bisa melakukan langkah konkritnya.
2. Masing-masing komponen harus menyusun strategi terkait program dan anggarannya.

DOKUMENTASI



NOTULENSI
RAPAT TEKNIS KERJASAMA BKKBN
DENGAN REPUBLIK SEYCHELLES DAN WORLD WIDE FUND INDONESIA

Tanggal : 11 November 2019

Tempat : Ruang Rapat Direktorat Analisis Dampak Kependudukan

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

No.	Pembahas	Isi
1.	Ibu Direktur	<p>Assalamu alaikum.</p> <p>Terima aksih atas kehadiran Pak Jody, Bu Dhea, dan dari beragam komponen dan internal Ditdamduk yang saya hormati. Dalam kesempatan yang terbatas ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai tindak lanjut komitmen yang sudah disepakati karena pertengahan Desember sudah harus <i>closed</i>. Dengan Pak Ade kami sudah korespodensi, selanjutnya kita lakukan pembagian wewenang dan integrasikan mau seperti apa. Saya berharap pagi ini, kita sepakati dan tentukan <i>timeframe</i> kita menghitung hari bukan lagi minggu.</p> <p>Saya mohon izin meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena ada rapat dg Irtama. Selanjutnya, Saya serahkan kepada Pak Slamet untuk memimpin rapat.</p>
2.	Pak Slamet	<p>Sebelumnya sudah ada paparan dari WWF sehingga hari ini mungkin sudah tidak kami agendakan paparan dari WWF.</p> <p>Lokus pertama arahan Pak Kepala adalah di Kulon Progo Kampung KB Pedukuhan Bugel 6, Desa Bugel, Kec. Panjatan. Lokus ini dipilih karena berada di dekat pantai dan agar diterapkan pengelolaan sampah.</p> <p>Jadwal sementara yang disepakati adalah pada tanggal 21-23 November 2019.</p> <p>Sementara, sudah ada MOU BKKBN dengan Seychelles dan PKS menyusul mungkin setelah hasil dari <i>need assesment</i>.</p> <p>Selanjutnya Pak Uki diharap memberikan paparan dan konsep selajutnya. Lebih baik lagi jika kita bisa melakukan aksi sebelum akhir tahun ini.</p> <p>Assesment akan dimulai dengan FGD. Namun, karena anggaran terbatas, komponen masing-masing menyusun anggaran sendiri untuk perjalanan dinas.</p>
3.	Pak Uki (Pulin)	<p>Terima kasih atas kehadiran Pak Jody, Bu Dhea, dan dari beragam komponen dan internal damduk yang saya hormati.</p> <p>Sebelumnya, saya minta maaf , saya tidak dapat hadir di rapat sebelumnya. Namun saya tetap dapat info <i>ter-update</i> bahwa sudah ada kesepakatan tema, yaitu lingkungan sehat keluarga sejahtera.</p> <p>Kini, BKKBN sedang dalam tahap <i>rebranding</i> sehingga Pak Sestama selalu meminta <i>update</i> terkait MOU dengan Seychelles karena Pak Kepala sedang gencar memaparkan kerja sama dengan Seychelles. <i>Project Family Welfare</i> dan <i>Family Happiness</i></p>

		<p>dengan Seychelles ini yang ditonjolkan Pak Kepala hampir di semua forum.</p> <p>Dengan demikian, kita pun harus punya semangat yang sama menjalankan project ini karena waktu yang sudah mendesak. Kita pun telah mendengar arahan Bu Direktur untuk mulai eksekusi dan <i>plotting</i> kegiatan.</p> <p>Sebelum itu, saya ada beberapa pertanyaan yang perlu kita sepakati dalam forum ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Damduk, kita mengetahui bahwa inisiasi <i>need assesment</i> ke Kulon Progo lebih mudah karena sudah ada jalur dari Pak Kepala. Namun, perlu juga dipertimbangkan terkait perizinan. Perlukah kita berkomunikasi ke Kulon Progo untuk perizinan ke Pemkab terkait kecamatan yang akan diintervensi atau sudah dilakukan penentuan lokus. Step ini bisa terlewati atau 2. Misi Bersama: dg biaya masing-masing dari komponen, diskusi dengan perangkat dg dihadiri seychelles, damduk dan semua komponen yang hadir. Channel nya kampung KB harus kita manfaatkan. <p>Grand Plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga peduli lingkungan. - Kemungkinan memasukan kurikulum yang bisa kita adopt dengan sasaran anak-anak (PAUD, TK, SD) - Kemungkinan memasukan muatan lokal tentang PHBS.
4.	Bu Ica (Ditvokom)	<p>Alasan pemilihan lokus ini apakah karena syaratnya harus ada pantai saja?</p> <p>Kita perlu tahu dulu baseline datanya, sejarah kampung KB-nya seperti apa, kalau terbelakang harus datang kesana harus didokumentasikan, agar ada <i>before</i> dan <i>after condition</i> agar bisa di show case kan.</p> <p>Jadi, menurut saya, perlu turun lapangan paling tidak minggu ini untuk mendapatkan <i>baseline data</i>.</p>
5.	Pak Uki (Pulin)	<p>Intinya Pak Kepala ingin ada nilai kebaruan, yaitu <i>ecotourism</i> dan pemilihan lokus ini mungkin karena faktor itu juga.</p> <p>Oleh karena itu, kita mengajak WWF untuk dapat membantu kita terkait pelaksanaan program yang berfokus pada <i>ecotourism</i>. Terkait lokus pun sudah disetujui Bu Direktur dengan tujuan awalnya adalah mengubah kampung KB di Kecamatan Panjatan yang kondisinya terbelakang disulap menjadi bagus.</p> <p>Baseline data: Bapak-bapak belum membuat bank sampah Belum ada ekowisata mangrove Ibu belum ada kerajinan sampah</p>
6.	Bu Ica (Ditvokom)	<p>Bank sampah seperti apa? Harus share dan fokus karena beda masyarakat di pantai dan pegunungan dan sungai treatmentnya beda.</p>

7.	Pak Jody (Kedutaan Seychelles)	Agenda ini dibuat dengan Seychelles dengan Pak Kepala adalah sebagai upaya merubah perilaku terkait lingkungan. Step kita masih diskusi, sekarang fokus saja menentukan lokus dan menetapkan <i>timeframe</i> .
8.	Bu Sinta (Ditbalnak)	Saya izin usul, <i>assesment</i> untuk melihat apa yang diperlukan itu sangat penting agar kita mempunyai data kondisi demografi di lokus. Kemudian, tentukan fokusnya. Goal awalnya berfokus pada kebersihan di pantai saja dahulu karena program ini harapannya akan berkelanjutan, Selain itu, diperlukannya <i>need assesment</i> karena ada banyak kelompok usia seperti remaja dan lansia yang juga merupakan bagian dari keluarga
9.	Bu Ica (Ditvokom)	Saya sekilas riset di internet, desa ini juga ternyata sering banjir, gelombang tinggi pantainya juga menyebabkan abrasi sehingga project dari WWF yang kaitannya dengan penanaman mangrove ini bisa jadi solusi masalah. Namun, perlu <i>need assesment</i> untuk membuka kemungkinan potensi masalah lain.
10.	Pak Slamet	Untuk penentuan desa, lokus ini sudah dapat rekomendasi dari Yogyakarta. Jika dibutuhkan, pra <i>need assesment</i> boleh dilakukan untuk melihat kondisi awal dan akhir.
11.	Pak Uki (Pulin)	Saya ingin tanya Seychelles untuk kebersihan laut apa upaya yang telah dilakukan disana?
12.	Pak Jody (Kedutaan Seychelles)	Di Seychelles, langsung pada pembagian jenis sampah belum ada mekanisme kebersihan laut yang terlalu signifikan.
13.	Pak Uki (Pulin)	Tanggal 20-22 November, Pulin tidak dapat mengikuti kunjungan karena sudah ada agenda dengan Kemenlu. Saya mohon surat untuk pengajuan anggaran ke pulin.
14.	Bu Ica (Ditvokom)	Saya lihat kerja sama WWF itu ada konservasi lingkungan dan perikanan dengan objeknya adalah pantai. Sementara, kita tema besarnya keluarga peduli lingkungan. Bagaimana menjadikan sampah ikan menjadi produk yang berguna ini sebenarnya menarik karena ada kaitannya dengan UPPKS. Kita jangan terbuai dengan membuat lingkungan menjadi cantik saja, tetapi juga lihat sisi kebermanfaatan atau <i>value added</i> program kita untuk lokus tersebut.
15.	Bu Ani (Ditdamduk)	Apakah lokus sudah lengkap pelaporan onlinenya? Jika sudah, dari situ dapat dilihat kondisi awalnya. Indonesia punya lembaga yang mengurus tentang lingkungan. Artinya, mereka pun pasti sudah melakukan gerakan yang berkaitan dengan sampah. Oleh karena itu, kita harus menentukan porsi BKKBN sampai mana? Dari komponen kami, project ini ada kaitannya dengan permodelan. Mungkin dapat dipilah lagi porsinya menyesuaikan dengan kebutuhan permodelan. Satu lagi, terdapat semacam komunitas yang bernama para perintis yang pernah bergerak pada isu lingkungan, khususnya di kawasan pantai. Ini mungkin bisa jadi referensi.
16.	Pak Uki	Masukan dari Ibu Ani sangat baik. Kedepan, KLH perlu

	(Pulin)	diikutsetakan, namun dengan kemasam untuk berfokus pada keluarga.
17.	Ibu Ica (Ditvokom)	Kondisi di Panjatan, Desa Bugel: <ul style="list-style-type: none"> - Ada 10 Dusun - Daerah rawan konflik (2 tahun lalu) - Pusat Banjir - Daerah titik tsunami - Kerusakan lingkungan - Tambang pasir besi - Jarang ada nelayan dan lebih banyak petani padahal letaknya di sisi samudra - Kondisi ekonomi berada di garis kemiskinan - Budidaya : cabai merah - Kampung KB belum dimasukan ke web kampung KB - Kelompok usia lansia tinggi - Usia 20-24 bisa difokuskan ke PIK
18.	Pak Jody (Kedutaan Seychelles)	Kita perlu <i>mapping behaviour</i> -nya juga, jangan sampai program ini tidak memiliki strategi komunikasi yang tepat sehingga target terhadap perubahan perilaku terkait lingkungan ini tidak tercapai.
19.	Ibu Dhea (WWF)	Perlu menjadi catatan bahwa project ini melibatkan perubahan perilaku yang artinya hasil dari <i>community development</i> ini tentu tidak bisa setahun atau dua tahun langsung dapat dicapai sehingga keberhasilan tidak dapat dicapai dalam waktu singkat karena perlu <i>sustainability intervention</i> dengan tetap memperhatikan kemandirian masyarakat sebagai tujuan utama.
21	Pak Slamet	Saya akan sampaikan untuk hasil rapat ini ke Ibu Direktur. Selanjutnya, kita akan melakukan need assesment. Kita tutup acara ini. Terima kasih atas kehadiran saudara.

DOKUMENTASI









**NOTULENSI MONITORING & EVALUASI MODEL
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PRIVAT**

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2019

Tempat : Kampung KB Mawar, Rancabungur, Bogor

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Ibu Sahla (Ketua Kader)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengulas RTH yang telah dilakukan, awalnya berjalan dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri. Semenjak ada RTH, kami memiliki bahan-bahan untuk diolah atau dimasak sendiri. Kami bisa langsung memetik hasil tanaman di halaman sendiri tanpa repot-repot harus beli ke luar. • Namun terdapat beberapa kendala yang kami alami. Setelah satu tahun dan sudah menjadi bibit, sebagian bibit ada bijinya, sebagian lagi tidak ada bijinya sehingga ketika ditanam tidak dapat tumbuh. • Kacang panjang juga awalnya berbuah banyak namun setelah di bibit tidak berbuah lagi, hanya ada daun saja. • Begitu pula dengan hidroponik setelah dipanen lalu disemai lagi, bibitnya tidak tumbuh. • Hal tersebut membuat kami yang awalnya semangat menjadi <i>down</i> dan patah semangat. Semoga dengan kedatangan tim dari BKKBN bisa memotivasi dan menumbuhkan semangat kami untuk bercocok tanam lagi.
2	Ibu Yulianti (Ibu Kades)	Seperti yang sudah disampaikan tadi, awalnya hidroponik dan tumbuhan yang kami tanam semua tumbuh dengan subur. Banyak tanaman hijau yang segar-segar dan menambah keindahan untuk dipandang. Kami senang dengan adanya

		<p>tanaman-tanaman tersebut dan memiliki semangat tinggi untuk terus bercocok tanam.</p> <p>Namun sekarang sudah tidak seindah dahulu. Kenyataannya di lapangan banyak tanaman yang mati.</p> <p>Banyak tanaman mati karena kekeringan disebabkan oleh musim kemarau yang sedang dialami sekarang.</p> <p>Ada juga tanaman yang tidak bisa tumbuh dan berkembang setelah di bibit. Bibit yang ada tidak bisa tumbuh. Saya tidak tahu apakah bibitnya yang kurang bagus atau ada permasalahan lain yang bisa menyebabkan bibit tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.</p> <p>Dengan kehadiran dan diadakannya pertemuan ini, kami mohon saran dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan agar kami bisa bercocok tanam lagi.</p>
3	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> • Hari ini kami datang kesini untuk bersilaturahmi dengan bapak/ibu di Kampung KB Mawar. Tidak terasa sudah satu tahun yang lalu kita bertemu dan melakukan permodelan ruang terbuka hijau. Saya dulu sempat kesini dan sempat menikmati hasilnya juga di kantor desa. Hal utama pertemuan ini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan dengan optimal baik secara ekonomi maupun untuk meningkatkan kualitas hidup kita agar lebih baik lagi. • Mungkin Bapak/Ibu bertanya-tanya kenapa BKKBN mengurus RTH? Perlu Bapak/Ibu ketahui, kami tidak hanya mengurus KB tetapi juga mengurus masalah kependudukan. Bagaimana penduduk bisa tumbuh seimbang? Seimbang disini maksudnya tidak hanya dengan orangnya tetapi juga

		<p>keseimbangan antara perumahan dengan lingkungan. Kalau semua dijadikan perumahan dan tidak ada lahan terbukanya, bisa menyebabkan banjir dan bencana alam lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang kami lakukan adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang seimbang antara jumlah penduduk, kualitas hidupnya dan keseimbangan lingkungan. Itu adalah salah satu perhatian BKKBN dan kami mencoba menterjemahkan itu semua di kampung KB Mawar. • Di Kampung KB Bekasi dekat lubang buaya ibu-ibu sangat aktif dalam membuat hidroponik sampai bisa melatih wilayah lain dan mengembangkan tanaman-tanaman lainnya. • Di Bekasi juga mereka membuat program bank sampah. Bank sampah juga sepertinya memiliki prospek yang bagus. Sampah-sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik bisa dijual kembali. • Pada kesempatan ini saya ingin tahu permasalahannya dan semangatnya ibu-ibu untuk melanjutkan. Kalau masih semangat semoga masih bisa dikembangkan dan berlanjut. • Kami juga ingin berterima kasih atas partisipasi bapak/ibu yang sudah secara aktif melaksanakan permodelan yang telah kami kembangkan. Kami juga berharap silaturahmi ini dan apa yang sudah dikembangkan bisa terus berlanjut. Harapan kami kampung KB ini bisa jadi percontohan bagi kampung lain. Setidaknya apa yang diterapkan di Kampung KB Mawar bisa jadi contoh di RW lain.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Mohon PKB dan Ibu Kades bisa membina lagi. Jangan sampai yang sudah dikembangkan tidak dilanjutkan. Mudah-mudahan Kampung KB Mawar bisa menjadi salah satu tujuan daerah-daerah lain untuk dicontoh dan mudah-mudahan tahun depan kami masih berkesempatan untuk mengembangkannya.
4	Pak Slamet	<ul style="list-style-type: none"> • Alhamdulillah diucapkan puji syukur atas terlaksananya kegiatan <i>Forum Group Discussion</i> hari ini kepada kelompok Ruang Terbuka Hijau Privat Kampung KB Mawar. • Kegiatan RTH tersebut pada tahun lalu kondisi hasilnya sangat bagus dan di Kampung KB Mawar sudah terbentuk Rumah Data Kependudukan. • Tujuan dari monitoring dan evaluasi RTH ini adalah untuk mengetahui kondisi saat ini. Bagaimana kondisinya saat ini dan apa kendala yang dihadapi. • Sebagai <i>feedback</i> yang lalu pada tanggal 6 Agustus 2018 diadakan FGD di Kantor Kecamatan dengan rencana adanya <i>pilot project</i> RTH Privat. • Dalam Profil Rumah Tangga, responden lebih memilih membeli makanan matang daripada memasak sendiri. • Pada tanggal 8 September 2019 telah diadakan pelatihan dan setelah itu diadakan penanaman bibit. • Kondisi saat ini yang tanamannya serta hasilnya tidak bagus dengan media yang dibiarkan kosong, tidak ada tanamannya. • Silahkan untuk berdiskusi dan menyampaikan pengalaman atau kendala yang terjadi, apabila Bapak/Ibu masih semangat akan diberikan kegiatan pelatihan penanaman organik.

5	Bu Ririn	<p>Masalah yang saya alami adalah adanya bibit yang tidak bagus, seperti bibit bayam atau terong yang saya tanam hanya tumbuh rumput saja sehingga saya cabut saja. Terdapat bibit yang sudah kadaluarsa. Ada juga bibit yang sudah kering sehingga tidak bisa dipakai lagi.</p> <p>Ada juga tanaman-tanaman yang kena hama menjadi hitam-hitam.</p> <p>Sedangkan untuk cabe yang saya tanam hasilnya cukup baik.</p>
6	Ibu Mursi	<ul style="list-style-type: none"> • Saya ingin menceritakan pengalaman saya saja kalau tanaman kacang panjang saya tumbuh dengan baik dan subur. Dalam jangka waktu 3 bulan pun masih ada kacangnya. Kacang panjang yang saya tanam sudah menghasilkan bibit lebih dari 3 botol. Bibit tersebut sampai bisa ditanam di sawah bahkan bisa dijual. Hasil penjualan bibit pertama adalah 25 ribu, penjualan kedua 20 ribu, dan penjualan ketiga 18 ribu. Memang makin lama dijual dengan harga yang semakin menurun tapi bibit-bibit tersebut masih menghasilkan. • Berdasarkan pengalaman saya, panen pertama dan kedua tidak boleh bikin bibit karena tanaman bisa langsung mati. Tanaman baru bisa di bibit setelah panen ketiga dan seterusnya, nunggu tanaman tua dahulu. • Selain itu juga saya beri pupuk tambahan dan disemprot. Untuk kacang panjang dan mentimun semprotannya sama yaitu semprotan seprin, tapi seprin tidak boleh dipakai untuk kangkung dan cabai karena tumbuhan tersebut beda semprotannya. • Dengan perbedaan lahan bisa berbeda juga hasilnya.
7	Pak Aceng	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kegiatan tambahan yang saya

		<p>lakukan yaitu beternak lele dan gurame di kolam. Ikannya cukup banyak dan lumayan menghasilkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain itu limbah air dari kolam peternakan lele saya gunakan untuk menyiram tanaman cabe dan mendapatkan hasil tanaman yang lebih subur. • Kadang ada orang yang tidak bisa menanam karena memang tangannya tidak cocok untuk menanam seperti saya. Tapi istri, dan mertua saya bisa. Jadi, kalau bapak/ibu merasa selalu gagal dalam menanam, mungkin bisa anggota keluarga lain yang menanam. Siapa tau bisa cocok menanam dan mendapatkan hasil yang bagus. Kerja sama saja dalam keluarga.
8	Bu Aceng	<p><i>Butternut</i> yang saya tanam hasilnya bagus dan sangat bermanfaat bisa untuk dikonsumsi, seperti sekarang ini bisa bapak/ibu konsumsi dalam bentuk agar-agar.</p> <p>Tanaman lainnya juga hasilnya cukup baik walaupun ada juga beberapa yang tidak tumbuh mungkin karena kemarau atau bibit yang kurang bagus.</p>

Kesimpulan

1. Kendala yang dialami adalah:
 - a. Tanaman yang tidak tumbuh lagi setelah panen pertama
 - b. Bibit yang kedua tidak sebagus bibit pertama dikasih
 - c. Terdapat bibit yang kering dan kadaluarsa
 - d. Terdapat hama pada tanaman dan tidak bisa diatasi atau dihilangkan
 - e. Pupuk dan semprotan yang dipakai tidak cocok dengan tanamannya
 - f. Kemarau panjang menyebabkan tanaman banyak yang kering karena terlalu panas.
 - g. Kurangnya air untuk menyiram tanaman

2. Masukan:
 - a. Jangan menggunakan bibit pertama atau kedua untuk menanam lagi karena bisa menyebabkan tanaman tidak tumbuh
 - b. Gunakanlah bibit ketiga dan seterusnya karena tanaman sudah cukup tua dan pas untuk ditanam kembali
 - c. Gunakan pupuk dan semprotan yang cocok untuk masing-masing tanaman. Jangan semua di sama rata
 - d. Jika menanam suatu tanaman tidak tumbuh, bisa coba dengan menanam tanaman lain
 - e. Bekerja samalah dengan keluarga untuk bercocok tanam agar mendapatkan hasil yang lebih baik
 - f. Penggunaan air limbah ternak ikan baik untuk penyiraman tanaman, terutama tanaman cabe.

DOKUMENTASI





NOTULEN NEED ASSESMENT MODEL
“LINGKUNGAN SEHAT, KELUARGA SEJAHTERA”

Hari/Tanggal : Kamis, 21 November 2019

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo

Pimpinan : Dra Maria Evi Ratnawati

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Bapak Mardiya	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan hari ini dilaksanakan untuk diskusi terkait rencana intervensi model solusi strategis “ lingkungan sehat keluarga sejahtera” yang akan menjadi <i>pilot project</i> • Diharapkan seluruh undangan akan aktif terlibat dalam diskusi
2	Direktur DitBalnak	<ul style="list-style-type: none"> • Ada penandatanganan kerja sama antara BKKBN dengan Seychelles & WWF. Kerjasama ini terkait dengan masalah lingkungan. Isu keluarga dikaitkan dengan pemeliharaan lingkungan. • Arahan dari kepala BKKBN adalah akan dilakukan uji coba tentang bagaimana menciptakan lingkungan sehat. Lokasinya di kabupaten kulon progo. Arahan kepala untuk segera dilaksanakan Desember ini. • Hari ini mengidentifikasi permasalahan/masukan dari Bapak/Ibu. Bapak/Ibu memberi masukan tentang program kami sehingga saat melakukan intervensi bisa tepat & tidak salah. • Sasaran kegiatan : Bagaimana menanamkan cinta lingkungan agar lingkungan sehat sejak dini, bagaimana membentuk karakter, pengembangan <i>home industry</i> ramah lingkungan dan bank sampah yang nantinya diharapkan

		<p>akan membuat masyarakat sejahtera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak hanya anak-anak tetapi sampai lansia pun bisa menjadi tokoh cinta lingkungan.
3	Seycheles	<ul style="list-style-type: none"> • Kami menekankan permasalahan sampah. Arahan dari kedutaan kami ingin membuat inkubator sampah. Dimana sampah dikumpulkan, ditukar dengan mendapatkan poin dimana poin tersebut bisa ditukar menjadi sembako. Sehingga sampah bisa menjadi nilai ekonomi.
4	WWF	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang telah WWF lakukan yang berkaitan dengan masyarakat: Sekolah Pertanian Memberdayakan sumber daya lokal. Kami akan menempatkan fasilitator untuk belajar bersama tentang pertanian organik lalu praktek. • Ada 3 komponen 3 wisata : Ekologi Ekonomi = masyarakat harus mendapatkan manfaat/keuntungan ekonomi Kebersamaan = beberapa unsur yang ada harus berkolaborasi • Kulon Progo akan menjadi objek wisata di DIY setelah bandara baru dibuka sehingga kita harus memanfaatkan potensi wisata yang ada. • Potensi yang ada merupakan modal kita untuk membangun pariwisata. Pariwisata yang kami inginkan adalah ekowisata • Di Sumatera ada beberapa desa yang sudah dikembangkan dengan cara memperkenalkan budaya lokal disana kepada para wisatawan. • Kami baru melihat sedikit kondisi desa Bugel, belum mengetahui secara detail

		<p>kondisi di desa ini. Oleh karena itu kami ingin masukan terkait masalah lingkungan, sosial, hubungan masyarakat, setelah itu akan kami susun rencana yang cocok berdasarkan masukan dari bapak/ibu.</p>
5	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat saya mayoritas petani. Di daerah pantai selatan, lahan pertanian banyak dengan bermacam-macam tumbuhan. • Kemarin tim sudah <i>survey</i> di daerah selatan untuk menggali potensi yang ada di desa Bugel. • Saya sangat mendukung program ini. Data apa saja yang dibutuhkan BKKBN nanti akan saya siapkan dengan perangkat kerja saya.
6	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Bapak camat berpesan untuk mendukung program lingkungan ini, beliau akan menggerakkan memelihara lingkungan dengan menanam sayuran dan buah di masing-masing keluarga. Hasil itu akan higienis dan bebas kimia, meningkatkan ekonomi keluarga karena tidak perlu beli, akan menghasilkan buah dan sayuran yang segar karena diproduksi sendiri, memelihara lingkungan selalu bersih. • Pengelolaan sampah harus diperhatikan karena harus memotivasi kesadaran masyarakat juga. • Menghindari membakar sampah sangat sulit dihindari karena lahan disini sangat luas sehingga masih sangat sulit untuk tidak di lakukan. Mohon solusi untuk menghindari pembakaran sampah. • Sudah ada bank sampah di desa Bugel. Di Kab. Depok sudah ada pengelolaan dan peralatan dan sudah menjadi

		percontohan tingkat kabupaten.
7	Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait upaya membangun ketahanan pangan yang kuat, kita melaksanakan 3 aspek : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pangan bagi masyarakat. Sudah dilakukan berbagai upaya <ol style="list-style-type: none"> a. Membangun pertanian organik (seluruh prosesnya organik) b. Usaha tani terpadu bergilir Bagaimana membangun usaha tani ini tidak membutuhkan intervensi dari luar. Akan memproduksi kompos, kompos untuk menanam, tanaman dimanfaatkan kembali dengan fermentasi (jadi selalu berputar dalam 1 siklus). c. Cetak sawah 2. Aspek distribusi pangan = bagaimana membuat rantai makanan menjadi pendek (penyaluran distribusi BPMT non tunai oleh gabungan kelompok tani) >> sangat memperpendek rantai makanan. Telah menyediakan 300 ton/bulan. Bulan depan akan ditambah 48 ton/bulan dari APBD. Harga murah tapi kualitas baik. Hanya ada di Kulon Progo. 3. Aspek konsumsi pangan menyediakan konsumsi pangan yang bergizi seimbang. Kegiatannya adalah rumah pangan lestari (setiap jengkal tanah dimanfaatkan untuk pangan kita). Program ini mendapatkan juara 1 pengelolaan perkarangan/lahan dari kementerian pertanian. 4. Kelompok binaan telah melakukan

		<p>pemasaran produk melalui online</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Badan ketahanan pangan dan pemda mulai merancang pertanian masuk sekolah, kawasan taman lestari mulai dari pembibitan hingga proses pengemasan. Proses yang berjalan terkait rencana ini baru inventarisasi permasalahan 6. Program SINUP: pekarangan yang gelap menjadi sehat, indah dan produktif. 7. Fasilitasi kepada kelompok wanita tani dan kelompok posyandu untuk mmembuat lingkungan sehat dan produktif.
8	Dinas Koperasi Kulon Progo bidang pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bugel adalah lahan pertanian yang subur dan merupakan wilayah wisata yang perlu penanganan yang lebih. • Hasil pertanian: cabai dan melon dengan persoalan penggunaan pestisida. Mohon arahan untuk meningkatkan produktivitas keluarga tanpa kimia. • Ekowisata. Banyak obyek wisata baru yang ditawarkan. Kami mohon bisa ditindaklanjuti. Perlu pemahaman masyarakat terkait pengelolaan lingkungan yang baik. Perubahan mindset perlu dilakukan karena ini adalah proses yang panjang yang bisa dilakukan melalui kelompok-kelompok masyarakat. • Diharapkan program bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti di Surabaya di wilayah ekowisata. • Kami berharap ada pemahaman pertanian yang mengarah pada pertanian yang sehat.
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 90-an sudah ada program

	Kulon Progo	<p>terpadu keluarga sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Budidaya ikan dengan kolam bulat yang sudah dihibahkan ke masyarakat sebanyak 200 kolam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mengarahkan limbah air ke pertanian untuk pertanian organik.
10	Pokja Kampung KB	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan di Desa Bugel. <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada lintas sektor yang bergabung sehingga jalan kami tertatih, sementara masalah di kampung kami adalah stunting. Kami butuh Kegiatan UPGK seperti dulu lebih baik untuk mengatasi stunting. Kami berharap pemberian CFC (perbaikan gizi sebulan sekali untuk stunting) juga dibarengi kerjasama - 2006 Areal Model Pantai. Kami melakukan penanaman cemara. 2009 KKP ikut menanam. Karena tidak ada dana pemerintah, kami memberdayakan masyarakat dengan mencangkok untuk menyulam lahun. Tahun 2016 frekuensi abrasi semakin besar karena proses alam. Dulu formasinya adalah pandan dan cemara. Kami akan melakukan aksi bela alam dengan menanam tanaman laut hanya menunggu hujan. - Kami mendukung program konservasi lahan. - Di lingkungan PAUD sudah kami coba melakukan pembelajaran hidup sehat. - Terkait kesehatan lingkungan 2018 terkait SPAL (Saluran pembuangan air limbah lingkungan) mohon solusinya.
11	PKK	<ul style="list-style-type: none"> • PKK desa Bugel Kecamatan melakukan tilik pedusunan dengan pelaksanaan lomba, seperti bazaar, warung hidup. Di setiap pedusunan

		<p>diadakan lomba dan kegiatan Toga tanam sayur mayur dan buah. Tapi kurang dukungan bibit. Jadi mohon disiapkan bantuan bibit.</p>
12	Guru TK	<ul style="list-style-type: none"> • Kami baru mencoba menanamkan pendidikan kesehatan dari TK dengan memberikan pelajaran terkait kesehatan tubuh dengan menanam tanaman seperti sawi, sausin, dan bayem. • Program seperti pembelajaran ternak lele kolam bulat belum bisa kami lakukan, kami belum bisa karena kami swasta sehingga kurang mendapatkan bantuan. • Kami mengajarkan membuang sampah kepada anak-anak, tetapi kami tidak mempunyai tempat pembuangan sampah akhir di sekolah. • Kami butuh arahan bagaimana mendidik anak untuk hidup sehat yang lebih baik
13	IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kami mohon bagaimana caranya supaya kami bisa melaksanakan kegiatan ini nanti.
14	Guru SD Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun lalu kami mengikuti lomba Sekolah Sehat di Tingkat Provinsi dan mendapat juara 1 dari bawah. Kami meminta ratusan murid untuk membawa tanaman beraneka ragam. Program lain yang dilakukan adalah program makan sehat untuk gizi anak-anak dengan membawa nasi, sayur dan lauk dan setiap hari Kamis kami meminta anak-anak membawa makanan tradisional. Hari Jumat anak-anak membawa buah . • Gelora kami hanya ketika lomba, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada, kami lemah dalam karakter sehari-hari.

		<ul style="list-style-type: none"> • Persoalan yang besar adalah sampah. Sudah disediakan tiga jenis sampah, tetapi di pembuangan akhir sampah kembali dicampur.
15	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Program tahun ini adalah Pendidikan Karakter. Kami mendorong sekolah bekerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan pendidikan karakter. • Dinas pendidikan bekerjasama dengan Polres Kulon Progo untuk menertibkan penggunaan sepeda motor oleh anak-anak yang belum mempunyai SIM. • Dinas Pendidikan menghimbau pelaksanaan cuci tangan dan menyediakan ember dan serbet. Setiap jumat dengan mendidik karakter anak dengan kerja bakti untuk menumbuhkan kegotongroyongan.
16	Ketua Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Karang taruna Kusumaraya ada 10 unit di 10 pedusunan. Kegiatannya adalah arisan, mengalangan dana, unit kreatif yang menitipkan satu pohon di setiap rumah; Di dusun 4 karang taruna mulai menangani sampah untuk kegiatan mereka; kerjasama. • Program peternakan dan pertanian perlu peraturan desa untuk mengendalikan ternak yang merusak lingkungan. • Kelompok tani di desa Bugel 8 Poktan dan 2 KWT. Di KWT sudah merintis penanaman dengan polibag. Kami butuh peraturan desa atau rembug pedukuhan untuk menjaga ternak mereka. • Di wilayah pesisir merupakan lahan hortikultura yang cocok untuk agrowisata. Dinas pertanian banyak menggelontorkan dana ke sana, di

		<p>mana jalan di sana sudah bagus. Jika ke depan bisa menjadi wilayah agrowisata di sana untuk edukasi pertanian baik penggunaan alat pertanian modern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan pasca panen belum tersentuh Saat panen raya dan harga jatuh, petani tidak punya pilihan selain menjual. Seharusnya ada pengelolaan hasil pertanian. • Di Utara Bugel adalah kawasan persawahan. Itu bisa memungkinkan untuk edukasi pertanian, tapi belum ada dukungan dana irigasi yang maksimal. Di musim kemarau ada wilayah yang tidak terairi.
17	Sutahan (Toma)	<ul style="list-style-type: none"> • Dulu belum ada pengetahuan tentang lingkungan hidup. Belum ada pendidikan pengelolaan sampah • Pembuangan limbah keluarga/limbah MCK disarankan 10 meter dari sumur tetapi sampai sekarang masih ada di masyarakat kami yang mck nya berdekatan sehingga air berbau tidak sedap. • Saran: berikan sosialisasi kepada warga setidaknya ada perwakilan 5 orang per RT untuk kebaikan generasi kita saat ini dan generasi mendatang. • Persoalan kami adalah kesulitan karena banyak menerima informasi yang salah, seperti hasil yang besar di masa depan yang menjadi persoalan. • Untuk pertanian, masyarakat kami adalah petani. Kami diberi informasi mengenai pertanian hortikultura, tetapi dimana kami bersandar pada pertanian kelapa tidak tersentuh. kami besar dari kelapa. Kami tidak diberi informasi mengenai pupuk dan pertanian mengelola kelapa.

18	PLKB	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kampung KB penekanan kegiatan pada 8 fungsi keluarga. Di dalamnya ada fungsi lingkungan yaitu hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Saat ini perilaku manusia dengan lingkungan sewenang-wenang. Ketika menanam satu pohon tidak dipikirkan menanam pohon lagi. Kedua, perilaku membakar sampah. • Kesempatan keluarga berkumpul keluarga saat ini salah sulit dalam pembangunan keluarga karena kesibukan mencari nafkah. • Hubungan manusia dengan masyarakat sekitar. Kurangnya komunikasi di rumah menyebabkan kenakalan remaja. • 2018 ada anak 13 tahun sudah mempunyai anak di Kecamatan Panjatan. • Program BKKBN dulu bagus, tetapi karena tidak ada dukungan saat ini sudah tidak ada bina keluarga dan lingkungan. Kebiasaan membakar sampah dan jumlah pohon yang sedikit menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. • UPPKS kami di bidang pertanian, kami sudah meminta narasumber yang berkaitan dengan budidaya sayuran di botol. Kami sedang merintis apa saja budidaya sayuran yang cocok di botol dan digantung karena masalah ternak yang berkeliaran.
19	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> • Kami telah mendapatkan masukan dari Bapak/Ibu sekalian terkait dengan rencana kami untuk mengembangkan suatu <i>pilot project</i>. • Yang menjadi sasaran program BKKBN adalah keluarga.

		<ul style="list-style-type: none"> • Dari diskusi tadi, kami harap dapat data sekunder untuk mendapat suatu gambaran yang lebih jelas dari bapak Kepala Desa • Diskusi permasalahan tadi sudah kami tampung, dari isu-isu yang sudah disampaikan akan dicari isu yang paling strategis yang bisa dijadikan permodelan dan diterapkan di tempat lain dan akan kami cari langkah-langkah selanjutnya bersama WWF dan Seycheles untuk menangani isu-isu yang sudah disampaikan tadi.
--	--	---

Kesimpulan:

1. Kulon Progo akan menjadi objek wisata di DIY setelah bandara baru dibuka sehingga harus memanfaatkan potensi wisata yang ada.
2. Perilaku membakar sampah masih banyak dilakukan & sangat sulit dihindari
3. Ketika menanam satu pohon tidak dipikirkan untuk menanam pohon lagi.
4. Kebiasaan membakar sampah dan jumlah pohon yang sedikit menyebabkan lingkungan yang tidak sehat.
5. Telah disediakan tempat sampah dengan tiga jenis sampah, tetapi di pembuangan akhir sampah kembali dicampur.
6. Belum adanya pengelolaan sampah yang baik
7. Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan
9. Masih banyaknya penggunaan bahan kimia dalam pertanian, perlu adanya pemahaman pertanian yang mengarah pada pertanian yang sehat.
10. Telah dilakukan penanaman cemara di pantai namun abrasi semakin lama semakin kuat.
11. Dibutuhkan solusi untuk masalah SPAL (Saluran pembuangan air limbah lingkungan)

12. Kurang adanya dukungan bibit
13. Tidak adanya konsistensi dalam menjaga lingkungan di Sekolah
14. Jika program menanam tumbuhan di pekarangan akan dilakukan, perlu peraturan desa atau rembug pedukuhan untuk menjaga ternak mereka.
15. Penanganan pasca panen belum tersentuh Saat panen raya dan harga jatuh, petani tidak punya pilihan selain menjual. Seharusnya ada pengelolaan hasil pertanian.
16. Di Utara Bugel adalah kawasan persawahan. Hal tersebut memungkinkan untuk edukasi pertanian, tapi belum ada dukungan dana irigasi yang maksimal. Di musim kemarau ada wilayah yang tidak terairi.
17. Pertanian kelapa tidak tersentuh. Masyarakat tidak diberi informasi mengenai pupuk dan pertanian mengelola kelapa.

**NOTULEN NEED ASSESMENT MODEL
“LINGKUNGAN SEHAT, KELUARGA SEJAHTERA”**

Hari/Tanggal : Kamis, 21 November 2019

Pukul : 13.00 s/d selesai

Tempat : Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Kepala Desa Glagah	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi desa >> Terdapat 5 kafe untuk minuman keras dimana pengunjungnya berasal dari luar desa glagah. Alhamdulillah di desa Glagah tidak ada karena kami perkuat dengan adanya tokoh agama yang membantu untuk menerapkan ilmu agama kepada kita semua. • Di lingkungan kami hanya ada 1 yang kena dbd, hal tersebut menandakan lingkungan desa kami baik.
2	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Yang menjadi tujuan utama dari kehadiran kami adalah untuk melakukan identifikasi berbagai isu strategis untuk dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi dampak negatif • Kami ingin menggali aspirasi, masukan dan harapan dari stakeholders dan masyarakat disini. Kami ingin membangun suatu lingkungan yang sehat agar dapat menciptakan keluarga yang sejahtera. • Kami ingin mendengar masukan bapak/ibu semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa Glagah ini sehingga kami bisa mengetahui kira-kira program apa yang cocok untuk desa ini
3	WWF	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang telah WWF lakukan yang berkaitan dengan masyarakat: • Penyebab banjir di Jakarta adalah

		<p>masyarakat sendiri karena membangun bangunan di hulu sungai Ciliwung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Pertanian <ul style="list-style-type: none"> Memberdayakan sumber daya lokal. Kami akan menempatkan fasilitator untuk belajar bersama tentang pertanian organik lalu praktek. • Ada 3 komponen 3 wisata : • Ekologi • Ekonomi = masyarakat harus mendapatkan manfaat/keuntungan ekonomi • Kebersamaan = beberapa unsur yang ada harus berkolaborasi • Kulon Progo akan menjadi objek wisata di DIY setelah bandara baru dibuka sehingga kita harus memanfaatkan potensi wisata yang ada. • Potensi yang ada merupakan modal kita untuk membangun pariwisata. Pariwisata yang kami inginkan adalah ekowisata • Di Sumatera ada beberapa desa yang sudah dikembangkan dengan cara memperkenalkan budaya lokal disana kepada para wisatawan. • Kami baru melihat sedikit saja kondisi desa Glagah, belum mengetahui secara detail kondisi di desa ini. Oleh karena itu kami ingin masukan terkait masalah lingkungan, sosial, hubungan masyarakat, setelah itu akan kami susun rencana yang cocok berdasarkan masukan dari bapak/ibu.
4	Seychelles	<ul style="list-style-type: none"> • Kami menekankan permasalahan sampah. Arahan dari kedutaan kami ingin membuat inkubator sampah. Dimana sampah dikumpulkan, ditukar dengan mendapatkan poin dimana poin tersebut bisa ditukar

		<p>untuk pemotongan pajak di seycheles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kami juga ingin mengetahui pengelolaan sampah di desa Glagah.
5	PKK	<ul style="list-style-type: none"> • Kami sangat mengapresiasi terkait penanganan sampah seperti inkubator sampah. Kami ingin mengetahui lebih lanjut agar dapat kami terapkan • Tahun depan ada program pelatihan untuk ibu-ibu untuk memisahkan sampah plastik. • Permasalahan sosial di desa kami adalah meningkatnya angka perceraian
6	WWF	<ul style="list-style-type: none"> • Ada sampah-sampah yang di daur ulang yang akan dimanfaatkan untuk pertanian. Jika program ini berjalan, tentunya akan kami berikan pendampingan untuk pengelolaan sampah.
7	IMP	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembangunan bandara baru ini sangat berdampak dalam pengelolaan sampah. Dulu pekarangan kami luas sehingga mudah untuk pengelolaan sampah, setelah di relokasi lahannya sempit. • Sebelum di relokasi juga ibu-ibu bisa menanam di pekarangan yang luas, sedangkan sekarang sangat susah. • Mohon beri solusi agar bisa menanam tanaman hijau di halaman rumah yang sangat sempit • Sudah ada pelatihan hidroponik tapi orangnya sangat terbatas dan baru tanaman bayam & sausin. • Capaian KB di desa Glagah sudah lumayan berkat kerja sama IMP dengan para kader walaupun masih ada sedikit warga yang tetap tidak mau berKB. • Masih ada masalah KIE tentang keamanan pemakaian kontrasepsi, kader perlu pendampingan.

8	Pak Wipto (Kelompok Sadar Wisata)	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya pembangunan bandara, mulai terlihat dampak-dampak. Salah satunya objek wisata glagah sudah mulai kedatangan wisatawan asing ke area wisata namun tidak semua pengunjung mengerti budaya kita • Mulai terkontaminasi dengan budaya-budaya asing. Bagaimana cara kami membentengi anak-anak agar tidak terpengaruh • Di area tersebut belum ada peraturan dan jam malam, sehingga siapapun bebas ke lokasi wisata tersebut hingga malam. Oleh sebab itu kami mohon solusi untuk mencegah hal-hal buruk. • Tingkat kesadaran masyarakat di daerah sekitar objek wisata sangat kurang padahal sudah sering pembinaan sampah. • Setiap tanggal merah kami melakukan • Di area wisata masih sangat dibutuhkan masjid/mushola yang mumpuni. Yang ada sekarang kurang memadai dan sangat kecil
9	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi apa yang ada di desa Glagah ini selain pantai?
10	Pak Wipto	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak yang harus dibenahi seperti Akses masuk jalan sangat susah, penerangan Jalan • Kita ada danau untuk objek wisata tapi kurang dalam agar dimungkinkan dilewati perahu
11	WWF	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan wisata bagaimana? Dikelola perorangan atau kelompok?
12	Pak Wipto	<ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa kelompok. Dari beberapa kelompok ada yang menaungi yang bernama kelompok Laguna. • Kita juga punya pemecah ombak tapi sepertinya gagal karena ombak disini sangat besar.

		<ul style="list-style-type: none"> • Ada taman-taman bunga untuk selfie dan tempat bermain anak. • Setiap tanggal merah dilakukan pengumpulan uang 10ribu untuk biaya keamanan, untuk pengelolaan sampah, pengelolaan wisata, dll.
13	Direktur Bina Keluarga Balita	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada satu wadah seperti BKB, BKR, PIK-R agar bisa berkumpul bersama dan diberikan bimbingan dan pendidikan terkait pengasuhan anak sejak usia dini agar tidak terjadi tindakan negatif. • Anak usia dini sangat perlu pendidikan yang baik karena apa yang didapat mereka terekam di ingatan mereka dalam jangka waktu panjang yang sangat mempengaruhi perilakunya saat besar nanti • BKR akan disampaikan beberapa hal tentang pengasuhan remaja apalagi di era globalisasi ini agar tidak terjadi kesenjangan antara anak dan orang tua. • Penanggulangan stunting diperlukan mengingat stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia untuk tenaga kerja dan rentan terhadap penyakit. • Kami berharap di sini didirikan poktan untuk menanggulangi berbagai permasalahan kependudukan terkait perubahan wilayah bandara.
14	Karang Taruna (Agung)	<ul style="list-style-type: none"> • Karang taruna memerlukan sosialisasi mengenai pergaulan bebas.
15	Dithanrem	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kondisi remaja saat ini, bekerja atau tidak bekerja? • Remaja yang belum bergabung di karang taruna apa yang dikerjakan? • Permasalahan remaja di Desa Glagah saat ini apa?
16	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar remaja masih sekolah. Pengangguran sangat sedikit, biasanya pekerja serabutan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Karang taruna ada tingkat desa dan dusun. Karang taruna desa adalah perwakilan karang taruna dusun. Karang taruna di sini pasif, terutama di dusun. • Kenakalan remaja: minum minuman keras ada tapi sedikit, begitu juga dengan kehamilan yang tidak diinginkan ada tetapi sedikit.
17	Dithanrem	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan apa yang dibutuhkan oleh remaja desa untuk menunjang remaja desa?
18	Karang taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kewirausahaan yang dibutuhkan meningkatkan kualitasnya karena sudah cukup banyak pelatihan keterampilan di sini.
19	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang diperlukan oleh remaja dengan perubahan kawasan wisata dan keberadaan bandara? Apa yang bisa dimanfaatkan oleh remaja untuk menghadapi situasi baru ini?
20	Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kewirausahaan.
	Dinas Pendidikan Sekolah Dasar (Ester)	<ul style="list-style-type: none"> • Kami merasakan perbedaan dalam membentuk karakter yang masih kecil, SD. Untuk kelas 1 dan 2 SD, mereka keras kepala dan sulit diberi pelajaran. • Dari 27 sekolah di Temon telah mendapat bantuan tempat sampah baru 5 sekolah untuk memisahkan sampah dan pengelolaan limbah sampah. Sehingga, untuk mengatasi sampah setiap hari adalah dibakar yang membuat lingkungan sekolah tidak sehat. Kami membutuhkan difasilitasi pengelolaan sampah di sekolah. • Kami sudah meminta siswa mengumpulkan sampah untuk dinas lingkungan hidup. Itu sudah pernah dilakukan, tetapi tidak lagi. Karena kurangnya kesadaran anak-anak rendah. • Ekowisata. Kami mohon dan

		<p>tertarik persiapan pembangunan homestay. Bagaimana mendukung pembangunan homestay untuk menunjang ekowisata.</p>
21	WWF	<ul style="list-style-type: none"> • Homestay. Kami sudah membuat di Kabupaten Kerinci, Jambi. Kami melihat ada potensi di sana. Pertama kami membentuk kelompok kemudian membuat divisi fasilitas pendakian (penyewaan peralatan mendaki), divisi yang mengkoordinir untuk homestay – orang yang punya ruang lebih di rumah kami beri bantuan kepada kelompok dengan perjanjian pengembalian pinjaman. Hibah diberikan untuk dikelola kelompok untuk homestay. Divisi lain adalah divisi pendidikan, untuk pelatihan bahasa dasar dan local guide bersertifikat.
22	Tokoh Masyarakat (Suwanto)	<ul style="list-style-type: none"> • Persoalan kami adalah perubahan mata pencarian yang semula petani sekarang berubah karena lahan kami menjadi bandara. Dengan adanya bandara terjadi pro dan kontra di masyarakat yang sampai saat ini belum bisa berbaikan lagi. Kami minta solusi jalan keluar untuk masalah ini. • Kami berharap ada kursus dan pelatihan-pelatihan dan bantuan sehingga bisa menambah penghasilan dan mengganti pekerjaan yang mengganti penghasilan dari bertani. • Kursus dan pelatihan perlu dilakukan bimbingan untuk mengawasi kegiatan. • Untuk orangtua perlu diberikan kerajinan yang sesuai untuk dikerjakan orang tua untuk pariwisata.
23	Tokoh Agama (Eko)	<ul style="list-style-type: none"> • 10 tahun daerah kami akan menjadi kota metropolitan yang besar. Dulu kerjasama dan gotong royong masih

		<p>besar, kalau sekarang orang menjadi individualisme, khususnya dengan keberadaan wisata. Sebagian besar warga kami bekerja di pariwisata. Kebersamaan di antara kami sangat berkurang. Kami mohon solusi untuk kembali ada kebersamaan di masyarakat.</p>
24	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Ini akan menjadi masukan untuk kami jadikan rekomendasi ke depan karena jika tidak dilakukan penanganan akan berdampak di masa depan.
25	PLKB	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk KB di sini kami belum bisa melakukan seperti biasa karena ada perubahan bandara yang berakibat pada migrasi dan konflik sehingga belum bisa dibentuk kelompok baru
26	Kader PKB	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum ada bandara ada Poktan. Tetapi karena ada persoalan bandara kami melakukan pembaharuan data dan membentuk BKB. • Ada 9 pedukuhan di sini, 2 pedukuhan bubar karena relokasi dan pindah ke lokasi lain. Satu pedukuhan lainnya tidak bisa masuk ke sana karena ada permasalahan di sana. Saat ini baru ada pembentukan dukuh maka kami melakukan pembentukan dengan sangat hati. • UPPKS di kelompok Laguna sangat bagus, karena mereka tidak terdampak bandara. • PIK remaja tidak ada. BKB ada 8 dan 7 kelompok BKR. Kami membuat kampung KB di Desa Ulur. • Kesertaan KB di sini sudah cukup baik, karena 70-an persen sudah ber-KB dan mandiri. MoW sudah langsung di rumah sakit. Kemandirian sudah cukup tinggi di sini.
27	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kami mohon ada intervensi nyata di kecamatan kami. Di lingkungan ada

		<p>2 aspek, fisik dan non fisik. Fisik sudah ada dana desa untuk menanggulangi dan kegiatan-kegiatan non fisik berupa masalah sosial, terutama karena wisata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di Kecamatan Temon, Glagah adalah desa budaya. Tetapi untuk mengelola pariwisata belum berhubung dengan kebudayaan lokal. Dinas kebudayaan gencar sekali untuk meningkatkan kunjungan wisata, tetapi kesenian di sini belum cukup banyak untuk membuat daya dorong wisata. • Di kecamatan lain kawasan wisata membentuk bank sampah untuk menampung sampah dari pariwisata dan keluarga, dan menjadi ladang ekonomi. Di sana bank sampah bisa mendorong wisata dengan pembuatan souvenir. Kami berharap ada pelatihan untuk pengelolaan sampah. • Di sini banyak lembaga sosial sudah membantu dalam scope home industry. Terkait persampahan masih kurang. • Kami membutuhkan upaya pelatihan penunjang untuk keterampilan. Di kecamatan pernah melakukan pelatihan, tetapi keterbatasan anggaran kami tidak bisa melakukan untuk semuanya. • Kami bekerjasama dengan Angkasa Pura dalam bentuk peternakan belut. Kami berharap dari lembaga sosial dan pemerintah bisa mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
28	DitLinlap	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Kampung Wisata memang tidak akan ada lagi. Sebagai daerah wisata memang akan rawan gesekan dan rawan sosial. Kita akan membahas pergerakan yang mungkin dilakukan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Di desa ini lebih banyak persoalan yang digali dan bisa digunakan untuk pemetaan besok.
29	Direktur DitDamduk	<ul style="list-style-type: none"> • Keunggulan BKKBN adalah adanya kelompok kegiatan untuk menyalurkan berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan.
30	Perwakilan BKKBN Provinsi DIY (Eni)	<ul style="list-style-type: none"> • Di sini keberadaan bandara menyebabkan banyak pergeseran. Ke depan kami akan melakukan kajian dengan adanya bandara. • Kami sudah bekerjasama dengan IPADI (pak kamdi) terutama migrasi di sini. Ipadi sudah memotret kondisi sehingga bisa menjadi rekomendasi kebijakan. • Untuk KIE kami akan menyampaikan kepada bidang KB untuk melakukan penyesuaian KIE.
31	Kader (Siti)	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling KB di sini perlu diberi tambahan pengetahuan efek samping. Saya sendiri sebagai kader kurang paham soal tersebut.
32	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Kami akan menindaklanjuti hal tersebut. • Kami ucapkan terima kasih karena secara aktif memberikan pemikirannya. Besok kami akan menindaklanjuti dengan rapat untuk memformulasikan program untuk kabupaten Kulon Progo sebagai desa percontohan. • Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan syukur dan kami tutup pertemuan ini.

Kesimpulan :

1. Perlu edukasi tentang pengelolaan sampah dan cara menanam tanaman di lahan yang sempit
2. Perlu pelatihan hidroponik untuk seluruh warga dengan jenis tanaman yang banyak dan beragam
3. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan di area objek wisata
4. Perlu edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah yang baik dan menghindari pembakaran sampah
5. Pengelolaan pariwisata belum berhubung dengan kebudayaan lokal. Dinas kebudayaan gencar sekali untuk meningkatkan kunjungan wisata, tetapi kesenian di sini belum cukup untuk membuat daya dorong wisata.

NOTULEN
RENCANA AKSI DAN INTERVENSI MODEL SOLUSI STRATEGIS
“LINGKUNGAN SEHAT, KELUARGA SEJAHTERA”

Hari/Tanggal : Jumat, 22 November 2019

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Widya 1 Perwakilan BKKBN DIY

Pimpinan : Dra Hitima Wardhani, MPH

Dirdamduk

- Tujuan: membuat rekomendasi hasil FGD di dua desa di Kulon Progo

WWF

- Secara umum isu yang muncul: Isu lingkungan, ekonomi, pendidikan dan keterampilan
- Isu Bugel:
 - Isu Lingkungan: pengelolaan sampah belum maksimal, lahan pertanian yang kering dengan sistem konvensional dan penggunaan pupuk kimia. Kedepan bisa menjadi rekomendasi pertanian organik. Isu abrasi yang besar kendati sudah ada penanganan sejak tahun 2006. Di lingkungan pendidikan sudah ada isu kebersihan dan gizi di sekolah.
 - Isu Ekonomi: Semua kegiatan ekonomi pada pertanian. Tujuan kita adalah mengefisienkan pertanian dengan tujuan ekonomi berkelanjutan. Potensi kelapa besar tetapi belum ada pembinaan pemma kabupaten bagaimana meningkatkan potensi ekonomi, dari produk kelapa.
 - Kesejahteraan keluarga: lahan yang luas di pekarangan rumah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk tanaman sayuran dan obat. Bentuknya bisa dilakukan dengan polibag dan sejenisnya. Persoalan ternak yang berkeliaran perlu pendekatan lain dengan membuat tanggul untuk meletakkan tanaman di atas tanggul tersebut.
- Isu Glagah
 - Isu ekonomi muncul karena perubahan lingkungan dari pertanian menjadi bandara. Mereka butuh alternatif ekonomi berupa pelatihan keterampilan. Pengembangan ekonomi ke arah pelatihan untuk mencari peluang ekonomi baru.
 - Isu ekowisata. Lokasi ekonomi dipenuhi pedagang, ketimbang potensi wisata alamnya. Intervensi ekonomi di pariwisata perlu

mempertimbangkan penolakan. Perlu pendekatan dari aspek kepuasan pengunjung. Areal lingkungan bisa ditanami pohon Butuh, cemara laut.

- Isu kesejahteraan keluarga: Lahan pekarangan sempit karena relokasi di area baru yang sempit namun bisa melakukan metode yang sama di bugel.
- Di Desa Bugel, tokoh masyarakat Bugel bisa diapproach dan Ibu Santi IMP dan ketua Karang Taruna untuk menjadi fasilitasi lokal.
- Di desa Glagah: Pok Darwis (Suripto), Karang Taruna (agung) dan Pak Suwarto dapat menjadi fasilitator lokal sekaligus untuk mendapat informasi untuk perkembangan intervensi di desa.

Dirdamduk

- Seharusnya ada OPD Kulon Progo untuk dapat hadir di ruangan ini, tetapi ada perwakilan yang dapat melakukan pendalaman di lapangan.

Seychelles

- Inkubator sampah cocok untuk kedua desa ini. Kami akan sampaikan ke Bapak Dubes.
- Kita butuh pendataan culture untuk menunjang ekowisata di sana.

Dirdamduk

- Persoalan di dua desa hampir sama. Jika kita bisa menggali culturenya, kita bisa memilih lokus yang bisa kita garap. Setelah itu kita bisa memutuskan siapa yang bergerak dan perannya dalam pengembangan project.
- Bagaimana pola kerjasama yang bisa dilakukan di sana di internal BKKBN, Pemda, WWF, Seychelles?

Pulin (Panca)

- Saat ini kita sudah punya payung MoU. Setelah ini akan dibahas PKS untuk dapat membuat pembagian kerjasama, terutama soal anggaran dan kerjasama bentuk lain.
- Masukan untuk Desa Bugel adalah Kampung KB yang diprakarsai oleh masyarakat sementara yang desa kedua bukan kampung KB. Apakah ke depan tidak sebaiknya dijadikan Kampung KB?
- Sasaran pembangunan karakter lingkungan, apakah tidak sebaiknya jika kita mengandeng Sekolah Siaga Kependudukan?

- Apakah memungkinkan kerjasama lintas kementerian/lembaga dalam pengembangan pengembangan model ini?
- Dari Dinas Kelautan ada program di Kulon Progo seperti Lele Kolam Bulat dan program pertanian, apakah akan digabungkan dalam model ini?
- Penanganan dan pengolahan sampah menjadi masalah di dua desa, dan ini bersesuaian dengan program Seychelles. Mohon disampaikan kepada Bapak Duta Besar.

Ditbinhub

- Pulin sudah melakukan MoU. Sementara PKS belum dilakukan Ditbinhub. Setelah kegiatan ini kami akan mengakomodir kerjasama yang akan dilakukan: kegiatan dan anggaran. Kami akan memfasilitasi kerjasama sektor yang akan bekerjasama. Kami menunggu bahan-bahan untuk membuat PKS.

Pulin

- MoU dengan WWF belum dilakukan, baru dengan Seychelles. WWF akan menjadi pihak ketiga dari kerjasama yang akan dilakukan.

Dirdamduk

- Tidak semua hal dalam temuan akan kita kerjasamakan. Kita akan duduk bersama untuk membahas kerjasama dalam bentuk pembagian peran dari hasil temuan bersama.

Dirbalnak

- Untuk membuat PKS, maka kedeputian mengajukan konsep kerjasama. Di Bugel isu pendidikan karakter bukan pekerjaan kita, karena pembentukan karakter ini di usia dini. Kita harus melihat lagi kerjasama yang memungkinkan karena isunya masalah lingkungan. Yang memungkinkan adalah di poktan dan keluarga, bagaimana menanamkan nilai dan karakter lingkungan.
- PKS harus fokus ke masing-masing kedeputian.
- Di BKKBN kami mempunyai fokus kerja dengan mekanisme Poktan, sementara isu kita adalah isu lingkungan hidup. Perlu dipikirkan untuk masing-masing Kedeputian untuk mengkaji perannya.

WWF

- Sudah ada poin kerjasama antara BKKBN, Seychelles, dan WWF. Ini perlu pembicaraan lebih detail.

- Apakah PKS bisa jadi satu?

Ditbinhub

- PKS dibuat per sektor karena ada kerangka anggaran di dalamnya.

Seychelles

- Kerjasama dengan BKKBN yang diharapkan adalah pembangunan karakter yang akan dilakukan melalui kelompok-kelompok kegiatan. Seychelles akan menyiapkan materi dan memasukkan itu ke dalam materi poktan.

Eni

- Kami akan menindaklanjuti pertemuan kemarin. Kami akan menunggu tindaklanjut setelah kegiatan ini.
- Ibu Kepala perwakilan akan melakukan audiensi dengan Bupati Kulon Progo untuk tindak lanjut program ini.
- Apakah nanti desa Glagah akan menjadi kampung KB? Tidak ada pembentukan lagi Kampung KB, namun prakarsa desa untuk menjadi kampung KB bisa menjadi tambahan Jumlah Kampung KB di provinsi.
- Sekolah Siaga Kependudukan. Sosialisasi kami masih dalam kerangka program KKBPK, jadi belum ada materi karakter.

Dirdamduk

- Ada banyak program yang sudah ada untuk lingkungan, lalu bagaimana jika ada model baru di sana? Apakah isu itu merupakan isu baru dan strategis bagi masyarakat di sana yang jika disentuh akan membawa perubahan di sana?

WWF

- Kita perlu diskusi teknis dengan instansi terkait. Tidak apa-apa jika ada program yang sama, yang bisa kita jalankan adalah metode dan pendekatan yang menjadi masukan untuk pemda bagi implementasi program mereka. Program yang akan dilaksanakan tidak bisa terpisah dengan program kabupaten. Kontribusi bisa dilakukan dalam bentuk perbedaan lokasi dan metodologi. Ini menjadi kontribusi program kita ke Kulon Progo. Kita perlu komunikasi intens dengan kabupaten kota dan kita harus presentasi di depan pemda untuk menindaklanjuti program.

Ditbinlap

- Kami keberatan jika program dilakukan oleh PKB, kami berharap yang menjalankan adalah OPD. Program KKBPK di dua desa sudah ada hanya perlu optimalisasi.
- Glagah bukan kampung KB sehingga nanti penganggarannya akan menjadi sangat berat. PR kita saat ini adalah bagaimana pada Program pembangunan keluarga.
- Lintas sektor sudah banyak yang bekerja di Glagah, terutama untuk Pariwisata.

Dirbalnak

- Glagah akan dijadikan kampung KB tergantung teman-teman perwakilan BKKBN DIY dan OPD

Dithanrem

- Glagah mengalami *shock culture* karena yang sebelumnya sepi menjadi ramai karena adanya bandara baru dan banyak wisatawan asing yang masuk
- Ada pengangguran yang lebih kepada pekerja serabutan.
- Perlu persiapan terhadap shock culture. Kalau ingin remaja terhindar dari merokok, pergaulan bebas, maka sibukan mereka. Berikan pelatihan-pelatihan wirausahawan seperti budidaya ikan.

Dirdamduk

- Dari kasus yang sudah disampaikan masyarakat kemarin, apa yang dapat diberikan WWF

**REKOMENDASI HASIL IDENTIFIKASI KEGIATAN RENCANA AKSI
DAN INTERVENSI MODEL SOLUSI STRATEGIS “LINGKUNGAN
SEHAT, KELUARGA SEJAHTERA”**

NO	KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Membuat Nota Dinas	Akhir November	Ditdamduk	Kepada Kepala BKKBN PTM Perwakilan BKKBN DIY Pemda kab. Kulon Progo Mitra kerja
2	Menyusun konsep kerjasama	Akhir November		Masing-masing kedeputian
3	Penyusunan <i>project document</i> yang umum	12 Desember (Wisuda Akademik Keluarga Hebat) 16 Desember (Dithanrem Adujak)		Outline umum proposal disusun oleh mitra bersama seluruh komponen terkait dengan menelaah konsep dari mitra
4	Penyusunan rencana kerja bersama masing-masing kedeputian (komponen terkait)			Oleh masing-masing komponen terkait dengan mitra
5	Pelaksanaan <i>project</i>			Terkait rencana kerja yang disepakati



Nomor : *10/14* PD.01/D4/2019 31 Oktober 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Rapat Inventarisasi Tenaga Fungsional**

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Administrator di Lingkungan Ditdamduk
2. Para Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditdamduk

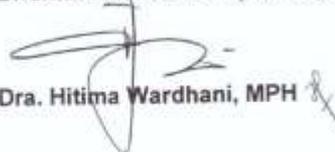
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor 2471/KP.04.06/B2/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Pendataan Kebutuhan Jabatan Fungsional, kami mengundang seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Analisis Dampak Kependudukan untuk hadir dalam rapat inventarisasi tenaga fungsional yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 November 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Gd. Halim 2 BKKBN Lt. Dasar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan,


Dra. Hitima Wardhani, MPH

Tembusan :

- Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (sebagai laporan)

DAFTAR HADIR
UNDANGAN RAPAT INVENTARISASI TENAGA FUNGSIONAL

Tanggal : 1 November 2019

NO	NAMA	ASAL PESERTA/KOMPONEN	TANDA TANGAN
1	Hilma W	Damsel	1.
2	Yossizal	DAMSAL	2.
3	Yana Lajana	Damsal	3.
4	Pawa	Ditdamduk	4.
5	Nuwit	Ditdamduk	5.
6	Komari	Ditdamduk	6.
7	Reni Ardianti	Ditdamduk	7.
8	R. RORO ENRANG . 4 .		8.
9	Sunartati	Ditdamduk	9.
10	Rachma Dwi Ardiana		10.
11	Devi Novitasari		11.
12	Nurul Sapitri		12.
13	Wasi R.	Biru	13.
14	Warmo	-	14.
15	Roni		15.
16	Alisa F. Zain	Biru	16.
17	Panda Gila	Biru	17.
18	emita	"	18.
19			19.
20			20.

NOTULENSI

RAPAT INVENTARISASI JABATAN FUNGSIONAL

Hari/Tanggal : Jum'at, 1 November 2019

Tempat : Ruang Rapat Ditdamduk

Waktu : 09.00 s/d selesai

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

No.	Pembahas	Keterangan
1.	Bu Hitima	<ul style="list-style-type: none">• Pagi ini saya meminta kepada Ibu Roro untuk masing-masing komponen mengidentifikasi jabatan fungsional setelah Ibu Roro dan Ibu Ani sudah mengikuti kegiatan dari Bipeg. Rapat ini bertujuan untuk meminta masukan inventarisasi karena harus diserahkan sebelum tanggal 4 November.• Seiring arahan presiden, yang saya tangkap dan saya baca di grup ke deputian, Menpan serius menggarap reformasi birokrasi.• Silakan Bu Roro memberikan arahan yang lebih teknis.
2.	Bu Roro	<ul style="list-style-type: none">• Selamat Pagi. Sebelumnya saya sudah berkonsul ke bipeg,<ol style="list-style-type: none">1. Bipeg akan mendata kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional tertentu. Kita melihat jft ini pada Menpan RB No. 41 Tahun 2017 yang jumlahnya 499 halaman. Sepulang dari Ciputra kita diagendakan untuk mengisi standar kompetensi jabatan. Kompetensi teknis akan ada yang hilang.2. Damduk menyesuaikan dengan restrukturisasi penyebutan nama yang baru dengan jumlah Subdit terbaru, yaitu 2 subdit. Kemarin kami sudah mengisi restrukturisasi baru untuk eselon 2 dan 3 tapi ada yang belum diisi yaitu ikhtisar jabatan dan indikator.
3.	Bu Hitima	<ul style="list-style-type: none">• Apa ada kaitan dengan surat dari pak Taufik, fungsional apa saja yang dibutuhkan? Apakah ada kualifikasi dan matriksnya?

4.	Bu Roro	<ul style="list-style-type: none"> Jabatan fungsional yang dibutuhkan adalah JFT. Artinya, yang dibutuhkan adalah pelaksana. Dari bipeg tidak ada matriks dan kualifikasi. Bipeg meminta beberapa kompetensi teknis dihapus.
5.	Bu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> Saya berharap ada JFT yang berkaitan dengan subdit kita. Misal Analis Politik, Analis Hankam, Analis Ekonomi, dll. Bisa kita usulkan dari kebutuhan di KKBPK dulu, berikut yang akan kita usulkan pilihan dari Permenpan RB: <ul style="list-style-type: none"> Politik <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksa pelayanan keluarga berencana (Jika kita bicarakan poleksoshankam, KB dan PK) Pengawas kependudukan (Jika dikaitkan peringatan dini) Pengelola data pengendalian masyarakat Penyusun bahan data kependudukan dan KB Penyusun kependudukan dan KB Analisis forum kewaspadaan dini masyarakat Analisis Pertahanan dan Keamanan Pengendalian Penduduk <ol style="list-style-type: none"> Analisis kesejahteraan rakyat Analisis kesejahteraan keluarga Analisis ketahanan keluarga Penyusun kependudukan dan KB
6.	Bu Roro	<ul style="list-style-type: none"> Untuk melihat per sub bidang, kita bisa mengacu pada SKJ di kolom pendidikan.
7.	Bu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> Nanti dicari lagi di Permenpan No. 41 jabatan mana yang masih berkaitan dengan pengendalian penduduk dan sesuai dengan subdit kita yaitu politik, pertahanan, sosial, dan ekonomi. Dimasukan saja dulu semuanya yang masih berkaitan, nanti baru kita pilih-pilih lagi di rapat selanjutnya.

Tindak Lanjut :

- Membuat matriks jabatan yang dibutuhkan dengan mengacu pada Permenpan No. 41 Tahun 2018

DOKUMENTASI



**NOTULEN RAPAT PERSIAPAN DISEMINASI
HASIL KAJIAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN**

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2019

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Ditudamduk

Pimpinan : Slamet Sutiyono, S.Sos

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Slamet Sutiyono	<ul style="list-style-type: none"> • Assalamu alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak /Ibu sekalian yang saya banggakan. Salam dari Ibu Direktur yang berhalangan datang. Saya buka rapat persiapan diseminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan. • Acara diseminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan ini akan dihadiri berbagai kementerian/lembaga yang terkait. • Acara ini sangat berarti karena output kita ini langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan ini cukup besar karena merupakan pemaparan dari model yang berhasil kita kerjakan. • Rundown kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> -Jam 08.00 Regis dan pemberian snack kotak. -Jam 8.30 Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dipandu MC (oleh Birum) dan Dirigen (Mba Endah). • Info ter-<i>update</i> Pak Kepala menuju Gorontalo pada Hari Selasa sampai dengan Hari Kamis sehingga slot untuk arahan akan digantikan Bu Deputi. • Ruang rapat akan dibentuk <i>roundtable</i> dengan peserta berjumlah 180 yang terdiri dari 22 provinsi dan kementerian/lembaga. • Ada 2 panel: <ul style="list-style-type: none"> -Panel pertama dimulai Jam 9.30 dimoderatori oleh Pak Taufik dengan Narasumber Bu Kasmiyati dan bu Ani didampingi pakar -Panel kedua dimulai Jam 13.00 dimoderatori oleh Pak Wahidin dengan Narasumber dari Yayasan Cipta dan Pak Yosrizal.
2.	Ibu Diah	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah memungkinkan adanya waktu <i>break</i> untuk digunakan doorstop dari Humas. • Mohon kirimkan daftar tamu undangan kementerian dan lembaga untuk pengaturan kursi tamu.

3.	Slamet Sutyono	<ul style="list-style-type: none"> • Kaitannya dengan <i>doorstop</i> akan kami sampaikan ke Bu Direktur. Kalau bisa kami usulkan di saat acara diskusi berlangsung.
4.	Bu Ening	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk keperluan peralatan, 1 <i>roundtable</i> dapat dipergunakan untuk 6 orang. Biasanya, pelaksana kegiatan perlu menyewa <i>cover</i> meja <i>roundtable</i> dari catering karena kita tidak menyediakan <i>cover</i>, kita hanya menyediakan <i>roundtable</i> saja yang jumlahnya hanya ada 15 item. Jika undangannya 180 peserta akan dibuat <i>roundtable</i> semua maka perlu ditambah <i>roundtable</i> sejumlah 15 item lagi. • Untuk sesi makan siang, apakah makan dilangsungkan diatas jika VIP dipisah berarti <i>roundtable</i> pun akan berkurang.
5.	Bu Reni	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk konsumsi akan diarahkan kemana? Apakah bisa di selasar kanan? Dan VIP di samping kanan. • Saya usulkan bisa coffee break diatas. Jika pertimbangannya karena alasan kebersihan yang tidak memungkinkan, kami akan upayakan dengan menggunakan gelas kertas.
6.	Bu Ening	<ul style="list-style-type: none"> • Kita sedang menertibkan jika ada mitra yang ingin mengadakan acara, perlu menggandeng 1 biro. • Kami jadwalkan setting untuk persiapan diseminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan setelah penyerahan DIPA. • Untuk perihal Backdrop, bisa ditanyakan ke Mas Aji Utomo. • Saya sarankan pembicara diberikan meja pembicara di atas panggung. • Podium tetap dibawah untuk acara pembukaan. • Ruang makan di depan serbaguna kosong karena acara anjab dari Bihom tidak memakai aula serbaguna karena di hari Rabu acara tersebut pindah ke Ruang NKKBS. • Mohon kirimkan perwakilan dari Damduk dari persidangan, Mba Roro Mba Wiwik dan Pak Mardi.
7	Slamet Sutyono	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk sementara, pemisahan/penggabungan VIP akan diputuskan oleh Bu Direktur. • Terdapat 5 Wartawan: Kompas, Media Indonesia, Antara, Suara Pembaharuan, RRI. • Roundtable variasi dengan meja panjang. • Untuk koordinasi dengan Ditvokom, dokumentasi saja yang dibutuhkan. • Bahan-bahan materi kirim ke BIHOM
8	Bu Ening	<ul style="list-style-type: none"> • Masukan untuk warna <i>cover</i> meja <i>roundtable</i> : silver

		<p>/ biru / putih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tambahan meja roundtable karena BKKBN hanya punya 15. • Biren akan memakai <i>minigarden</i> diusahakan dipakai Damduk jika masih <i>fresh</i>. • Setting persiapan diseminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan dijadwalkan 26 November 2019 jam 16.00 (PIC : Bu Wiwik dan Bu Roro) • Prasmanan tidak masuk <i>rate</i> SBM sehingga pasti <i>rate</i>-nya di atasnya. Maharani juga pasti di atas menu. • Pelayanan tambahan untuk sewa taplak dan minigarden (1,5 juta) berdiri sendiri.
9	Bu Reni	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Panel menggunakan sofa atau meja?
10	Bu Diah	<ul style="list-style-type: none"> • Audiens langsung <i>roundtable</i>, pemapar menggunakan 4 kursi, kecuali talkshow menggunakan sofa.
11	Slamet Sutyono	<ul style="list-style-type: none"> • Saya akhiri, ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi ulang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wa salamualaikum wr.wb

Tindak Lanjut:

1. Kirimkan daftar tamu undangan kementerian dan lembaga ke BIRUM untuk pengaturan kursi tamu.
2. Pesan Cover ke Catering
3. Setting persiapan diseminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan dijadwalkan 26 November 2019 jam 16.00 (PIC : Bu Wiwik dan Bu Roro)
4. Bahan-bahan materi paparan kirim ke BIHOM.

DOKUMENTASI









Nomor : 1074/PD.01/D4/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Rapat Inventarisasi Tenaga Fungsional**

31 Oktober 2019

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Administrator di Lingkungan Ditdamduk
2. Para Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditdamduk

di-

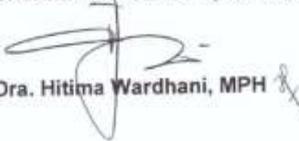
Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor 2471/KP.04.06/B2/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Pendataan Kebutuhan Jabatan Fungsional, kami mengundang seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Analisis Dampak Kependudukan untuk hadir dalam rapat inventarisasi tenaga fungsional yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 November 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Gd. Halim 2 BKKBN Lt. Dasar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan,



Dra. Hitima Wardhani, MPH

Tembusan :

- Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (sebagai laporan)



Jakarta, // November 2019

Nomor : //K39/TU.302/D4/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Pertemuan **Diseminasi**
Hasil Kajian Analisis Dampak Kependudukan.

Kepada Yth,

1. **Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi**
2. **Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta**

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil kajian analisis dampak kependudukan, maka kami akan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh Direktorat Analisis Dampak Kependudukan tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran kasubdit Analisis Dampak Kependudukan Provinsi dengan biaya mandiri apabila masih tersedia dana di masing-masing provinsi. Pertemuan akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 November 2019
Jam : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium BKKBN
Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, 13650

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,

Dr. Ir. Dwi Listyawardhani, M.Sc, Dip.Com

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 PO BOX : 296 JKT 13013
Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>



Nomor : ~~lt/~~YPD.01/D4/2019 31 Oktober 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Rapat Inventarisasi Tenaga Fungsional**

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Administrator di Lingkungan Ditdamduk
2. Para Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditdamduk

di-

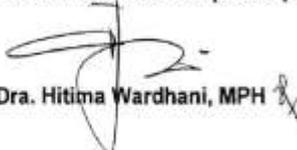
Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor 2471/KP.04.06/B2/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Pendataan Kebutuhan Jabatan Fungsional, kami mengundang seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Analisis Dampak Kependudukan untuk hadir dalam rapat inventarisasi tenaga fungsional yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 November 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Gd. Halim 2 BKKBN Lt. Dasar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan,


Dra. Hitima Wardhani, MPH

Tembusan :

- PIt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (sebagai laporan)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 PO BOX : 296 JKT 13013
Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>



Nomor : ~~lt/~~IPD.01/D4/2019 31 Oktober 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Undangan Rapat Inventarisasi Tenaga Fungsional**

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Administrator di Lingkungan Ditdamduk
2. Para Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditdamduk

di-

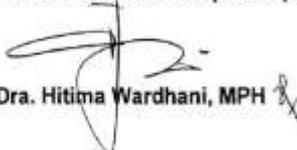
Tempat

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor 2471/KP.04.06/B2/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Pendataan Kebutuhan Jabatan Fungsional, kami mengundang seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Direktorat Analisis Dampak Kependudukan untuk hadir dalam rapat inventarisasi tenaga fungsional yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 1 November 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
Gd. Halim 2 BKKBN Lt. Dasar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Analisis Dampak Kependudukan,


Dra. Hitima Wardhani, MPH

Tembusan :

- PIt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (sebagai laporan)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650 PO BOX : 296 JKT 13013
Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>



Nomor: 117/I/PD.404/D4/2019

Sehubungan dengan akan diladakannya Diseminasi Hasil Kajian Analisis Dampak Penduduk Bagi Mitra yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, maka dengan ini ditugaskan nama-nama di bawah ini untuk menjadi Panitia Pelaksana kegiatan tersebut.

A. Panitia Pengarah

Penanggungjawab : Direktur Analisis Dampak Kependudukan

B. Panitia Pelaksana

Ketua Pelaksana : Slamet Sutiyono, S.Sos
Wakil Ketua : Ir. Yos Rizal
Sekretaris : Muktiani A Suryanigrum, S.Sos., MPH

C. Bidang-bidang

1. Sekretariat

a. Koordinator : Slamet Sutiyono, S.Sos
b. Anggota : Reni Ardianti, S.Kom., M.Si
Novie Panda Citra, S.Sos
Devi Novitasari, SE

2. Materi

a. Koordinator : Muktiani A Suryanigrum, S.Sos., MPH
b. Anggota : Ria Rahayu, S.Si., MSr
Niken Arumsari
Endah Larasati, S.Sos
Kukuh Dwi Setiawan, S.Sos, M.Si

3. Akomodasi dan Konsumsi

a. Koordinator : Pawa Palembang, S.Sos., MM
b. Anggota : Suhartati

4. Humas dan Publikasi

a. Koordinator : Muktiani A Suryanigrum, S.Sos., MPH
b. Anggota : Endah Larasati

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Jl. Permata No. 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650 PO.BOX : 296 JKT 13013
Telp. : (021) 8098018, 8009029-45-53-69-77-85 Fax. : (021) 8008554 Website : <http://www.bkkbn.go.id>

NOTULEN DISEMINASI HASIL KAJIAN

ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN BAGI MITRA TAHUN 2019

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2019

Tempat : Ruang Auditorium

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Direktur Ditdamduk	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan diseminasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan penyebaran hasil kajian analisis dampak kependudukan yang bekerja sama dengan pakar, mitra kerja, dan akademisi.• Kegiatan ini di latar belakang berdasarkan peraturan kepala BKKBN yang didalamnya terdapat salah satu tugas ditdamduk yaitu menyiapkan kajian model solusi strategis dengan memperhatikan isu-isu kependudukan yang berkembang saat ini, meningkatkan komitmen pemerintah dalam menangani isu-isu kependudukan dan meningkatkan jejaring kemitraan• Materi yang akan disampaikan:<ol style="list-style-type: none">a. Bu Kasmiyati : Bonus Demografib. Pak Dimas : Sistem Informasi Peringatan Dinic. Bu Ine : Klasifikasi Kampung KBd. Pak Imam : Sistem Pelaporan Rumah Data
2	Deputi Dalduk	<ul style="list-style-type: none">• Mulai tahun depan kita sangat dituntut segala sesuatu yang di lakukan di pusat bisa langsung diterapkan di lapangan.• Kajian yang sudah dikaji akan dituangkan ke rencana induk rencana kerja masing-masing• Beberapa provinsi belum memiliki <i>grand design</i>.• Upaya kita menangani bonus demografi dalam memfasilitasi K/L terkait disambut dengan baik namun di kab/kota belum menangani bonus demografi karena belum memiliki data yang lengkap.• Pengendalian penduduk di kabupaten/kota masih sangat baru.• Pertumbuhan penduduk di kabupaten Lamongan hasilnya minus tetapi pembangunan daerahnya bagus dan masyarakatnya semakin terpacu dengan

		<p>adanya migrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papua & Papua Barat sudah mengalami bonus demografi walaupun anomali, karena bonus demografinya berasal dari penduduk pendatang. Bagi masyarakat Papua, hal ini merupakan ancaman karena apa yang sudah pendatang dapatkan di Papua akan dibawa kembali ke daerahnya masing-masing, bukan untuk membantu mengangkat daerah Papua. Masyarakat Papua tidak bisa menikmati hasil pembangunannya secara langsung. • Salah satu kabupaten di Kalimantan bahkan tidak menerima migran sama sekali. • Sistem Informasi Peringatan Dini harus bisa dibuat sesederhana mungkin agar pemerintah daerah dapat menggunakannya dengan mudah • Tantangan kita adalah sistem informasi terpadu berdasarkan NIK yang masih belum berjalan dengan baik • Kampung KB merupakan <i>quick wins</i> BKKBN. • Kampung KB sudah ada sejak tahun 2015 dan sudah saatnya kita membuat klasifikasi. Kita harus memahami entitas kampung KB satu persatu • Biaya operasional kampung KB tidak sedikit maka sangat disayangkan jika tidak kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas kampung KB. • Yang bertanggung jawab sertifikasi pra nikah menurut menteri menko adalah BKKBN. • Kampung KB bisa menjadi wadah pengenalan sertifikasi bagi calon-calon pengantin. Calon pengantin ini harus mempunyai bekal yang cukup sebelum menikah. • Sertifikasi pra nikah tidak memungut biaya, hanya memberikan bekal dan sosialisasi dalam aspek kehidupan berkeluarga • Rumah data awalnya berada di kampung KB, namun kita berharap bisa di inisiasikan ke seluruh desa. • Data yang berada di Rumah Data Kependudukan harus selalu tersedia/<i>real time</i>. • Para pengelola rumah data sangat terbantu dengan rumah data ini untuk menganalisis permasalahan penduduk mereka dan mendapatkan solusi berdasarkan data tersebut.
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Harapan kami BKKBN bisa bekerja semakin profesional karena apa yang kita hadapi tidak hanya dapat diatasi dengan aspek manajerial. • Kami juga sedang mempersiapkan jabatan fungsional sehingga nanti tidak hanya ada Penyuluh Keluarga Berencana namun akan ada tenaga profesional lainnya. Semoga BKKBN dapat menata organisasi kembali dengan dibantu oleh mitra terkait.
3	Pak Taufik (Moderator)	<ul style="list-style-type: none"> • Kami berharap hasil kajian ini dapat disimak dengan cermat dan hasil yang didapat dapat dipublikasikan ke daerah masing-masing
4	Bu Kasmiyati	<ul style="list-style-type: none"> • Kami dilator belakangi dengan adanya penurunan TFR (survei SDKI). Hal ini merupakan salah satu keberhasilan program KB • CPR meningkat dari 50% menjadi 64%. Jika dilihat dari sasaran renstranya belum tercapai tetapi sudah menghasilkan angka TFR yang semakin menurun • Umur harapan hidup kita semakin lama semakin meningkat. Di tahun 2010 umur harapan hidup Indonesia adalah 69,81 dan tahun 2018 meningkat menjadi 71,2 tahun. • Kelahiran menurun, kematian menurun, sehingga Indonesia sudah mengalami transisi demografi. Namun Pembangunan Kapasitas Manusia masih tertinggal. • Bonus Demografi (Bodem) adalah suatu keadaan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Usia produktif adalah umur 15-64 tahun. • Bodem dapat dinikmati jika tersedia lapangan kerja dan penduduk usia kerja memperoleh lapangan kerja. • Bodem akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asal penduduk usia kerja memperoleh lapangan kerja dan terserap dalam pasar tenaga kerja. • Mencuri adalah salah satu dampak adanya penduduk usia kerja namun tidak memperoleh lapangan pekerjaan • Bodem antar provinsi dibagi 4 tahapan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap transisi demografi lanjut: beban ketergantungan 40-45% b. Tahap transisi demografi sedang berjalan: kalau beban ketergantungannya 46-49%

		<p>c. Tahap Pra Transisi: Beban ketergantungan 50-54%</p> <p>d. Belum ada tanda menuju transisi demografi: beban ketergantungan >55%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusdu melakukan penelitian di Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Utara, hasilnya di tingkat provinsi sebagian perangkat daerah telah memahami bodem sedangkan di Kab/Kota, Bapeda, OPD KB, dinas terkait dan DPRD belum memahami bonus demografi. Sebagian remaja juga masih pilih-pilih kerjaan. • Di Kepulauan Riau, Informan mengetahui tentang situasi dan permasalahan kependudukan di wilayahnya. Persebaran penduduk tidak merata yang hanya terpusat di Kota Batam. Jumlah migrasi yang masuk cukup tinggi dan besarnya jumlah angkatan kerja. • Terkadang pemerintah daerah merencanakan sesuatu tidak berdasarkan dengan data yang akurat • Program antar wilayah belum bersinergi dengan antar sektor karena masing-masing sektor memiliki ego sektor. • Contoh: Di kampung KB masih banyak sektor lain yang tidak ingin ikut terlibat karena merasa program tersebut punya BKKBN. • Di Palu pemerintahannya berhasil melaksanakan program karena masing-masing sektor saling bekerja sama. • NTT, Maluku dan Papua belum ada tanda-tanda tahap bonus demografi. Masih banyak pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki, perkawinan di usia muda, kurangnya pemahaman pemangku kebijakan tentang bonus demografi • Permasalahan yang ada adalah tantangan pencapaian penduduk tumbuh seimbang yang dikaitkan dengan terjadinya bonus demografi, kab/kota terjadi kesenjangan TFR, Pemahaman tentang bonus demografi belum optimal dan belum semua stakeholder memahami tentang kondisi kedaerahannya. • Kami mendatangi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah (Tahap transisi demografi sedang berjalan) dan Sumatera Barat (Pra Transisi). Masing provinsi diambil 4 kab/kota sesuai tahapan • Informasi yang dikumpulkan meliputi identitas informan, kondisi wilayah, apa yang
--	--	--

		<p>sudah dilakukan & yang akan dilakukan kab/kota, kebijakan & kegiatan pokok yang akan dilakukan dan usul & saran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif dan dilaksanakan mulai bulan Mei hingga November 2019 dengan menggunakan anggaran Ditdamduk TA 2019 • Hasil wawancara yang didapat adalah hampir semua informan pernah mendengar bodem kecuali tiga informan legislatif dan dua informan eksekutif. Sosialisasi bodem pernah dilakukan walaupun belum pernah terima buku Analisa Dampak Pengendalian Penduduk. Sebagian informan mengatakan memperoleh istilah bodem dari membaca maupun mengikuti seminar BKKBN Provinsi • Kondisi data kependudukan berbeda, berdasarkan data di SUPAS, data CPR rendah namun berdasarkan wawancara data CPR sangat tinggi. • IPM meningkat dan di Kebumen ada data TPT yang meningkat. • Manfaat bodem di Kota Padang, penduduk usia produktif yang bekerja semakin banyak, banyak tenaga kerja yang dikirim sebagai pekerja formal di Malaysia dan Jepang • Manfaat bodem di Kota Semarang, dilakukannya pelatihan untuk wirausaha baru setiap bulan sekali selama 10 hari,. Dengan adanya pelatihan diharapkan mereka bisa berwirausaha. • Kebijakan dan kegiatan di Padang lebih ke arah bidang pendidikan dan kewirausahaan. Sedangkan di Sragen fokus mengentaskan 25 ribu pengangguran. Di Tanah Datar ada pembinaan kepada remaja yang merupakan usulan dari anggota DPRDnya sendiri dan di kabupaten Kebumen ada kegiatan SAKINAH PELING yaitu Stop Angka Kematian Ibu dan Bayi Melalui Pedagang Sayur Keliling. • Kebijakan masing-masing wilayah sampel dalam rangka menuju bonus demografi berbeda-beda • Bagi wilayah dengan kondisi bonus demografi tahap lanjut perlu komitmen stakeholder untuk fokus ke penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM. • Bagi wilayah dengan kondisi sedang berjalan,
--	--	--

		<p>perlu pengendalian kelahiran melalui program KB, menyiapkan remaja untuk berfikir merencanakan keluarga dengan dua anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi wilayah dengan kondisi pra transisi, masyarakat dan keluarga perlu memahami pentingnya pengendalian penduduk dan juga pendewasaan usia kawin • Bagi wilayah yang belum ada tanda-tanda ke arah bonus demografi perlu melaksanakan program KB mulai dari awal, melibatkan TOMA TOGA untuk program KB, perlu memahami tentang keluarga kecil, perencanaan keluarga, pemakaian dan penyediaan kontrasepsi dan juga penundaan usia kawin.
5	Pak Taufik	<ul style="list-style-type: none"> • Bodem bukan hanya untuk BKKBN namun juga untuk rekomendasi sektor lain • Bodem bukan hanya jumlah penduduk usia produktifnya namun penduduk produktif dapat menanggung penduduk non produktifnya. • Ada yang sudah masuk tahap bodem dan harus dipertahankan. Transisi demografi harus dipikirkan untuk mengupayakannya.
6	Pak Dimas	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Peringatan Dini fokus mengembangkan model dan untuk keperluan di masa yang akan datang • Yang kami kembangkan masih <i>prototype</i> dan memerlukan kajian-kajian dampak kependudukan lebih dalam • Kajian yang kita kembangkan baru 3 komponen yaitu ekonomi, pendidikan dan lapangan kerja • Ketika lapangan kerja tidak terpenuhi maka kondisi ekonominya pun menjadi kurang baik • Tujuan kami dalam mengembangkan ini adalah menyediakan alat bantu sistem peringatan dini • Langkah teknis yang dilakukan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan modelling. b. Menentukan parameter sistem peringatan dini c. Mengembangkan visualisasi sederhana d. Melibatkan pmda dalam memantau dan mengembangkan program • Pengembangan proyeksi ini bekerja sama dengan direktorat lain yang sama-sama mengembangkan sistem dengan

		<p>menggunakan spectrum & FPET.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masalah yang dihadapi adalah sulitnya ketersediaan data di level bawah • Kami sudah melakukan uji coba di Jawa Barat dan Jogja dengan melibatkan sektor terkait. • Di Jogja ada masalah penyerapan tenaga kerja. Banyak yang tidak mau bekerja di Jogja karena UMRnya sangat rendah sehingga mereka lebih memilih mencari pekerjaan di luar Jogja. • Kami punya alat instrumen kependudukan tapi ternyata di level bawah sulit untuk memakainya sehingga kita butuh ada yang menjembatani. • Program pengembangan di kabupaten menjadi tantangan karena hanya ada di beberapa kab. • Data dasar mengambil data yang sudah ada di Nasional yaitu data provinsi. • Aplikasi yang kami buat bernama SIPINTAR • Untuk mengakses aplikasi ini butuh registrasi. • Di dalam aplikasi cukup melihat piramida penduduk untuk melihat potensi masalah • Kami juga memberikan wawasan program KB kedepannya. • Di dalam <i>dashboard</i> akan ada parameter yang berwarna merah, kuning, hijau. Merah berarti memiliki dampak sedangkan hijau berarti aman • Proses pengembangan ke depannya hasil proyeksi penduduk harus divalidasi kembali dengan melibatkan ditrenduk, mengintegrasikan alat bantu ini dengan alat bantu lain yang ada di BKKBN, penetapan batasan dampak, mengakomodir kebutuhan daerah untuk mengembangkan kajian spesifik sesuai situasi tiap daerah, membuat tampilan yang user friendly dan memvisualisasikan data.
7	Pak Sudibyo	<ul style="list-style-type: none"> • Bodem bukan hanya mencapai tetapi juga mempertahankan untuk periode yang lama. Mencapai bodem dengan cara pengendalian penduduk dan mempertahankan bodem juga dengan pengendalian penduduk namun dengan cara yang bijak. • Ada 4 hal yang penting : <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana lapangan kerja tersedia untuk penduduk usia produktif b. Proporsi perempuan yang bekerja

		<p>c. Cara meningkatkan kualitas SDM</p> <p>d. Upaya pemda untuk menggiatkan tabungan dalam rumah tangga</p> <p>Tolong analisa bodem tadi digiring ke empat hal ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel yang ada di data provinsi belum tentu sama dengan variabel di daerah, hal tersebut bisa menjadi tidak penting bagi pihak lainnya. Oleh sebab itu variabel perlu di uji coba di masing-masing wilayah tapi tetap harus ada variabel pokok yang tidak boleh dihilangkan.
8	Bu Oce	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana jika suatu daerah tidak mendapat bonus demografi, hanya mendapatkan “posisi” bodem? • Apa kebijakan yang bisa kita ambil untuk memanfaatkan bodem? • Data tidak sampai ke level bawah, jika bisa akan sangat bagus sekali untuk pemerintahan daerah dalam grand design pembangunan kependudukan. Pembelajaran ini perlu diberi pelajaran sebaik-baiknya agar tidak asal-asalan dalam input data
9	Yayasan Cipta	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana follow up dari itu semua? • Bagaimana kalau kita mendorong provinsi, kabupaten dan kota untuk menginput tapi dengan standarisasi input tertentu karena kalau semua dibebankan ke pusat akan sangat berat
10	Pak Farid (Kemendagri)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tools</i> nanti di connect ke pemerintah daerah. Kalau bisa ada notifikasi dalam android yang menyatakan kondisi suatu daerah jika kita berada di daerah tersebut
11	Pak Ewang (BKKBN DIY)	<ul style="list-style-type: none"> • Apa memungkinkan dapat bodem jika sekarang belum dapat bodem? Jika memungkinkan, butuh waktu berapa lama? • Yang sudah dapat bodem, bagaimana mempertahankannya? Apa yang perlu dipersiapkan? • Apa memungkinkan <i>tools</i> dimanfaatkan di seluruh kampung KB ?
12	Pak Badrun (Koalisi)	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah variabel kependudukan sudah ditempatkan di perencanaan? • Dalam variabel yang ada di IPM, sejauh mana pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, angka angkatan kerja, tingkat pengangguran? • Angka mortalitas & fertilitas? • Berapa besar penduduk yang berpendidikan

		tinggi? <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja yang dibutuhkan angkatan kerja terkait dengan potensi wilayah?
13	Bu Kasmiyati	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam analisis yang belum masuk dari 4 hal penting menurut pak Dibyو adalah tabungan dalam masyarakat. • Di laporan lengkap, ada di dalam bab 5 hasil dan pembahasan. Jika ada yang kurang akan saya konsultasikan dengan bu oce • Perlu advokasi dan KIE untuk <i>follow up</i> pemerintahan daerah. Saya sangat setuju tentang <i>follow up</i> yang harus dilakukan setelah terjadi bodem • Kulon progo bisa mendapatkan bodem karena adanya bandara baru namun perlu dilihat tentang usia penduduk, TFR dihitung berdasarkan kab/kota Untuk mempertahankan bodem, harus mempertahankan TFR dengan bijak. • Kami juga prihatin ada 3 dari 10 anggota legislatif yang belum pernah mendengar bodem. Data IPM dan tingkat pendidikan ada lengkap, tapi data yang tidak ada adalah data mortalitas dan fertilitas.
14	Pak Dimas	<ul style="list-style-type: none"> • Saya sangat setuju variabel perlu adanya justifikasi dan kajian khusus terkait situasi lokal. • Tools ini mirip dengan rapid namun rapid tidak kompatibel dengan isu kependudukan yang ada di Indonesia. Tools ini dikembangkan dengan user friendly. • GDPK memang berbasis masyarakat, selain pengembangan juga perlu penguatan modelling • Perhitungan tools ini dimiliki oleh teman provinsi, kab/kota namun <i>research spectrum</i> belum memadai sehingga kami memutuskan pusat untuk mengumpulkan data dasar. Saya setuju mereka dilibatkan namun porsinya mungkin yang harus di rencanakan. • Data yang terkoneksi adalah yang kita cita-citakan. Data yang kita lihat hanya dari google, padahal mungkin K/L punya data sampai kab/kota. Masukan tersebut sangat baik. Kita butuh kerjasama terkait data tersebut • Data sangat bisa dimanfaatkan di level kampung KB. • Angkatan kerja yang bisa dikaitkan dengan

		<p>potensi wilayah itu terjawab saat kami di DIY. DIY potensi wilayahnya adalah pariwisata sehingga yang perlu disiapkan adalah pariwisatanya. Masyarakat jogja lebih tertarik menjadi <i>guide</i> atau pembuat <i>souvenir</i> sehingga perlu disesuaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator harus berbeda di setiap wilayahnya agar lebih sensitif di setiap daerahnya tanpa menghilangkan indikator utamanya.
15	Bu Ine	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung KB idenya merupakan multi sektor • Masalah strategis yang ada di kampung KB adalah komitmen pemda terhadap kampung KB, belum maksimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan program, integrasi program dan kegiatan lintas sector tidak sama, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan di kampung KB. • Klasifikasi ini dibuat sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan kampung KB yang berkualitas dan komprehensif • Referensi Klasifikasi menggunakan <i>Institutional Development Framework</i> (IDF). IDF dibuat untuk organisasi yang memberikan pelayanan langsung. • Menitikberatkan pada proses partisipatif dan mandiri karena akan dikerjakan oleh Pokja dengan menggunakan mekanisme kampung KB online. • Variabel : <i>Input, Process, Output</i> • Kami mengusulkan tambahan variabel jumlah kematian ibu, bayi, angka stunting, KDRT dan usia perkawinan pertama. • Kami menggunakan klasifikasi menggunakan indeks, menghitung indeks dengan bobot dan bobotnya merupakan usulan dari kami. • Terdapat 4 tingkat penilaian dari masing-masing indicator: Kurang, Cukup, Bagus, Sangat Bagus • Rumus perhitungan indeks klasifikasi kampung KB akan disinergiskan di laporan kampung kb online. • Jenis Klasifikasi kampung KB: Dasar, Berkembang, Mandiri, Berkelanjutan • Tingkat penilaian dinilai oleh diri sendiri (<i>self assessment</i>) • Masing-masing variabel akan di totalkan lalu dibagi dengan jumlah bobot • Uji coba kampung KB dilakukan di 2 desa di kab. Badung, Provinsi Bali & 3 desa di Kab.

		<p>Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil uji coba menyatakan: Desa Penarungan & Desa dalung masuk klasifikasi Berkelanjutan, sedangkan desa Jambewangi, Sumbergondo dan Wringinagung masuk kllasifikasi Dasar • Klasifikasi dilakukan secara mandiri dan partisipatif oleh pokja kampung KB dibantu PKB/PLKB • Hasil klasifikasi di laporkan ke kampung kb online dan hasilnya di verifikasi saat monev yang dilakukan oleh OPD KB, BKKBN Perwakilan Provinsi, dan BKKBN Pusat di lokus Kampung KB yang telah terklasifikasi • Dari 5 kampung kb yang di uji coba belum semua melaporkan online secara rutin dan lengkap. • Model klasifikasi kampung KB bisa diimplementasi jika: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kampung KB online direvisi sesuai dengan matriks klasifikasi Kampung KB - Disepakatinya indikator, bobot, tingkat penilaian serta perhitungan indeks klasifikasi Kampung KB ditingkat BKKBN Pusat - Menyusun strategi penguatan Kampung KB, di berbagai tingkatan mulai dari tingkat nasional sampai desa, termasuk perangkat monitoring dan evaluasinya.
16	Pak Yos	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Data dicanangkan setahun setelah kampung KB dicanangkan • Permasalahannya adalah birokrasi terlalu panjang (pemilik kewenangan di pusat, pelaksana di tingkat desa), model pengelolaan melibatkan begitu banyak stakeholder. • Tujuan utama pengembangan system pelaporan dan evaluasi program Rumah Dataku adalah terwujudnya sistem pelaporan rumah dataku • Yang menjadi keterbatasan adalah keterikatannya dengan model program rumah dataku, hal ini menyebabkan metode yang dibangun tidak dapat dilepaskan dan akan sangat menyesuaikan dengan model final dari program rumah dataku • Kondisi saat ini terdapat 4.504 rumah data yang terbentuk. Tidak tersedianya mekanisme pencatatan, pengendalian dan evaluasi yang baik. Belum ada sistem evaluasi program

		<p>berjalan dan hanya ada data kuantitatif jumlah rumah dataku, belum ada kualitas rumah dataku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Kebutuhan evaluasi bukan hanya pada evaluasi akhir namun juga saat “proses belajar” •Jenis evaluasi yang berefek pada pemberdayaan pada masyarakat seperti aspek <i>capacity building</i>, kemampuan mengelola organisasi, peduli lingkungan dan pemanfaatan data. • Jika rumah dataku berjalan maka masyarakat bisa menjalankan program ini secara mandiri •Teknik pengumpulan data dengan observasi dan diskusi dengan Pengurus, OPD KB, PLKB, Perwakilan BKKBN Provinsi •Uji coba dilakukan di DIY, Jawa Barat dan Jambi •Terdapat 3 indikator uji coba: Indikator substansi, estetika, petunjuk pengisian. •Di lapangan kami menemukan : <ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi yang bervariasi. Ada yang menyatu dengan pokja, secretariat, pojok kependudukan, dan mandiri - Sarana atau Aset Rumah Data digunakan secara bersama - Status hukum Rumah Data : Ada yang diresmikan oleh provinsi, kabupaten, pejabat desa - Stakeholder yang sangat beragam •Kami mengembangkan alat ukur pada identitas, informasi, pengurus, ketersediaan sarana & data rumah dataku •Hasil uji coba di Jabar & Jambi: <ul style="list-style-type: none"> - Peserta FGD kesulitan memahami pertanyaan, maka kami berikan penjelasan di petunjuk pengisian. - Kami juga menawarkan apakah ada yang belum dan perlu dimasukkan ternyata sudah cukup. - Estetikanya sudah cukup baik, rapih, dan nyaman dilihat - Kurang penjelasan jenis data dan pelatihan di dalam petunjuk pengisian. Petunjuk dicetak di belakang formulirnya. - Provinsi diharapkan bisa mensosialisasikan ke kabupaten/kotanya. - Kabupaten/Kota harus mensosialisasikan ke level di bawahnya, kecamatan atau PLKBnya
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Setelah seluruh kader rumah dataku tersosialisasi, <i>form</i> diisi lalu ditanda tangani, diverifikasi oleh PKB/PLKB, akan di verifikasi ulang oleh kecamatan, <i>dirregister</i> ke kab/kota, pengawasan oleh provinsi & pusat • Klasifikasi Rumah Data: Sederhana, Lengkap, Sempurna, Paripurna • Rumah data minimal memiliki papan nama, ada SK dan ada ruangnya. • Program Rumah Dta dilaksanakan secara nasional secara masif. • Sistem pelaporan yang dibuat dengan mengindahkan kenyataan lapangan • Keterlibatan semua <i>stakeholders</i> untuk menjaga keterikatan koordinasi
17	Dinas PAPP	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung KB & Rumah Dataku sama-sama mempunyai 4 klasifikasi tetapi berbeda namanya. Saran kami, semua klasifikasi poktan KKBPK sama semua agar yang di lapangan tidak bingung. • Laporan GALAP kependudukannya tidak ada • Sistem pelaporan pembinaannya dilupakan. Dari pusat langsung ke BKKBN perwakilan, OPD provinsi dilewatkan padahal seharusnya tidak boleh. Provinsilah yang menginformasikannya ke perwakilan. Ini melanggar UU 23 tahun 2014 Yang wajib melaporkan ke BKKBN Pusat adalah OPD Provinsi bukan kab/kota. • Kalau semua harus ada papan nama akan penuh dengan papan nama. Saran saya, cukup 1 papan nama saja mencakup semua.
18	BKKBN DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi rumah data apakah dari pusat atau dari kami? • Banyak sekali poktan KKBPK. Saran saya, klasifikasinya disamakan agar lebih bagus dan sederhana
19	PKB DIY/Ketum Penyuluh KB Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah ada kontribusi kampung KB? • Harus ada evaluasi yang jelas sebelum dan sesudah dilaksanakan • Pola pembinaan kampung KB melibatkan semua instansi kab/kota, kenyataan di lapangan hanya PKB dan OPD KB. Harus dievaluasi sehingga semua dinas terkait bisa membina kampung KB • Anggaran Kampung KB bisa diperluas. Selama ini hanya untuk pertemuan padahal banyak kegiatan atau ide kreatif dari pengurus.

		<ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa masyarakat yang tidak menyukai kampung KB sehingga menjadi tantangan bagi kami • Indikator kampung KB sudah saatnya diganti. Selama ini wilayah kumuh, pengangguran, peserta KB sedikit. Kalau semakin lama semakin banyak kampung KB berarti program pemerintah tidak berhasil. Harus dipikirkan ke depannya. • Ada kampung KB yang tidak di anggarkan pemerintah tapi berhasil karena adanya dukungan dari masyarakat. Mereka memakai anggaran swadaya masyarakat. • Dengan adanya kampung kb, telah menjadi pusat perkenomian baru di suatu daerah. Ini yang diharapkan sehingga harus ada parameter yang berubah. • Terlalu banyak kampung-kampung (kampung kb, kampung wisata, kampung ramah anak), kenapa tidak dijadikan satu pembinaan? • Klasifikasi perlu sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat khususnya PKB. • Harapan saya pertemuan seperti ini yang diundang PKBnya • Kenapa kepengurusan rumah data tidak menjadi satu dengan kepengurusan kampung KB agar tidak ada dua kepemimpinan dalam satu lokasi
20	Dinas Dukupil	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung KB terdapat variabel angka kelahiran dan kematian ibu dan bayi, ini sangat membantu dinas dukcapil. • Rumah data mempunyai data jumlah penduduk tapi ada NIK. NIK tidak boleh disebarluaskan dan ada sanksinya di UU. Boleh memakai nama, alamat dan lainnya tapi isi NIK tidak boleh karena merupakan data pribadi seseorang.
21	Pak Badrun	<ul style="list-style-type: none"> • Apa dampak rumah data sebagai gambaran kampung KB? • Apakah ada data sosial dan ekonomi yang akan dijadikan klasifikasi kampung KB? • Setiap keluarga harus mempunyai dokumen data yang baik dalam 1 tempat.
22	Bu Ine	<ul style="list-style-type: none"> • Kita akan diskusikan untuk penamaan klasifikasi agar di samakan • Kampung KB pernah dilakukan evaluasi. Masalahnya komitmen pemerintah daerah yang belum sama, pemanfaatan belum optimal, koordinasi lintas sektor belum

		<p>optimal, rendahnya partisipasi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih ada temuan kampung KB terbentuk tapi tidak ada kegiatan, Pokja terbentuk tapi tidak ada kegiatan. • Klasifikasi kampung KB ini belum final. Kalau sudah final, baru di sosialisasikan. • Beberapa kampung KB menjadi desa yang bagus dan pertumbuhan ekonominya menjadi baik sehingga bisa dikategorikannya berhasil. • Masih menunggu usulan yang mengacu RPJMN • Usulan indikator sosial ekonomi akan di diskusikan
23	Pak Yos	<ul style="list-style-type: none"> • Paripurna muncul di renstra, akan kami sampaikan usulan kesamaan nama • Persyaratan untuk masuk komponen sistem dengan standar SIGA • Tahapan sosialisasi dan pelaporan OPD Provinsi menjadi terlupakan, kami sampaikan permohonan maaf. Tindak lanjutnya akan kami sesuaikan. • Kebijakan daerah tentang pemaduan papan nama di kampung KB dan Rumah Data disesuaikan dengan kondisi yang ada di DKI. • Untuk saran-saran dengan PKB Jogja, banyak keterbatasan dari kebijakan . • Kami ada keterikatan dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya harus lebih banyak forum yang melibatkan PLKB/PKB dan pengguna langsung untuk diajak diskusi. • NIK dibutuhkan untuk kepastian kader berasal dari wilayah tersebut bukan untuk dipublikasikan. • Kader punya kapasitas sangat terbatas, maka data yang mereka hasilkan pun sangat terbatas. Kami berharap masyarakat dapat mendukung program • <i>Family folder</i> memang harus disikapi dan kami berharap dapat di realisasikan di setiap keluarga.
24	Bu Oce	<ul style="list-style-type: none"> • Penyajian hari ini, dua duanya adalah pengembangan yang belum final. • Dua narasumber disini harus diskusi bersama atas masukan-masukan yang disampaikan peserta. • Pelatihan tentu akan dilakukan oleh BKKBN bagi petugas lapangan terkait • Berdasarkan yang disampaikan PKB tadi,

		<p>sektor yang masuk tidak melakukan implementasi hanya menjadi narasumber akan kami cari solusinya. Semua sektor yang ada harus masuk sama sama untuk melaksanakan program.</p>
25	Pak Taufik	<ul style="list-style-type: none"> • Kita mendapatkan informasi tentang penyediaan sistem informasi peringatan dini agar <i>concern</i> aspek kependudukan dalam membuat kebijakan di sektor masing-masing • Dalduk dipercaya menjadi koordinator penyelenggaraan untuk mengharmonisasi kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring. • Semoga Bapak/Ibu bisa memahami dan dapat menindak lanjuti baik dari sisi masukan hasil kajian dan secara teknis. Kami masih membuka masukan hingga akhir tahun ini, setelah itu akan kami publikasikan. Dengan publikasi kami berharap Bapak/Ibu dapat mensosialisasikan ke mitra kerja terkait.

DOKUMENTASI





NOTULENSI RAPAT PENYUSUNAN KLASIFIKASI KAMPUNG KB

Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2019

Tempat : Ruang Rapat Ditdamduk

Pimpinan : Dra. Hitima Wardhani, MPH

NO	PEMBAHAS	KETERANGAN
1	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan rapat hari ini adalah menyepakati indikator yang digunakan sebagai dasar penyusunan klasifikasi kampung KB.• Kampung KB masih perlu penguatan tentang pengelolaan Kampung KB.• Laporan Akhir Kampung KB Tahun 2018: masih perlu penguatan tentang pengelolaan Kampung KB, optimalisasi kegiatan yang berdampak pada peningkatan Program KKBPK, peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala dan terpadu guna memberikan feedback pengembangan program.• Menyusun klasifikasi Kampung KB untuk memetakan permasalahan, kebutuhan dan solusi permasalahan dalam pengelolaan Kampung KB dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Kampung KB yang berkualitas dan komprehensif.• Kemarin kita mencoba turun ke lapangan untuk bertemu pengelola kampung KB dengan lokus di Bali dan Jawa Timur. Seharusnya masih ada satu lagi yaitu Jawa Barat tetapi waktunya tidak cukup.• Jumlah kampung KB saat ini adalah 15.130 Kampung kb.• Pengelolaan Kampung KB masih mengarah kepada capaian secara kuantitatif• Mengingat kembali dari masing-masing komponen untuk

		<p>mengembangkan program dan kebijakan di kampung KB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harapannya di tahun 2022 seluruh kampung KB mempunyai pokja. • Kampung KB sudah dievaluasi oleh BPKP dengan 15 indikator. • Hasil evaluasi kampung KB secara nasional 71,3% (cukup berhasil) • Dari data yang sudah dikumpulkan, kita optimalkan untuk melakukan pemetaan dengan berbasis sistem. • Kita sudah berusaha untuk mengklasifikasikan. Kami butuh masukan dari Bapak/Ibu terkait pengklasifikasian ini karena hasil ini akan di paparkan pada saat diseminasi tanggal 27 November 2019 nanti. • Data yang ada di web adalah data yang sudah dilaporkan. • Di Banyuwangi, saat mereka melaporkan sering terkendala sinyal. Saat <i>entry</i> data sering gagal dan harus <i>entry</i> ulang akibatnya mereka menjadi sering tidak melaporkan. • Cocokan data yang ada di web dan data saat kita turun ke lapangan kemarin. Misal, di web kelompok kegiatan tidak diisi, apakah kenyataannya tidak melakukan kegiatan tersebut atau memang tidak dilaporkan.
2	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Tekait pengelolaan, kampung KB kedepannya akan dikelola oleh bidang dalduk tetapi belum tahu komponen mana. • Kami memperoleh mandat bahwa tidak boleh melihat kampung KB berdasarkan kuantitas tetapi melihat kualitasnya juga. • Kita sudah melakukan <i>need assessment</i> di 2 lokasi. Dari hasil <i>need assessment</i> di 2 provinsi akan kita <i>share</i> hasilnya seperti apa baru nanti kita diskusikan.
3	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Kita melakukan klasifikasi bertujuan untuk pengembangan kampung KB kedepan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kami membagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu dasar, berkembang, mandiri, dan berkelanjutan. • Untuk pengklasifikasikan, kita menggunakan 1 alat monitoring evaluasi yaitu IPF • Dengan adanya pengklasifikasian ini, kami berharap bisa membedakan mana kampung KB yang dasar sekali sampai yang berkelanjutan. • Jika suatu kampung KB sudah dikatakan mandiri, apa kelanjutannya? • Pada kelompok kampung KB berkelanjutan harapannya tidak hanya berjalan saja tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan. • Kami memberikan pembobotan dari 1 sampai 4, mulai dari yang tidak penting sampai sangat penting.
4	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil turun ke lapangan, terdapat perbedaan yang cukup jauh dari kampung KB percontohan dengan kampung KB biasa. • Di kampung KB percontohan, sarana prasarana dan administrasi sudah baik. • Yang menjadi pokok perhatian dan permasalahan adalah mereka masih menyebutkan tentang intervensi lintas sektor dan sumber pendanaan. • Mereka masih menanyakan tentang BOKB. Mereka berharap penggunaannya bisa lebih fleksibel. Mereka ingin BOKb bisa untuk peningkatan pengetahuan kader yang sangat mereka butuhkan. OPD sendiri tidak punya cukup anggaran karena pendanaan terbatas • Terkait sumber pendanaan, bagaimana cara meyakinkan kepala desa untuk memberikan mereka dana. • Permasalahan lainnya adalah Kampung KB Jambewangi yang merupakan juara 2 Nasional masih bertanya-tanya kenapa mereka bisa mendapatkan juara 2 padahal akses jalan ke kampung KB

		<p>belum berhasil dan sinyal masih sangat susah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak hal yang dibutuhkan teman-teman di pokja. Seperti bagaimana meyakinkan pemda untuk meningkatkan kapasitas SDM. Bagaimana juga bisa OPD yang bersangkutan paham tupoksinya terkait kampung KB karena banyak OPD yang tidak terlalu paham kampung KB ini mau dibawa kemana.
5	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu alasan kampung KB Jambewangi tidak bisa menjadi juara 1 adalah karena pelaporan dan sangat rendahnya pencapaian kjp • Sebagai tim penilai, mereka hanya memperlihatkan yang bagus-bagus kepada kami seperti kontribusi pemerintah setempat terkait kampung KB • Mereka juga telah mempunyai inovasi yaitu adanya tim pasukan penjual sayur yang dibiayai oleh kepala desa. • Saran saya, inovasi harus menjadi salah satu indikator dalam pengklasifikasian kampung KB agar bisa menjadi acuan untuk teman-teman lain. • Kalau bisa inovasi dimasukkan dalam klasifikasi kampung KB mandiri atau berkelanjutan supaya terlihat jelas bedanya antara kampung KB dasar hingga berkelanjutan
6	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Kemarin saat kami turun ke lapangan, kami juga menanyakan tentang inovasi yang mereka punya. Seperti yang telah dikatakan, Banyuwangi memiliki inovasi penyediaan sayuran yang diberi nama Langkah Kasih. Mereka juga sedang menggarap program tengok kiri kanan. • Salah satu permasalahan yang ada disana juga adalah terkait UPPKS. Banyak pengrajin kopiah tapi mereka tidak tahu mau dijual kemana dan bagaimana cara memasarkannya. • Kendala yang terdapat disana adalah

		akses menuju kampung KB tersebut & internet yang susah diakses
7	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> • Banyuwangi juga terkenal dengan pariwisata, kami juga telah meminta mereka untuk memanfaatkan dan mempromosikan pariwisatanya
8	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> • Kampung KB Jambewangi heran mengapa mereka bisa mendapat juara 2 Nasional karena menurut mereka masih banyak hal yang kurang dari mereka. • Inovasi baru yang telah mereka laksanakan terkait pariwisata adalah mempromosikan hutan wisata. Program ini sudah berjalan tetapi sarana pendukungnya baru terbangun. • Remaja disana sudah senang ikut menghias tempat wisata baru untuk menarik perhatian wisatawan, tetapi saat mau dipromosikan mereka tidak tahu harus bagaimana dan susahya mengakses internetl.
9	Pak Ari	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau dilihat dari matriks, memang seharusnya setiap kampung KB memiliki inovasi karena masing-masing daerah mempunyai kekhasannya sendiri. • Saran saya, harus ada 1 poin khusus untuk inovasi. Dari inovasi ini bisa dijadikan keunikan di kampung KB masing-masing. • Jambewangi bisa menjadi juara karena paling banyak melaporkan. PLKB mereka rajin melaporkan walaupun sinyal disana sangat susah.
10	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Mungkin kita perlu berdiskusi bersama dengan ditifdok bagaimana membuat aplikasi yang mereka mudah untuk mengakses. • Terkait dengan BOKB, OPD di Banyuwangi kurang terinfokan karena diambil langsung oleh BAPEDA. • Kalau sudah dianggarkan di DAK & BOKB, tidak boleh menganggarkan lagi kecuali yang belum masuk di DAK& BOKB. • Kemarin juga ada pertanyaan apakah

		penerima DAK bisa bergantian karena ada 1 kecamatan yang memiliki 4 kampung KB
11	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kesempatan ini, kita ingin tahu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi kampung KB yang ideal seperti apa 2. Menyocokkan data lapangan dengan data web sehingga kita tahu sejauh mana penyimpangan atau perbedaan data yang ada • Tim sudah mengelompokan, mari kita diskusikan apakah pengelompokan ini sesuai atau tidak
12	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Kita sepakati inovasi masuk ke dalam indikator output • Pembobotan ini menjadi pengukuran bagaimana kampung KB tersebut berkontribusi terhadap pencapaian. • Pembobotan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak Penting 2. Cukup Penting 3. Penting 4. Sangat Penting
13	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> • Poin 1 = SK & Struktur pokja. Kampung KB rata-rata sudah memiliki SK namun bermacam-macam bentuknya dan rinciannya, masih terkesan asal ada. • Jika SK sudah baik, maka pokja juga pasti sudah terbentuk dengan baik
14	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau bisa sampaikan saja seluruh indikator agar semua teman-teman disini bisa langsung tahu semua. Setelah itu kita harus memilah indikator mana yang masuk kategori penting maupun tidak penting.
15	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Kami nanti akan mengambil nilai rata-rata lalu di kuadrankan. Terdapat 4 kuadran yang akan menampilkan posisi kampung KB tersebut. • Harapan kami bisa bekerja sama dengan ditifdok dan bisa mendapatkan data yang dibutuhkan untuk mengklasifikasi.
16	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> • Kira-kira apa yang bisa dilakukan ditifdok untuk berkontribusi?
17	Ibu Emy	<ul style="list-style-type: none"> • Proses <i>upload</i> lama bisa karena waktu

		<p>penguploadan yang bersamaan dengan yang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait data, kami perlu tahu apa saja yang dibutuhkan
18	Pak Adnan	<ul style="list-style-type: none"> • Kami hanya bisa menyediakan data yang diinput di website. Jika ada data yang diinput di website maka ada datanya di kami
19	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Kami berharap bisa mendapatkan data yang terus diperbaharui agar klasifikasi bisa terus berjalan dan bermanfaat
20	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana kami kedepannya akan melakukan <i>input</i> data pada aplikasi secara <i>offline</i> baru setelah itu secara <i>online</i>. • Kami juga mendapatkan data dari ditifdok. Data tersebut kami analisis sendiri satu persatu walaupun memang merepotkan, sehingga kami berencana akan ada aplikasi <i>offline</i>
21	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Kita ingin memasukan indikator yang baru, mau tidak mau harus revisi. • Kami juga mau ada kesepakatan apakah mau menggunakan data yang sudah ada atau mengakomodir indikator dari masing-masing direktorat.
22	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau hanya mengambil data dari website, sangat sedikit. Data yang ada di website hanya berbentuk pernyataan “Ya/Tidak, Ada/Tidak”, susah untuk dipotret.
23	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> • Kita perlu tahu apakah kita hanya ingin apa yang ada saja atau ingin berkembang? Kalau kita ingin berkembang, mungkin hasilnya bisa lebih diperkuat lagi untuk direkomendasikan ke pimpinan.
24	Pak Ridwan	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2020 nanti, Linlap hanya sebagai penggerak dan pendayagunaan PLKB sedangkan untuk pengelolaan kampung KB untuk dalduk • Perlu effort untuk melakukan klasifikasi memetakan 15 ribu kampung KB yang akan dibantu ditifdok. Ketika sudah di klasifikasi, apa kegunaan klasifikasi ini?

		<p>Apa intervensinya? Intervensi harus terukur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi harus terukur, agar pengklasifikasiannya nanti lebih mudah
25	Ibu Hitima	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk intervensi nanti lain lagi. • Dengan adanya klasifikasi ini nantinya bisa diintervensi. Klasifikasi ini sedang mengarah kesana namun intervensi itu adalah langkah selanjutnya nanti. • Dari variabel yang sudah ada, mana saja yang sudah ada di web? Kita harus bisa melakukan berbasis sitem. Silahkan diskusikan mana yang penting dan tidak penting lalu disandingkan dengan data di web. Sehingga selanjutnya kita bisa berkerja lebih intensif dengan ditifdok.
26	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Kita akan menggunakan pelaporan yang sudah ada. Namun pelaporannya harus bisa berubah, tidak hanya ada/tidak ada tetapi juga harus ada rinciannya.
27	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan SK & Pokja hanya ada/tidak di web. • Anggaran kegiatan pokja, memang ada dan bisa dilihat apakah dari APBN, APBD atau dana desa. Tapi opsi di webnya hanya ada jumlah sumber pendanaan seperti 1 atau 2 pendanaan atau 2 atau 3 pendanaan • Kampung KB dengan pokja terlatih, terdapat 3 poin di web dan hanya ada keterangan terlatih atau tidak terlatih. Saya hanya plih 1 poin. • Kepemilikan rencana kerja tahunan, belum ada • Kepemilikan sarana dan prasarana, hanya ya/tidak • Mekop sama dengan yang ada di web • Intervensi program & lintas sektor, sebenarnya ada 3 tapi hanya 1 yang diambil karena datanya bukan berupa presentase tetapi berupa kegiatan. • Untuk bidang KSPK, mengusulkan indikator jumlah keluarga yang aktif dalam BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS. Tapi jika bicara jumlah agak

		sulit. Lebih baik prosentase saja.
28	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau hanya berdasarkan web, sangat susah diklasifikasikan. • Kalau hanya ya/tidak, damduk bisa mengerjakan sendiri. • Saran saya, berikan 2 opsi kepada pimpinan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika hanya berdasar web, ini hasilnya. 2. Jika ingin yang lebih bagus, berikan rekomendasi yang bagus.
29	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Jika ingin berdasarkan web bisa ambil dari hasil BPKP juga. • Idealnya untuk pengembangan kedepan, kita pakai pengklasifikasian yang baru
30	Pak Ridwan	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang mau dilihat dari sumber data ke deputian KSPK atau sumber data di pelaporan? Takutnya nanti akan ada selisih jumlah.
31	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau sumber data di pelaporan kan secara Nasional, sedangkan yang kita butuhkan hanya pemetaan di kampung KB.
32	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Yang diminta oleh Pak Kepala kedepannya adalah <i>outcome</i>, bukan hanya proses. Kalau partisipasi itu termasuk ke dalam proses. • Untuk sementara, pemetaan kampung KB berdasarkan web.
33	Ibu Sinta	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang KS, jumlah keluarga yg aktif hanya ada atau tidak ada bukan angka, sedangkan indikatornya adalah jumlah, tidak nyambung.
34	Ibu Ika	<ul style="list-style-type: none"> • Ini <i>request</i>/masukan dari KSPK sendiri sesuai surat yang dikirimkan kepada kami. • Mohon diskusikan lagi poin2nya untuk dikoreksi.
35	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Mohon koreksinya dari teman-teman KSPK karena hasil klasifikasi ini akan dipaparkan pada tanggal 27 November 2019 nanti.
36	Ibu Sinta	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau sudah ada tanda tangan deputi KSPK, kami tidak bisa merubah. Tapi tolong jangan difinalisasi dahulu.

37	Ibu Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Sementara kami akan menampilkan data yang ada sesuai dengan keadaan saat ini.
38	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Sebenarnya di panduan money, siapapun komponen yang turun ke lapangan harus menyempatkan ke kampung KB karena ini program bersama. • Pokja pusat juga sebenarnya sudah ada tapi belum berjalan
39	Ibu Wahidah	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah di dalam pelaporan web ada catatannya atau narasinya?
40	Pak Ari	<ul style="list-style-type: none"> • Itu ada di kolom intervensi. Narasinya bisa di cek pada masing-masing ceklis.
41	Ibu Ani	<ul style="list-style-type: none"> • Saya minta tolong bantu data-datanya.
42	Pak Adnan	<ul style="list-style-type: none"> • Di list saja data-data yang dibutuhkan
43	Ibu Nova	<ul style="list-style-type: none"> • PR kedepan, harus ada satu draft terkait SK dan harus tersosialisasikan dengan baik. • Harus ada menu tersendiri bagi orang lapangan untuk input data.
44	Ibu Ani	Terimakasih atas masukan dan kehadiran. Semoga kedepan program kampung KB bisa lebih bermanfaat.

Kesimpulan :

1. Klasifikasi Kampung KB disepakati bersama oleh masing-masing komponen
2. Klasifikasi Kampung KB dibagi menjadi 4, yaitu Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan
3. Pembobotan yang akan dilakukan bernilai 1 hingga 4, dimana :
 - a. Tidak Penting
 - b. Cukup Penting
 - c. Penting
 - d. Sangat Penting
4. Hasil klasifikasi kampung KB akan di paparkan saat diseminasi tanggal 27 November 2019

Rencana Tindak Lanjut :

1. Jika ada koreksi atau masukan terkait klasifikasi kampung KB bisa disampaikan sebelum tanggal 27 November 2019
2. List data yang diperlukan untuk dimintakan kepada ditifdok
3. Klasifikasi berdasarkan data website dan akan disandingkan dengan data BPKP

DOKUMENTASI



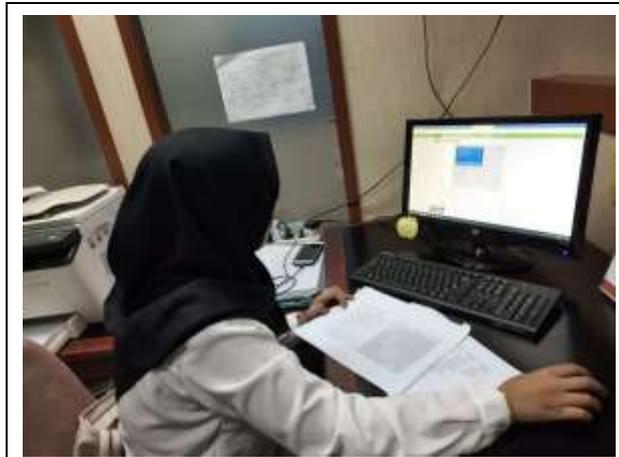
Lampiran 4

Fotokopi/*Scan* Sertifikat mengikuti Orientasi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang di Pusdikzi selama 1 minggu. (Belum Memperoleh)

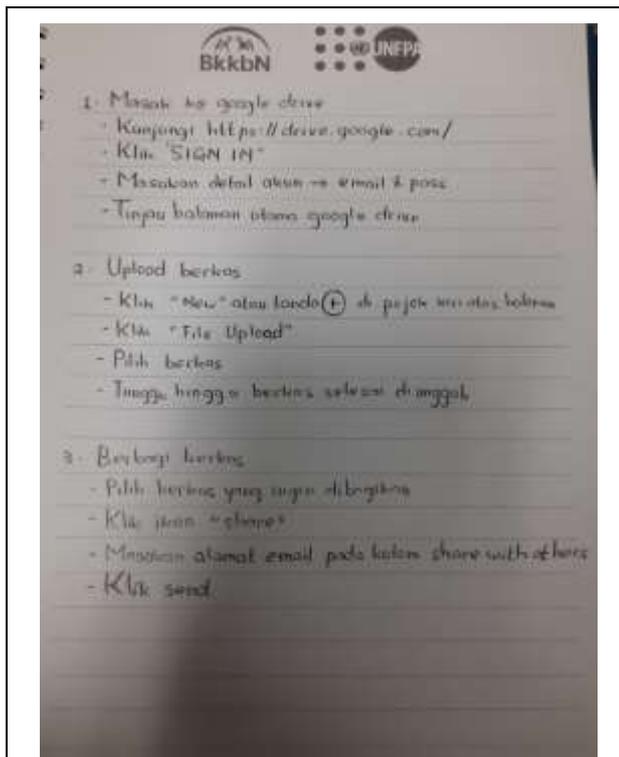
Lampiran 5

Fotokopi/*Scan* Sertifikat mengikuti Orientasi Penguatan Kompetensi Teknis
Bidang berupa Kelas E-Learning Demografi saat *Off Class*. (Belum Memperoleh)

Kegiatan 1: Mempelajari panduan penggunaan *google drive*



Mencari dan mempelajari tentang penggunaan *google drive*



Mencatat poin-poin penting tentang penggunaan *google drive*

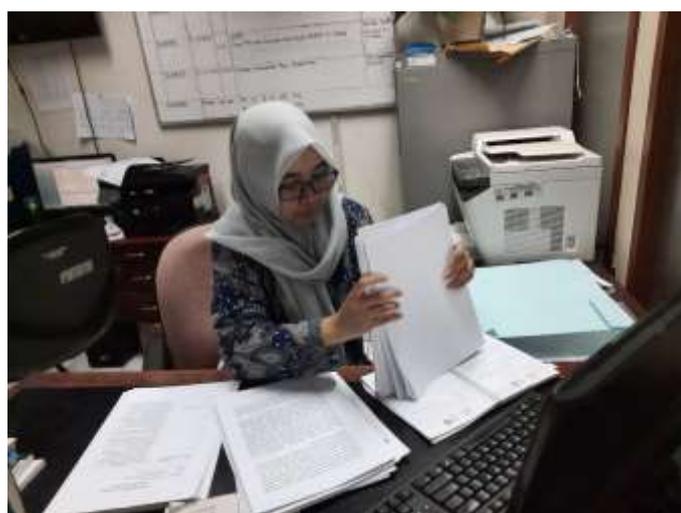


Melakukan koordinasi dengan mentor

Kegiatan 2 : Pengelompokan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit



Menyiapkan dokumen yang akan dikelompokkan

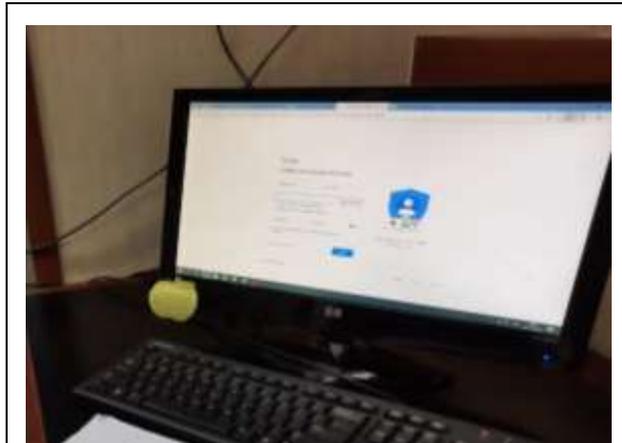


Mengelompokkan dokumen sesuai dengan waktu kegiatan dan subdit

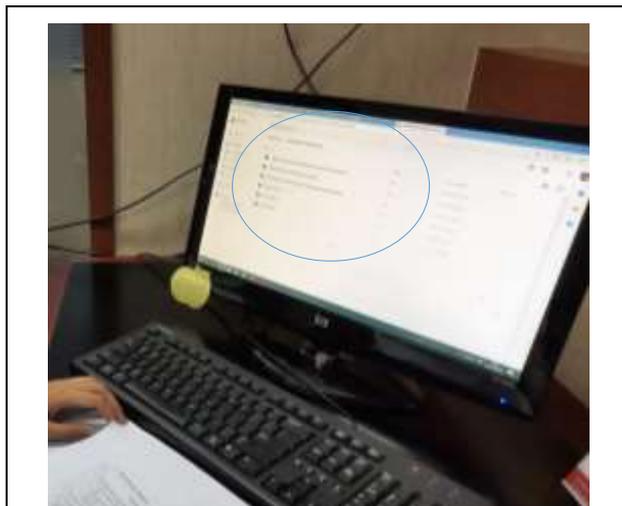


Scan dokumen-dokumen

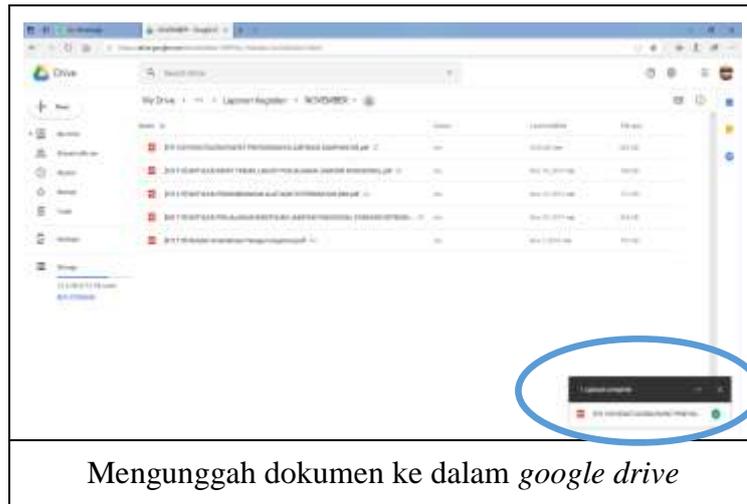
Kegiatan 3: Menata dokumen pendukung SPIP ke dalam *google drive*



Membuat akun *google drive*



Membuat folder berdasarkan waktu kegiatan dan subdit



Kegiatan 4: Mensosialisasikan hasil digitalisasi dokumen dalam *google drive* kepada seluruh pegawai ditdamduk





Membagikan *link google drive*

Kegiatan 5 : Melakukan evaluasi

EVALUASI PENGGUNAAN DIGITALISASI DOKUMEN DI DALAM GOOGLE DRIVE OLEH PESAJAH OTOMOBIL

Tahun: _____
 Bulan: _____ Tanggal: _____

No.	Tujuan yang akan diukur	1	2	3	4	5
1.	Mengetahui program yang ada					
2.	Mengetahui program yang digunakan					
3.	Mengetahui program yang digunakan					
4.	Mengetahui program yang digunakan					
5.	Mengetahui program yang digunakan					
6.	Mengetahui program yang digunakan					
7.	Mengetahui program yang digunakan					
8.	Mengetahui program yang digunakan					
9.	Mengetahui program yang digunakan					
10.	Mengetahui program yang digunakan					
11.	Mengetahui program yang digunakan					

Uraian: _____

Tanda tangan: _____

Membuat *form evaluasi*



Membagikan *form* evaluasi



Menyusun laporan